

N A S I W A N

FILSAFAT ILMU SOSIAL

Menuju Ilmu Sosial Profetik

FISTRANS Institute

Forum Ilmu Sosial Transformatif

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta

Penerbit
primaprint

N A S I W A N

FILSAFAT ILMU SOSIAL

Menuju Ilmu Sosial Profetik

FISTRANS Institute
Forum Ilmu Sosial Transformatif
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Penerbit

primapena

NASIWAN

FILSAFAT ILMU SOSIAL
Menuju Ilmu Sosial Profetik

Penerbit : FISTRANS INSTITUTE
CV PRIMAPRINT

© FISTRANS INSTITUTE
Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Cetakan I, Juni 2014 M

ISBN : 978-602-70107-0-3

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya Ke hadirat Allah Swt atas limpahan taufik, hidayah, serta pertolongannya sehingga buku Filsafat Ilmu dapat diselesaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Semoga hadirnya buku Filsafat Ilmu ini dapat membantu masyarakat untuk mempelajari Filsafat Ilmu Secara lebih mudah, lebih sistematis serta sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajarinya .

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada Bapak Dekan FIS Prof. Dr. Ajat Sudrajat, atas dukungannya dan kebijakannya untuk mendorong terbitnya buku filsafat ilmu serta buku khalayak umum diberbagai bidang ilmu. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada tim peneliti, diantaranya Bapak Cholisin dan ibu Nur Endah Januarti, atas kontribusinya, pemikiran dan kerjasamanya, selama proses penelitian unggulan perguruan tinggi dengan tema " *Pengembangan Model Ilmu Sosial Profetik Berbasis Indigenouasi* " di Fakultas Ilmu Sosial, UNY, yang dibiayai dengan dana IDB (Islamic Development Bank). Buku ini merupakan bagian dari keluaran penelitian tersebut.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan tulisan ini sangat diharapkan dari para pembaca dan pecinta ilmu Yang berkenan membaca tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan dalam buku ini masih banyak kekurangan sempurna, Semoga Allah memberikan kekuatan untuk memperbaiki pada kesempatan selanjutnya. Selamat menikmati sajian filsafat ilmu semoga Allah memberikan pencerahan ilmu kepada para pembaca untuk menjadi insan cendekia . Amien

Yogyakarta, Mei 2014

Nasiwan

Kata Pengantar

Secara keseluruhan, persoalan tradisional yang menjadi skajian utama filsafat ilmu sosial adalah berkenaan dengan tindakan manusia. Untuk memahami keadaan manusia dengan semua tindakannya, tentu sangat diperlukan suatu disiplin yang akan mengantarkan seseorang tahu betul tentang akar-akar persoalan dari fenomena sosial tersebut. Disiplin ilmu inilah yang kemudian disebut dengan filsafat ilmu sosial. Oleh karena itu, filsafat ilmu sosial tidak hanya tidak dapat dihindari dan dielakkan oleh para ilmuwan sosial, tetapi bahkan harus diperkuat dan dipertajam oleh mereka (para ilmuwan sosial) seperti halnya juga tugas para filosof sosial pada umumnya.

Namun demikian, ternyata belum didapati adanya kesepakatan yang bulat di kalangan para ilmuwan sosial, mengenai apa yang menjadi perbedaan dan problem utama serta metode dari disiplin mereka masing-masing (antara ekonomi, sosiologi, antropologi, dan seterusnya). Demikian halnya, para filosof pun tidak memiliki konsensus yang sama berkenaan dengan persisnya hakekat disiplin mereka. Tetapi, pemikiran bahwa filsafat memiliki kaitan yang erat dengan beragam ilmu tersebut, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi dan ilmu sosial lainnya, hampir semua filosof menyepakatinya.

The Cambridge Dictionary of Philosophy menegaskan bahwa filsafat ilmu sosial merupakan suatu studi mengenai logika dan metode ilmu-ilmu sosial. Topik utama filsafat ilmu sosial antara lain meliputi persoalan yang terkait dengan: kriteria yang menjadi ciri utama dari suatu penjelasan sosial; penjelasan ilmu-ilmu sosial atas suatu fenomena yang bisa dibedakan dengan cara yang digunakan oleh ilmu-

ilmu kealaman termasuk metodenya; prosedur empiris seperti apa sehingga penegasan-penegasan ilmu sosial dapat dievaluasi; dan hukum-hukum sosial yang terdapat di dalamnya, sekaligus pula menyangkut hubungan sebab akibat yang ada. Filsafat ilmu sosial, dengan demikian bertujuan untuk memberikan penafsiran dan penjelasan mengenai fenomena sosial yang merupakan jawaban atas persoalan-persoalan di atas.

Para filosof misalnya, ternyata tidak semuanya sepakat mengenai hubungan antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman. Para pengikut paham naturalisme misalnya, bagi mereka metode-metode ilmu-ilmu sosial memiliki kaitan yang sangat dekat dengan ilmu-ilmu kealaman. Pandangan ini serupa dengan paham fisikalisme, suatu paham yang mencermati relasi antara suatu fenomena dengan keteraturan, yang menempatkan fenomena sosial sebagai sebuah entitas fisik dan akan adanya hukum-hukum yang mengatur mereka.

Pada sisi yang lain, adanya pandangan yang menyatakan bahwa ilmu sosial pada dasarnya berbeda dari ilmu-ilmu kealaman. Perspektif ini menyatakan bahwa fenomena sosial secara metafisik memang dapat dibedakan dari fenomena kealaman-bergantung pada tindakan-tindakan yang bermakna dari individu. Dalam pandangan ini, fenomena kealaman memuat penjelasan-penjelasan sebab-akibat, sementara fenomena sosial memerlukan penjelasan yang jauh lebih mendalam dari sekedar sebab akibat.

Di pihak lain, pandangan kelompok anti-naturalis pun mempertahankan dan berpendapat bahwasanya terdapat korespondensi yang berbeda antara metode-metode yang sesuai dengan ilmu alam dan ilmu sosial. Para penganjur metode *verstehen* misalnya, mereka berpendapat bahwa di dalam metode *verstehen* digunakan metode penafsiran intuitif mengenai tindakan manusia yang secara radikal

berbeda dari metode *inquiry* pada ilmu-ilmu kealaman.

Meskipun ada perbedaan di atas, filsafat ilmu sosial, seperti halnya filsafat ilmu alam, memiliki baik sisi deskriptif maupun preskriptif (sesuatu yang bersifat ketentuan). Pada satu sisi, garapan ilmu sosial meliputi penjelasan-penjelasan, metode-metode, argumen-argumen empiris, teori-teori, hipotesis-hipotesis, dan seterusnya, yang secara aktual terdapat dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial. Ini berarti bahwa para ilmuwan sosial perlu memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan wilayah atau cakupan penelitian ilmu sosial ini. Pada sisi yang lain berkenaan dengan bidang 'keilmuan' (*epistemic*), persoalannya antara lain terkait dengan pemikiran di mana teori-teori dan hipotesis ilmiah ditempatkan sebagai kebenaran atau kemungkinan, dan teori serta hipotesis tersebut didasarkan pada pijakan yang rasional, baik empiris maupun teoritis.

Dalam perkembangannya, apabila dibandingkan dengan bidang-bidang lain dalam filsafat, filsafat ilmu sosial menempati kedudukan yang berbeda dan barangkali idiosinkretik. Tidak seperti kebanyakan bidang-bidang yang lain, filsafat ilmu sosial memiliki warisan panjang yang kurang menyenangkan. Meskipun sejumlah persoalan yang dikemukakan oleh para filosof ilmu sosial lebih tua atau mendahului era modern, filsafat ilmu sosial ini tampaknya tidak dapat ditelusuri jauh ke belakang sejauh abad kesembilan belas, karena hal ini terkait dengan perkembangan dan mapannya ilmu sosial itu sendiri.

Muncul dan melembaganya ilmu-ilmu sosial di perguruan tinggi pada abad kesembilan belas ternyata telah memperluas minat terkait (tidak saja kebanyakan dari kalangan filosof dan praktisi peneliti sosial, tetapi juga dari kalangan akademisi lainnya) dengan persoalan metodologi dan legitimasi ilmiah dari disiplin filsafat ilmu sosial ini. Muncul dan berkembangnya filsafat ilmu sosial

ini, merupakan suatu kombinasi antara semangat dan harapan, terutama berkaitan dengan keperluan yang serius baik terkait dengan pengakuan akademik maupun panduan metodologis.

Salah satu tantangan yang dihadapi filsafat ilmu sosial adalah bagaimana mengikuti perkembangan-perkembangan yang sangat cepat dari berbagai ilmu sosial dan bagaimana memadukan perkembangan-perkembangan tersebut. Tanpa keaktifan dalam mengikuti perkembangan tersebut secara berkelanjutan maka filsafat ilmu sosial akan berisiko menghadapi isu-isu yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks sosial yang terjadi. Salah satu isu dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial dewasa ini adalah berkaitan dengan masalah 'pribumisasi' ilmu-ilmu sosial.

Terdapat sejumlah pemikiran yang sudah dijejakan selama ini berkenaan dengan usaha pribumisasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Ada beberapa nama yang bisa disebut dalam usaha ini, antara lain, Mohammad Hatta dengan Demokrasi Ekonominya, Kuntowijoyo dengan konsep Ilmu Sosial Profetiknya (ISP), Mubiyarto dengan Ekonomi Pancasilanya (EP), kemudian disusul oleh Purwo Santoso yang menawarkan konsep Ilmu Sosial Transformatifnya (IST). Ada juga ilmuwan sosial lain yang telah menginspirasi para ilmuwan sosial dewasa ini, pada wilayah yang lebih luas, Asia, yaitu Syed Farid Alatas dengan gagasan 'Ilmu Sosial Asia'nya.

Buku yang ada di hadapan pembaca yang budiman, yang berjudul 'Filsafat Ilmu Sosial: Menuju Ilmu Sosial Profetik' merupakan usaha yang gigih dari penulisnya (Bapak Nasiwan, M.Si) dalam rangka merespon posisi ilmu sosial di Indonesia dan menindaklanjuti usaha-usaha para pendahulunya seperti disebutkan di atas. Penulis tampaknya telah dihinggapi kegelisahan yang 'cukup kuat' berkenaan dengan posisi ilmu sosial Indonesia di hadapan

ilmu sosial Barat. Penulis tampaknya merasa bahwa problem ketidakberdayaan ini harus segera diakhiri dan dicarikan jawabannya.

Buku yang ada di hadapan pembaca yang budiman inilah bukti dan merupakan jawaban atas kegelisahan tersebut. Buku ini merupakan salah satu cara dari penulisnya untuk memperlihatkan bahwa ilmuwan sosial Indonesia punya kekuatan untuk berdiri di hadapan Barat. Semoga dengan pemikiran alternatif ini dapat menginspirasi dan menggugah para ilmuwan sosial lainnya untuk melakukan gerakan dan langkah yang sama. Akhirnya, atas nama Fakultas Ilmu Sosial, yang juga sedang berusaha melakukan upaya 'pribumisasi ilmu-ilmu sosial', menyatakan kebanggaan dan terimakasihnya yang dalam, karena buku ini akan menjadi bagian dari dan mewarnai perkembangan keilmuan sosial di Fakultas Ilmu Sosial UNY. Atas usaha yang gigih dari penulis, buku ini dapat terwujud dan semoga pembaca yang budiman dapat menikmati tulisan yang tersaji dalam buku ini dan dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Aamien.

Yogyakarta, Mei 2014

Ajat Sudrajat

DAFTAR ISI

Ucapan Terimakasih	iii
Kata Pengantar	v
BAB I PENGANTAR FILSAFAT ILMU	1
A. Pendahuluan	1
B. Ruang Lingkup Filsafat	4
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU	8
A. Peradaban Yunani dan Romawi	8
Bidang metafisika	13
Biologi	15
B. Zaman Pertengahan (Abad 8-14 M)	16
Peradaban Islam dan Eropa	16
C. Zaman Renaissance dan Modern, sekitar Abad 14-20 M	17
D. Zaman Kontemporer, Sekitar Abad 20	20
BAB III KONSEPTUALISASI ILMU	21
A. Perkembangan Ilmu	21
B. Kata Empiris	24
C. Ilmu Teoritis	25
D. Teori Kebenaran, Kesalahan dan Kekeliruan	26
1. Ruang Lingkup Kebenaran	26
2. Sifat Kebenaran Ilmiah	28
3. Kesalahan dan Kekeliruan	30
E. Ilmu Pengetahuan yang Bebas Nilai dan tidak Bebas Nilai	30
BAB IV HUBUNGAN FILSAFAT DENGAN ILMU PENGETAHUAN, AGAMA, ETIKA DAN SEJARAH	33
A. Filsafat dan Ilmu Pengetahuan	33
Ilmu	34
Filsafat	34
B. Filsafat dan Agama	35
C. Filsafat, Ilmu, dan Agama	36
D. Filsafat, Ilmu dan Etika	39
E. Filsafat, Sejarah dan Agama	41

BAB V FILSAFAT DAN METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Filsafat Ilmu Positivisme dan Fenomenologi.....	44
Filsafat Ilmu Positivisme.....	44
Filsafat Ilmu Fenomenologi.....	45
Kualitatif Interpretatif	45
B. Metode Penelitian dalam Filsafat.....	47
Metodologi penelitian	47
1. Metode Positivisme	47
2. Metode Fenomenologis	50
C. Metode Ilmiah	52
BAB VI PENERAPAN FILSAFAT DAN METODE PENELITIAN	
FENOMENOLOGI	55
A. Pengantar	55
B. Latar Belakang Lahirnya Filsafat Ilmu Phenomenologik.....	57
C. Perspektif fenomenologis	59
D. Konstruksi Sosial.....	60
Proses Eksternalisasi	64
Proses Objektivasi	66
Proses Internalisasi.....	69
E. Pandangan Fenomenologi tentang ‘Kesadaran Melakukan Tindakan’	71
F. Proses Reduksi Dalam Penelitian Fenomenologi.....	75
G. Analisis Data Secara Fenomenologi dalam Rangka Penarikan Proposisi	81
BAB VII INTEGRASI ILMU DAN AGAMA.....	86
A. Diskursus Alternatif Ilmu Pengetahuan.....	86
B. Pandangan Ilmu Pengetahuan dan Islam	91
C. Tauhid sebagai Prinsip Integrasi Ilmu dan Islam.....	92
D. Konsep Islamisasi Iptek	93
1. Struktural Transendental	98
2. Benang Merah antara Al- Fatihah dan Hanacaraka.....	100
BAB VIII FILSAFAT ILMU SOSIAL.....	103
A. Sejarah Filsafat Ilmu Sosial.....	105
B. Perkembangan dan Problematika Ilmu-Ilmu Sosial	109
C. Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial	116

BAB IX MENUJU ILMU SOSIAL PROFETIK	121
A. Dari 'itibar menuju Ilmu Sosial Profetik	121
B. Politik Profetik: Pemikiran Politik Kuntowijoyo	123
C. Di Sekitar Diskusi tentang Objektivitas.....	130
Pembahasan atas "Obyektivitas Penelitian Sosial"	140
D. Diskursus Islam Kultural, Islam Struktural, Islam Politik	146
E. Fenomena Objektif Ilmuwan Muslim	151
F. Politik Islam: Ikhtiar Membangun Umat?	155
G. Muslim Negarawan: Lentera Kecil menuju Politik Profetik ..	161
Endnote.....	174

DAFTAR GAMBAR

gambar 1	3
gambar 2	9
gambar 3	39
gambar 4	47
gambar 5	75
gambar 6	83
gambar 7	100
gambar 8	104
gambar 9	123
gambar 10	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1	53
Tabel 2	54
Tabel 3	96
Tabel 4	148

Bab I

PENGANTAR FILSAFAT ILMU

A. PENDAHULUAN

Secara etimologis istilah “filsafat” diambil dari bahasa Yunani, yaitu *Philo* dan *shopia*. *Philo* berarti cinta dan *Shopia* berarti bijaksana. Jadi, kata *philoshopia* berarti cinta kepada kebijaksanaan. Orang-orang Yunani sebelum Phytagoras mengartikan kata *Sophia* sebagai kemahiran dan kecakapan dalam suatu pekerjaan. Kemudian kata “filsafat” masuk dalam bahasa Arab menjadi “falsafah”, dan kemudian menjadi “*philosophy*” dalam bahasa Inggris, *philosophia* dari bahasa latin dan *philosophie* dari bahasa Jerman, Belanda dan Perancis (Fu’ad Farid Isma’il, Abdul Hamid Mutawalli, 2012: 18-19). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya.

Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka muncullah ilmu-ilmu pengetahuan yang mempelajari bidang-bidang tertentu, namun apabila ditelusuri sesungguhnya akan kembali pada filsafat. Pada konteks yang lain, filsafat juga sebagai suatu sikap terhadap kehidupan, dengan meninjau problem-problem yang ada secara luas dan mendalam secara kritis dan terbuka terhadap semua sudut pandang problem yang ada. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang paling luas cakupannya.

Seseorang yang mempelajari filsafat diharapkan dapat berfikir komprehensif yaitu berfikir secara menyeluruh tidak parsial dan secara radikal atau mendalam sampai ke akar-

akar masalah, karena filsafat berusaha untuk memikirkan masalah-masalah manusia secara mendalam dengan alasan yang benar dan teliti. Suatu pertanyaan akan diikuti oleh pertanyaan berikutnya, dan tidak akan menemukan jawaban akhir. Inilah yang dimaksud berpikir sedalam-dalamnya dalam berfilsafat. Seseorang yang berfikir secara filsafat akan terus mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban, kemudian mengajukan pertanyaan kembali sampai memperoleh jawaban dan begitu seterusnya. Ilmuwan tidak akan pernah puas jika hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri. Disamping itu, hakikat ilmu dilihat pula dari sudut lain daripada ilmu itu sendiri.

Seseorang yang mempelajari filsafat juga dapat menambah cakrawala pengetahuan yang lebih luas, bersikap dinamik, terbuka dalam penelitian serta melakukan penyelidikan dengan hati-hati sehingga menyimpulkannya dengan cara yang akurat. Dalam mengambil kesimpulan tidak tergesa-gesa, melainkan dan membutuhkan pemikiran yang mendalam.

Filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan lain, ia mempelajari dan menyelidiki seluruh alam seisinya. Selain itu, seseorang akan dapat berfikir kritis menanggapi gejala ataupun fenomena permasalahan serta dapat menemukan kebajikan yang ada. Dengan begitu, seorang intelektual akan menggunakan akalnyanya untuk berfikir secara rasional dan sistematis tertuju pada sistem tertentu yang disepakati oleh komunitas ilmiah dengan terarah.

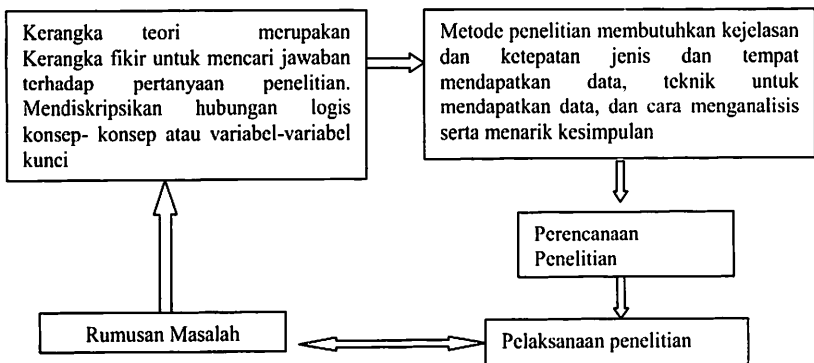
Filsafat menggabungkan kesimpulan-kesimpulan berbagai macam teori ilmu pengetahuan menjadi suatu pandangan dunia yang akan dipelajari semua orang. Dalam konteks ini dapat dimisalkan, cara berfikir dan bekerja seseorang dukun dengan ilmuan akan berbeda. Seorang dukun tidak akan berfikir secara rasional dan tidak dapat dilogika. Ia lebih percaya dengan mitos dan hal-hal gaib di

luar nalar manusia. Dibandingkan dengan seorang ilmuwan, ilmuwan akan berfikir secara rasional dan dapat diterima secara logika. Berfikirnya seorang ilmuwan tentu menggunakan akalnnya untuk berfikir secara sistematis dan dinamik. Setiap ilmu mempunyai kesepakatan yang berkaitan antara asumsi awal, pendekatan, aksioma dan teori-teori. Kebutuhan untuk mengerti apa yang sedang terjadi disekitar kita dan untuk mengalami secara bersama adalah yang membuat pemikiran dan penelitian sistematis itu esensial (Kenneth R. , 1990:6)

Dikaitkan dengan posisi teori, dalam penelitian, teori dapat dipergunakan untuk memperjelas akurasi penelitian dan membantu menemukan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Manfaat teori erat kaitannya dengan logika deduktif dalam melakukan penelitian serta cara berfikir ilmiah. Berfikir deduktif yaitu mengacu pada teori-teori sebelumnya (koherensif), dalam melakukan pembahasan suatu masalah penelitian.

Di bawah ini merupakan ilustrasi bagan hubungan teori dengan kerangka fikir ilmiah:

gambar 1
Kerangka Fikir Ilmiah



B. RUANG LINGKUP FILSAFAT

Menurut Jujun Suriasumantri (2009:5) ruang lingkup pembahasan filsafat ilmu berlandaskan pada tiga hal yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi.

1. Ontologi

Ontologi membahas mengenai apa yang dikaji (subjek mater, objek formal). Setiap bidang ilmu harus mempunyai dua bidang objek tersebut. Objek material merupakan sesuatu hal yang menjadi sasaran pemikiran, yang akan dipelajari. Dengan kata lain objek material merupakan segala sesuatu yang dipermasalahkan dalam filsafat. Objek material filsafat berupa hakikat "ada". Misalnya saja : Ilmu Politik, melihat individu dari sisi perilaku politik yang menyangkut kekuasaan, kebijakan, konflik. Sedangkan objek formal merupakan cara pandang, melihat dalam meninjau yang dilakukan seseorang peneliti pada objek material.

Objek ini tidak fragmentaris, karena mencari segala sesuatu secara meluas dan mendalam yang menjadikan objek formal tidak semata-mata menjadi pendukung atau menyamakan, tetapi juga membedakan dengan bidang lain. Objek tersebut ada dalam jangkauan manusia yang dapat dibuktikan secara nyata, sehingga dapat disebut sebagai pengetahuan yang empiris. Berlainan dengan budaya, agama ataupun pengetahuan yang lain. Karena filsafat dimulai dari suatu keragu-raguan yang butuh penelitian untuk mendapat suatu kepastian. Sedangkan agama muncul sudah dalam bentuk hal yang pasti, yang turun dari wahyu Tuhan bukan muncul dari kesangsian yang dibuat manusia.

Apabila manusia dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mendasar maka hal ini dapat diselesaikan melalui bidang filsafat. Apabila permasalahan itu di luar

jangkauan manusia maka pantasnya diselesaikan melalui bidang agama dengan wahyu Allah. Filsafat berkaitan dengan ontologi karena filsafat ilmu menyelidiki landasan ontologi dari suatu ilmu. Landasan ontologi tersebut dapat dicari dengan menanyakan apa asumsi ilmu terhadap objek materi maupun objek formal, apakah bersifat fisik ataupun bersifat kejiwaan (Jujun S Suryasumantri, 2009:8).

2. Epistemologi

Epistemologi termasuk cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode dan batasan pengetahuan manusia (*a branch of philosophy that investigates the origin, nature, methods and limits of human knowledge*). Epistemologi berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan lebih fundamental lagi bersangkutan dengan kriteria bagi penilaian terhadap kebenaran dan kepalsuan, tepat apabila dihubungkan dengan metodologi. Epistemologi menjadi jawaban dari ontologi.

Epistemologi membicarakan mengenai cara memperoleh ilmu, sehingga ada perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Epistemologi tidak cukup hanya memberikan gambaran mengenai bagaimana proses manusia itu mengetahui apa yang terjadi, tetapi perlu membuat penentuan mana yang betul dan mana yang keliru berdasarkan norma epistemik (Sudarminta, 2002: 19). Oleh karena itu cabang ini tidak hanya membahas mengenai asal mula, tetapi dengan metode dan sistem apa yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran.

Pengetahuan yang didapat melalui metode atau langkah-langkah yang sistematis disebut ilmu. Ilmu pengetahuan mengenai suatu hal tertentu khususnya objek kesatuan sistem yang sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang didapat dari firasat itu bukan ilmu namun

hanya pengetahuan. Hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berfikir yang dilakukan menurut syarat keilmuan, yaitu bersifat terbuka dan menjunjung kebenaran di atas segala-galanya (Jujun S. Suriasumantri, 2009:9).

Objek material filsafat pengetahuan adalah gejala pengetahuan, sedang objek material filsafat ilmu yaitu mempelajari gejala-gejala ilmu. Epistemologi berusaha untuk menjawab semua permasalahan yang muncul. Epistemologi digunakan agar peneliti tidak hanya terpaku pada objek material saja. Dalam epistemologi yang dibahas adalah objek pengetahuan, sumber dan alat untuk memperoleh pengetahuan, kesadaran dan metode, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan (Verhak dan Haryono, 1989:3). Sesuatu dapat dikatalakan ilmu pengetahuan apabila sesuai dengan metode dan sistematis. Metode adalah tata cara dari suatu kegiatan berdasarkan perencanaan yang matang dan mapan, sistematis dan logis.

Pada dasarnya metode ilmiah dilandasi :

- Kerangka pemikiran yang logis;
- Penjabaran hipotesis yang merupakan deduksi dan kerangka pemikiran;
- Verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenarannya secara fakta

Paradigma merupakan kesepakatan ilmiah tentang kesepakatan ilmu, metodologi, pendekatan, aksioma, objek formalnya. Jadi ilmu pengetahuan bersifat sistematis, cara mendapatkannya valid, dan reliabel. Paradigma akan melahirkan suatu asumsi yang menjadi landasan filsafat hingga ditemukannya suatu pendekatan untuk membentuk teori. Maka dari itu, suatu premis akan dapat diterima sebagai suatu pandangan ilmiah apabila telah melalui pengkajian ontologik.

1. Aksiologi

Aksiologi merupakan teori tentang nilai. Aksiologi membicarakan kegunaan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah untuk merubah agar kehidupan manusia lebih makmur, sejahtera, dan nyaman. Karena pada dasarnya ilmu adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tidak dapat dielakkan lagi, selama ini ilmu telah banyak berkontribusi bagi kemudahan manusia dalam mengendalikan alam semesta. Ilmu tidak bisa disalahkan atas akibat yang timbul olehnya, karena ilmu sebenarnya netral tergantung para pengguna ataupun pelaku yang tidak dapat memanfaatkannya.

Ilmu dan kekuasaan memiliki keterkaitan. Ilmu bisa dijadikan kekuasaan oleh rezim yang masih berkuasa. Pada zaman dahulu ilmu tidak dapat mempengaruhi sebuah kekuasaan. Misal saja pada zaman Galileo dan Copernicus yang langsung dihukum mati ketika mengatakan bahwa bumi itu berputar. Tapi lain halnya sekarang, seorang yang berilmu akan mendapat kekuasaan atau mempengaruhi kekuasaan. Seorang yang berkuasa harus berilmu. Dalam aksiologi ilmu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama seperti : *kloning, euthanasia*. Teori dalam penelitian dipergunakan untuk memperjelas akurasi ketepatan. Permasalahan saat ini yaitu adanya kesenjangan antara teori dan realita. Teori yang ada saat ini dapat dibantahkan dengan realita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan maupun ketidaksesuaian dengan kultur masyarakat. Masyarakat yang dinamik menuntut kekritisian terhadap teori yang sudah ada. Teori-teori yang muncul saat ini tidak hanya digunakan untuk menyele-saiakan permasalahan, tetapi digunakan pula untuk ke-serakahan manusia yang justru menimbulkan bahaya atau permasalahan baru (Jujun S. Suriasumantri, 2009:9).

Bab II

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU

Ilmu pengetahuan modern yang kita terima saat ini memiliki keterkaitan dengan peradaban Yunani, Romawi. Kemudian peradaban Islam menyerap ilmu-ilmu penting dari peradaban Yunani. Di pangakuan peradaban Islam tersebut fenomena besar terjadi yakni ketika muncul revolusi peradaban Islam. Hal tersebut ditandai oleh jasa besar peradaban Islam merawat dan mewariskan peradaban ilmu ketika pada pada saat yang sama di tempat yang lain terjadi abad kegelapan di Eropa.

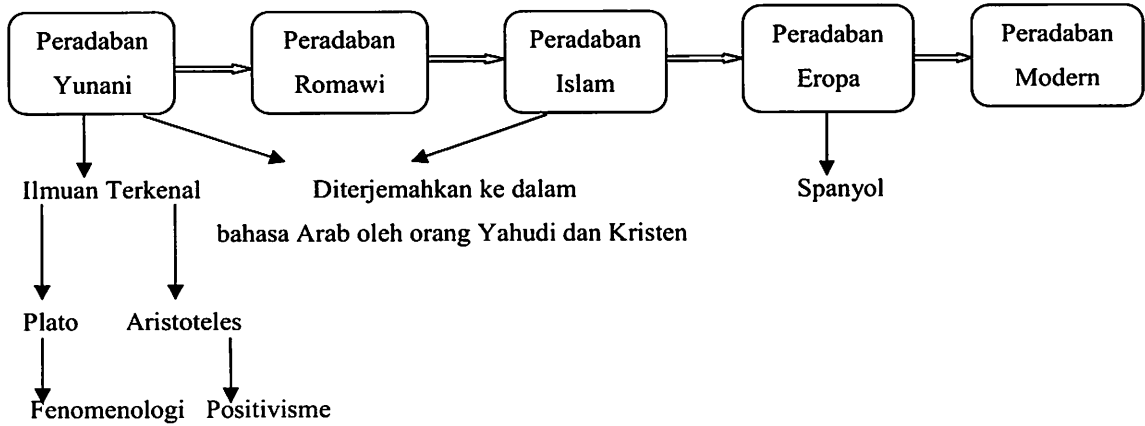
A. PERADABAN YUNANI DAN ROMAWI

Zaman Yunani Kuno ada pada abad 2-7 SM, dimana pada abad itu merupakan zaman keemasan bagi filsafat, karena tidak ada keterbatasan bagi berkembangnya ide-ide pengetahuan. Pada abad tersebut, pengetahuan agama menghambat pengetahuan yang bersifat rasional (umum). Bangsa Yunani pada saat itu tidak mempercayai mitos-mitos karena mereka terfokus pada ilmu pengetahuan. Zaman itu beranggapan bahwa manusia bagian dari alam sehingga disebut zaman kosmosentris. Banyak lahir para pemikir besar seperti: Thales, Phytagoras, Sokrates, Leucippus, Plato dan Aristoteles yang mendekati cara berfikir ilmiah.

1. Thales

Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat Barat pada abad ke-6 SM. Sebelum Thales, pemikiran Yunani menggunakan cara berpikir mitologis dalam

gambar 2
Bagan Perkembangan
Ilmu Pengetahuan



menjelaskan segala hal. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia memikirkan mengenai asal alam semesta. Menurutnya asal alam semesta adalah air. Dunia tidak akan ada kehidupan tanpa air. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli astronomi, geometri dan politik.

Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya, bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam (*natural philosophy*).

2. Pythagoras

Pythagoras dikenal sebagai filsuf dan ahli ukur. Pada masa Yunani ia sudah berfikir bahwa bumi itu bundar tidak datar. Ia seorang matematikawan dan filsuf yang terkenal dengan teoremanya. Dikenal sebagai "Bapak Bilangan", dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 SM. Namun ajarannya kurang jelas jadi banyak cerita subjektif dan karangan mengenai beliau. Teorema Pythagoras adalah teori yang paling dikenal hingga sekarang. Ia yakin bahwa segala sesuatu di dunia berhubungan dengan matematika, sehingga semua dapat diukur dengan siklus beritme. Ia percaya keindahan matematika disebabkan segala fenomena alam dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan.

3. Sokrates (470-399 SM)

Socrates adalah fisuf Athena Yunani dan merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Socrates lahir di Athena, dan merupakan generasi pertama dari tiga ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato

dan Aristoteles. Ia merupakan guru dari Plato, dan kemudian Aristoteles berguru pada Plato. Jasa Socrates bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode *elenchos*, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, dan juga filsafat secara umum. Selain itu, ia dikenal dengan metode dialektika untuk melahirkan sebuah kebenaran. Ia lebih mementingkan metode tersebut, sehingga walaupun ia tidak meninggalkan teori-teori ilmu tertentu, sikap kritisnya menjadi pedoman sampai zaman modern sekarang.

4. Democritus

Demokritos adalah filsuf yang bermahzab atomisme. Ia adalah murid dari Leukippos, pendiri mazhab tersebut. Demokritos mengembangkan pemikiran tentang atom sehingga justru pemikiran Demokritos yang lebih dikenal di dalam sejarah filsafat. Selain sebagai filsuf, Demokritos juga dikenal menguasai banyak keahlian, namun karya-karyanya tidak ada yang tersimpan. Demokritos menulis tentang ilmu alam, matematika, astronomi, epistemologi dan sebagian besar kutipan-kutipan Demokritos berisi tentang etika.

Demokritos dan gurunya, Leukippos, berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang membentuk realitas. Menurutnya dunia dan seisinya tercipta karena atom-atom yang berbeda bentuk saling mengait satu sama lain. Atom-atom yang berkaitan itu kemudian mulai bergerak berputar, dan makin lama makin banyak atom yang ikut ambil bagian dari gerak tersebut. Kumpulan atom yang lebih besar tinggal di pusat gerak tersebut sedangkan kumpulan atom yang lebih halus dilontarkan ke ujungnya sehingga terbentuklah dunia. Ia juga berpandangan bahwa manusia juga terdiri dari atom-atom. Jiwa manusia digambarkan sebagai atom-atom halus. Atom-atom ini digerakkan oleh gambaran-gambaran kecil atas suatu benda yang disebut *eidola*. Gambaran-gambaran inilah yang

masuk ke panca indra manusia dan disalurkan ke jiwa. Manusia dapat melihat karena gambaran-gambaran kecil tersebut bersentuhan dengan atom-atom jiwa. Dengan demikian muncul kesan-kesan indrawi atas benda-benda tersebut.

Demokritos menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengenali hakikat sejati suatu benda. Yang dapat diamati hanyalah gejala atau penampakan benda tersebut. Demokritos mengatakan: "Tentunya akan menjadi jelas, ada satu masalah yang tidak dapat dipecahkan, yakni bagaimana keadaan setiap benda dalam kenyataan yang sesungguhnya. Sesungguhnya, kita sama sekali tidak tahu sebab kebenaran terletak di dasar jurang yang dalam." Nilai tertinggi di dalam hidup manusia adalah keadaan batin yang sempurna (*euthymia*). Hal itu dapat dicapai bila manusia menyeimbangkan semua faktor di dalam kehidupan: kesenangan dan kesusahan, kenikmatan dan pantangan dengan rasio.

5. Plato dan Aristoteles

Pada abad ke-4 SM Plato adalah filsuf yang paling tua dan paling awal yang tulisannya masih ada. Ia adalah ahli matematika dan filsafat. Dalam *Republik* ia berargumen bahwa geometri mempersiapkan pikiran untuk perbincangan dialektis tentang ide-ide yang nyata, yang mana benda-benda inderawi tak lain daripada bayang-bayanginya, dan dari sana menuju kebijaksanaan dan penerangan (Jerome R. Ravertz, 2009:10).

Ia menyatakan bahwa pengetahuan yang asli itu tidak berubah sehingga objek yang dipelajari juga tetap tidak berubah. Pengetahuan yang asli itu di arahkan pada sesuatu yang ada. Sesuatu hal yang ada berupa hal-hal yang dapat diindera dan nyata, sedangkan dunia ide adalah yang kekal dan abadi. Hal yang tetap, yang tidak berubah, yang kekal itu oleh Plato disebut ide (Harun Hadiwijono, 1988;39-40;

Bertens, 1989:14). Menurutnya yang hakekat atau nyata adalah dalam dunia ide, sedangkan yang duniawi adalah bayang-bayang pantulan dari dunia yang sesungguhnya. Plato lebih menekankan pada sesuatu hal yang abstrak seperti: “Kesatuan”, “Keadilan”, “Kebaikan”. Sifat-sifat ini mengandung ide-ide abadi yang tidak akan pernah mati dan selalu merupakan problem aktual dalam pemikiran umat manusia. Dunia ide ini tersusun secara hirarkhis di bawah pimpinan ide utama, yaitu ide kebaikan (Baker, 1992:33).

Pemikiran Plato dibantah oleh muridnya yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato dan merupakan penasihat serta guru Iskandar Agung. Ia berpendapat dengan yang benar adalah yang dapat diobservasi atau dibuktikan secara empiris atau dengan didukung bukti-bukti empiris. Dari kedua pemikiran para ahli tersebut, maka muncullah dua macam mazhab, yaitu:

- Fenomenologi
Salah satu yang menegaskan pemikiran ini yaitu Plato dengan pandangan spekulatifnya. Geometris mempersiapkan ide-ide yang nyata (*The Real Ideas*) yang mana benda-benda inderawi tidak lain daripada bayang-bayang penerangan (*illumination*).
- Positivisme
Mahzab ini ditegaskan oleh Aristoteles dengan pandangan empirisnya. Yang nyata dan yang benar adalah yang dapat dibuktikan secara empiris secara nyata dapat diobservasi. Jadi kebenaran ilmu pengetahuan adalah pernyataan yang didukung oleh teori-teori empiris.

Ajaran Aristoteles dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bidang yaitu : Metafisika, Logika, dan Biologi serta sebuah taksonomi.

Bidang metafisika

Metafisika merupakan suatu studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realita. Hubungannya dengan teori komunikasi, metafisika berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sifat manusia dan hubungannya secara kontekstual dan individual dengan realita dalam alam semesta
- 2) Sifat dan fakta bagi tujuan, perilaku, penyebab, dan aturan
- 3) Problem pilihan, khususnya kebebasan versus determinisme pada perilaku

Berbeda dengan pendapat Plato, Aristoteles lebih menekankan yang esensi adalah dunia realitas itu sendiri. Berbeda dengan Plato yang lebih terfokus pada pemahaman, ajaran Aristoteles menekankan pada kemampuan pada batas-batas penelitian dan penyelesaian masalah. Penyelidikan masalah filsafat tidak akan pernah berakhir karena setiap jawaban yang ada menimbulkan pertanyaan baru sampai mendalam. Butir penting dalam filsafat Aristoteles yaitu suatu materi tidak dicari pada suatu hal yang lain, namun ada dalam pemikiran itu sendiri. Sesuatu itu ada di dalam suatu hal itu sendiri, bukan ada pada yang lain. Aristoteles mengatakan bahwa ilmu itu tidak mengabdikan pada pihak lain. Ilmu itu digulati oleh manusia demi ilmu itu sendiri (Jujun S. Suriasumantri, 2009: 233).

Objek metafisika menurut Aristoteles, ada dua yakni :

- Ada sebagai yang ada; ilmu pengetahuan mengkaji yang ada itu dalam bentuk semurni-murninya, bahwa suatu benda itu sungguh-sungguh ada dalam keadaan yang tidak berubah, atau dapat diserapnya oleh panca indera. Metafisika disebut juga Ontologi.
- Ada sebagai yang Illahi; keberadaan yang mutlak dan

kekal, yang tidak bergantung pada yang lain, yakni Tuhan yang tidak dapat dijangkau indera manusia.

Logika

Aristoteles membuat buku logika untuk menarik suatu kesimpulan yang didasarkan pada silogisme. Silogisme terdiri atas tiga pernyataan yaitu:

- 1) Premis Mayor merupakan pernyataan pertama mengenai hal umum yang dianggap benar
- 2) Premis Minor merupakan pernyataan kedua yang lebih kecil lingkupnya dari Premis Mayor.
- 3) Kesimpulan yang ditarik dari premis mayor dan premis minor.

Jadi silogisme merupakan pernyataan deduktif yang bersifat pasti. Misalnya:

Semua makhluk hidup pasti bernafas
Manusia termasuk makhluk hidup
Manusia pasti bernafas.

Biologi

Biologi juga merupakan salah satu bidang ilmu yang diperhatikan oleh Aristoteles. Ia melakukan pengamatan dengan embrio dalam perkembangan telur ayam menjadi kepala ayam. Pengamatan ini membuktikan teori positivismenya dalam ilmu-ilmu empirik.

Peradaban Yunani mengalami kemunduran, karena Yunani kurang kuat dalam pertahanan, tapi perkembangan ilmu pengetahuan maju. Sedangkan pada Zaman Romawi peradaban ini terjadi kegelapan karena ilmu pengetahuan tidak berkembang (adanya mitos) lebih fokus pada perang yang lebih mengandalkan fisik, lebih senang memperluas

kekuasaan perang dan mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan. Di zaman ini ide-ide pengetahuan tidak dapat berkembang dengan baik.

Abad kegelapan adalah abad di mana tidak mengenal ilmu pengetahuan karena dihambat oleh agama dan mitos. Mitos dan doktrin agama menjadi penghambat bagi perkembangan ilmu. Ilmu mulai pengetahuan berkembang lagi karena adanya pengaruh dari peradaban Islam sampai Spanyol di Cordova.

B. ZAMAN PERTENGAHAN (ABAD 8-14 M)

Peradaban Islam dan Eropa

Pada masa Peradaban Islam lahir tokoh seperti : Ibnu Sina dan Al-Razi dalam bidang kedokteran, dan Al-Ghazali. Ibnu Sina telah menulis buku-buku kedokteran yang menjadi pedoman di Eropa. Ibnu Rushd seorang ahli kedokteran menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles. Islam menyerap ilmu-ilmu penting dari peradaban Yunani. Fenomena besar terjadi ketika revolusi peradaban Islam. Pada abad ke-7 dimana sebagian Eropa mengalami kegelapan, peradaban Islam mempunyai jasa besar karena mempunyai satu penerapan besar (terjemahan) terutama dalam ilmu kedokteran. Ketika Eropa mengalami zaman kegelapan, peradaban Islam berada pada zaman keemasan. Pada abad ini pula pada zaman Bani Umayyah telah ditemukan cara pengamatan astronomi sebelum Galileo Galilei dan Copernicus.

Pada awalnya ada penyelamatan dari peradaban Yunani oleh peradaban Islam dengan cara penterjemahan dalam bahasa arab dengan bantuan Yahudi, Kristen yang pada abad 12 diterjemahkan dalam bahasa Inggris kembali. Dalam aksiologi ilmu tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama. Yang menjadikan kejayaan

pada masa peradaban Islam adalah dengan adanya (Ali Ketani, 1984:85):

- a) *Universalism*
- b) *Tolerance*
- c) *International character of the market*
- d) *Respect for science and scientist*
- e) *The Islamic nature of both the ends and means of science*

Jadi dengan adanya universalisme, dan toleransi menjadikan sebuah kemajuan pada saat peradaban Islam. Hal ini juga didukung dengan adanya pasar yang bertaraf internasional serta adanya penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan ilmuan. Semua sarana dan tujuan yang ada berkaitan dan bahkan bersifat islami.

Pada abad pertengahan ini peran agama di Eropa juga sangat signifikan. Zaman ini disebut zaman teosentris, dimana peran gereja sangat dominan dan orientasinya super natural. Doktrin-doktrin agama dipergunakan dalam tata kehidupan negara di Eropa. Kitab-kitab agama merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan. Ilmu pengetahuan dibatasi oleh hukum-hukum agama.

C. ZAMAN RENAISSANCE DAN MODERN, SEKITAR ABAD 14-20 M

Zaman Renaissance sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari doktrin-doktrin agama. Zaman ini merupakan zaman peralihan dari peradaban Tengah ke peradaban Eropa modern. Seseorang merindukan pemikiran yang bebas, merdeka dan berkembang yang tidak terikat apapun termasuk agama dan doktrin gereja. Mereka menginginkan kemajuan pemikiran ilmu atas usaha sendiri tanpa campur tangan Ilahi.

Humanisme pada zaman ini sangat diperjuangkan.

Humanisme melahirkan individualisme dan naturalisme. Individual menjadikan masyarakat di Eropa menjunjung tinggi rasa keindividualnya, sehingga mendorong prestasi dan kreativitasnya secara individu serta rasa keegoisan. Dari naturalisme inilah lahir pemikiran atheis dimana manusia berhak mempunyai kodrat baik yang harus dihargai, sehingga menganggap pribadi mereka sudah lebih segala-galanya tanpa batasan dari agama khususnya pengakuan terhadap Tuhan. Renaissance membuat orang ingin meraih prestasi. Geneologi Ilmu Modern (Barat):

Diinspirasi tiga peradaban besar, yaitu Yunani-Romawi, Kristen-Barat, dan Islam.

- Zaman Yunani-Romawi
Abad pertengahan sampai sekitar abad 12-13 karena ada dominasi empirium agama (*Theocracy*), maka kebenaran baik ilmu politik dimonopoli oleh institusi agama atau gereja.
- Kebenaran ilmu menjadi subordinat dari kebenaran politik dan agama.
- Eropa bangkit karena memusuhi agama, karena agama dianggap sebagai penghalang. Oleh karena itu ada permusuhan dalam agama dalam arti lembaga, hal ini menjadikan energi ilmu sekuler sampai hari ini.
Pada saat Eropa mengalami kemunduran, peradaban Islam justru mengalami kebangkitan yang diilhami oleh Ibnu Rusyd dengan pemikirannya yang empiris dan logis.
- Lalu muncul Karl Mark yang menentang semua itu, ia berpendapat bahwa agama adalah racun bagi masyarakat.

Pada abad ke-17 ada pengembangan teori empiris Aristoteles oleh Francis Bacon, Galileo Galilei dan Descartes. Pada abad ini ilmuwan berpandangan bahwa ilmu itu teratur ada perubahan yang sangat besar, yang semula ia dikuasai

alam berbalik menjadi ingin menguasai alam menggunakan ilmu. Hal ini yang menyebabkan ilmu di Barat menjadi sekuler yang menentang mitos dan hal yang gaib dan bebas nilai atau *free value*.

Doktrin agama sangat membatasi perkembangan ilmu. Orang tidak boleh berfikir kritis dan berfikir maju. Agama menjadi opium dalam masyarakat dimonopoli oleh aktor politik dan aktor agama. Karena pada awalnya ilmu berkembang ada penentangan terhadap doktrin-doktrin tertentu. Ilmu berkembang mengikuti akal yang empiris, jauh dari agama doktrin. Ilmuan, dokter, dan jaksa pada abad 17 ini harus netral harus. Ilmuan mengembangkan ilmu dan teknologi untuk ilmu dan digunakan oleh para penguasa untuk melakukan hal yang tidak semestinya. Misalnya saja bom Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945; serta prinsip ekonomi yang sekuler. Karena ilmu menentang mitos dan yang gaib maka ilmu menjadi sekuler dan menganggap ilmu itu terpisah dari agama.

Zaman modern ditandai dengan banyak penemuan ilmiah dan semakin berkembang pesatnya teknologi. Penemuan-penemuan ini sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Sumber perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini adalah (Slamet Iman Santoso, 1977:65), yaitu :

- a. Hubungan kerajaan islam dengan Perancis. Para pendeta Perancis banyak belajar di Spanyol, kemudian mereka menyebarkan ilmu pengetahuan yang dipelajari tersebut.
- b. Perang Salib yang terjadi sekitar tahun 1100-1300 yang terjadi enam kali menjadikan serdadu Eropa sadar akan kemajuan Islam, sehingga menerapkannya di negara masing-masing.
- c. Istanbul jatuh ke tangan Turki sekitar tahun 1453, sehingga para sarjana serta pendeta menyebarluaskan ilmu pengetahuan di Eropa.

Pada abad ke-18 terjadi Revolusi industri, dimana lahir materialisme dan positivisme. Penghargaan besar terhadap materi ada untuk menghilangkan hal-hal bersifat immateri yang mengarah pada ateisme. Perhitungan kuantitatif, ilmu perhitungan seperti matematik dan fisika mengalami kemajuan. Sehingga pada abad 19 muncul ilmu-ilmu sosial yang mengarah pada positivisme. Pada abad ini manusia tidak hanya mengingkari Tuhan tapi juga agar lebih bebas dalam penghargaan terhadap hasil pemikiran manusia. Ilmu-ilmu pengetahuan ini dianggap mampu membebaskan manusia dari kesengsaraan dunia.

D. ZAMAN KONTEMPORER, SEKITAR ABAD 20

Bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi. Fisikawan yang termashur abad ini adalah Albert Einstein. Di samping teori Fisika, teori alam semesta dan laini lain dengan itu zaman ini dipenuhi penemuan berbagai macam teknologi. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satunya yang mengalami kemajuan pesat. Ilmu kedokteran semakin berkembang ke arah spesialis, sehingga dihasilkan pula bidang ilmu baru seperti bioteknologi, psiko-linguistik dan sebagainya. Di abad ini materialisme modern ada seiring dengan perkembangan teknologi. Sehingga ada orientasi yang beranggapan sesuatu itu dapat dinilai dan dihargai sejauh mana dapat berfungsi dan memberikan manfaat yang lebih bagi perkembangan teknologi. (Masih perlu dielaborasi)

Bab III

KONSEPTUALISASI ILMU

A. PERKEMBANGAN ILMU

Sejak zaman dahulu manusia purba telah menemukan hal-hal empiris untuk memaknai arti dunia. Manusia purba telah sedikit tahu bagaimana hidup untuk beradaptasi dengan dunia dengan berinteraksi dengan alam. Interaksi itu baik dalam pemenuhan sarana untuk kehidupan atau hal lain. Sehingga pada perkembangannya bangsa Yunani dianggap menjadi bapak perintis ilmu pengetahuan yang mendekati sistematis. Dimana zaman ini pula lahir banyak para pemikir besar seperti Plato, dan Aristoteles. Ilmu pengetahuan mendapat penghargaan besar pada masa ini.

Pendekatan silogisme adalah satu-satunya metode yang efektif dalam cara berpikir pada zaman Yunani Romawi hingga zaman Renaissance (Jujun S. Sumantri, 2009: 87). Pada abad pertengahan, banyak pemikiran secara silogisme. Sehingga banyak pemikir yang tanpa memperhatikan kenyataan atau data empiris yang ada. Mereka tidak mengindahkan pemikiran yang nyata, yang dapat diobservasi melalui penelitian. Aristoteles pun sepertinya melakukan kesalahan yang sama. Sampai pada zaman Renaissance ajaran Aristoteles dianggap benar dan relevan. Hal ini mengakibatkan derajat ilmu kembali pada lubang kesalahan yang nisbi.

Pada abad ke-17, Francis Bacon melakukan pembe-rontakan dari cara berfikir tersebut. Ia berpendapat bahwa para ilmuwan akan setuju pada suatu kesimpulan setelah melakukan tendensi satu dengan yang lain. Yang dimaksud

dengan tendensi disini, ketika para ilmuwan menyampaikan argumennya dan melalui perdebatan maka kesimpulan itu akan diambil dari hal-hal yang utama, tidak dipungkiri lagi hal-hal yang sebenarnya benar akan terabaikan. Sehingga logika saja tidak cukup untuk mengambil sebuah kesimpulan ilmu. Hal ini karena logika merupakan teori ataupun anggapan yang sudah jadi, sehingga terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang real.

Sumbangan Bacon ini kepada kemajuan ilmu adalah penting yakni sebagai perintis yang menembus kubu pemikiran deduktif yang penggunaannya secara berlebihan menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan (Jujun S. Sumantri, 2009:89). Bacon menolak logika, pengalaman dan kewenangan para ahli untuk membuktikan kebenaran karena keduanya itu hanya dijadikan dalam hipotesis. Kebenaran ada dari bukti yang empiris sebagai bahan ujinya. Metode Bacon ini dinamakan dengan metode induktif yang berlawanan dengan metode deduktif oleh Aristoteles. Namun metode ini tidak efektif dan memboroskan waktu.

Metode deduktif dari Aristoteles yang berdasar teori dan metode induktif dari Bacon ini kemudian diganti oleh Charles Darwin dengan metode Deduktif-Induktif. Penggabungan metode ini berawal dari seorang penyelidik mempergunakan metode induktif dalam menghubungkan antara pengamatan dan hipotesis. Hipotesis tersebut secara deduktif dihubungkan dengan pengetahuan yang ada untuk melihat keserasiannya. Kemudian hipotesis tersebut diuji melalui data yang diperoleh secara empiris. Seorang ilmuwan disamping menggunakan metode induktif, ia juga harus memperpadukan secara deduktif teori yang telah ada untuk menguji hipotesisnya. Kedua metode itu memperkuat dalam hal penelitian yang tepat.

Apakah sebenarnya ilmu itu? Apa ciri hakiki yang membedakan ilmu dengan pengetahuan? Apa kegunaan ilmu

yang sebesar-besarnya? pertanyaan ini akan timbul untuk mengkaji filosofi ilmu. Ciri-ciri ilmu, yaitu (Supardi, 2011: 9-10).

- a. **Mempunyai objek**
Dalam memperoleh pengetahuan yang ilmiah tentulah terdapat obyek yang akan dikaji maupun diamati. Objek dalam ilmu merupakan bagian yang dikaji oleh ilmu tersebut. Kebenaran suatu ilmu pengetahuan adalah ketika sesuai dengan obyek yang dikajinya. Kebetulan dalam hal ini tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu perlu metode yang digunakan. Dalam ilmu sosial objek yang dikaji adalah masyarakat beserta interaksinya.
- b. **Mempunyai Metode**
Metode merupakan cara sistematis untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Bermetode merupakan cara untuk memperoleh kebenaran yang faktawi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- c. **Universal**
Kebenaran yang ingin dicapai dalam ilmu sosial ialah kebenaran yang universal yang bersifat umum
- d. **Mempunyai sistem**
Ada hubungan satu sama lain antar komponennya.

Pengetahuan haruslah mencakup seluruh objek dengan aspek-aspeknya maupun aspek lain.

Ilmu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Disini berarti ilmu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan sebagai mesin penghancur umat. Ilmu merupakan alat bagi manusia untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan, bukan manusia yang dijadikan alat oleh ilmu. Dengan ilmu seharusnya terciptanya kemudahan dan kebahagiaan hidup. Manusia tidak boleh tamak oleh ilmu. Bila ilmu menguasai manusia maka manusia dapat membabi buta untuk memperoleh ilmu

tanpa memperhatikan kaidah yang ada. Misalnya euthanasia ataupun perkawinan antara manusia dan hewan. Menurut ilmu hal itu benar dan sah. Tetapi pada penalaran hakikat ilmu hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan kodrat dan nilai-nilai moral serta keagamaan.

Ilmu menjelajahi alam kehidupan manusia sebatas pengalaman nyata yang diperoleh. Ilmu tidak untuk mempelajari hakikat Tuhan, surga dan neraka di luar jangkauan manusia. Disini bukan berarti ilmu tidak lepas dari ilmu lain ataupun moral agama. Ilmu tanpa moral agama terasa buta (Einstein).

B. KATA EMPIRIS

Pada awalnya manusia sangat percaya pada animisme dan dinamisme. Mereka yakin akan adanya mitos-mitos gaib. Hujan dan kemakmuran merupakan kekuasaan dan keinginan para roh dan dewa. Ketika dewa-dewa itu mungkar, maka kehidupan dunia akan sengsara. Oleh karena itu masyarakatnya percaya akan adanya persembahan untuk para dewa-dewa tersebut.

Hingga lambat laun masyarakat sadar bahwa gejala-gejala alam itu timbul karena sebab akibat yang ada secara ilmiah. Walaupun perkembangan keadaan ini lambat, namun telah menjadi awal dari permulaan ilmu secara ilmiah dan sistematis. Hingga akhirnya perkiraan ini dilakukan secara observasi yang lebih kritis dan sistematis. Titik tolak ilmu ada pada pengalaman sebagai tahap permulaan. Pengalaman antar individu ini bermacam-macam sehingga harus direduksi untuk menyatukan pengalaman tersebut secara klasifikasi dan sistematis.

Klasifikasi digunakan untuk prosedur yang mendasar untuk mengubah data terpisah menjadi fungsional. Dengan pengklasifikasian ini, maka akan lebih mudah kita pahami

karakter masing-masing yang dibawanya. Klasifikasi ini dilakukan sesuai tujuan tertentu yang diambilnya. Dengan memasukan objek ataupun gejala-gejala yang ada ke dalam kelas-kelas tertentu akan lebih mudah untuk membedakan sifat-sifat yang diteliti.

Tahap pertama dalam perkembangan ilmu adalah dengan pengumpulun data dan pendeskripsian pengalaman, sehingga menuntut pengkuantifikasian observasi. Lewat pengklasifikasian maka akan terlihat hubungan fungsional antar aspek-aspek tertentu. Hal ini dapat di observasi secara berurutan. Dari observasi ini maka dapat ditarik sebuah kebenaran yang ada. Konsep ilmu dengan perkiraan kebenaran ini cukup untuk memenuhi tujuan kita.

C. ILMU TEORITIS

Tingkat akhir dari ilmu adalah ilmu teoritis. Segala yang ada dalam ilmu empiris diterangkan sebab-sebabnya untuk mengontrol dan mengkritisi kegiatan yang ingin dicapai. Ilmu empiris terbatas pada peramalan dan kontrol yang menjadi tujuan akhir dari ilmu. Pengetahuan empiris ini sangat terbatas. Ketika objek penelitian itu digunakan, tidak disangkalkan lagi objek itu tidak dapat digunakan kembali walaupun hal itu nampak nyata.

Ilmu teoritis memberikan janji yang lebih dari empiris yang hanya sekedar mengagungkan tujuan sebagai akhir dari ilmu. Ilmu teoritis ini menawarkan sebab akibat dan keterkaitan serta manfaat yang akan didapatkan dikemudian hari. Ilmu ini menjanjikan sebagai landasan penelitian dan penelaahan ilmu yang akan muncul di masa mendatang. Peralihan ilmu empiris ke ilmu teoritis bukanlah sesuatu yang mudah. Memang mudah ketika kita menemukan sesuatu yang terjadi tetapi sulit untuk menerangkan alasan hal tersebut

D. TEORI KEBENARAN, KESALAHAN DAN KEKELIRUAN

1. Ruang Lingkup Kebenaran

Kebenaran adalah kesesuaian antara yang dipikirkan dalam konsep dan atau yang dinyatakan dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Syarat-syarat yang menjadi tolak ukur kebenaran:

- a. Pernyataan itu dapat dikatakan benar kalau kita tahu arti pernyataan, maksudnya dapat dimengerti.
- b. Kita tahu bagaimana menguji kebenarannya.
- c. Mempunyai cukup bukti yang memadai untuk mempercayai dan menerimanya

Beberapa macam teori kebenaran antara lain:

1) Teori Kebenaran Korespondensi

Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan itu benar kalau isi pengetahuan yang terkandung dalam teori tersebut berkorespondensi sesuai dengan objek yang dirujuk oleh pernyataan tersebut. Teori kebenaran korespondensi umumnya mudah dimengerti karena secara intuitif mudah diterima. Teori ini cocok untuk dipakai menilai kebenaran pernyataan-pernyataan empiris faktual. Jadi, kebenaran dalam teori ini menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan materi yang dikandung oleh suatu pernyataan dengan objek yang dikenai pernyataan tersebut. Contoh: Indonesia adalah negara yang elok bak zamrud khatulistiwa.

2) Teori Kebenaran Koherensi

Teori ini berakar pada dua hal bahwa matematika dan logika adalah sistem deduktif yang ciri hakikinya adalah eksistensi; Sistem metafisika rasionalistik yang seringkali mengambil inspirasi dari matematika. Pernyataan itu benar jika

konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Teori ini hanya mengemukakan kebenaran formal, sehingga lingkungannya sebenarnya terbatas.

Teori ini mendasarkan diri pada konsistensi suatu argumentasi. apabila ada konsistensi dalam alur berpikir, maka kesimpulan yang diambil adalah benar. Sebaliknya bila argument yang ada tidak konsisten, maka kesimpulan yang diambil adalah salah. Secara keseluruhan argumen yang bersifat konsisten tersebut juga harus bersifat koheren untuk dapat disebut benar (Saefuddin. 1993. 16)

3) Teori Kebenaran Pragmatis

Teori ini secara umum adalah pemahaman yang menekankan akal budi manusia sebagai sarana pemecahan masalah manusia dalam melaksanakan kehidupan manusia baik bersifat kritis maupun teoritis. Teori pragmatis dikatakan benar bila teori keilmuan mampu menjelaskan, menggambarkan, mengontrol dan menjawab suatu gejala. Pada intinya sesuatu dikatakan benar kalau bermanfaat memecahkan masalah manusia. Teori ini cocok untuk dipakai menilai kebenaran pernyataan-pernyataan ilmiah sebagai hipotesis yang perlu bukti. Teori koherensi dan teori pragmatis dapat dikatakan menggaris bawahi teori korespondensi.

4) Teori Kebenaran Sintaksis

Menurut teori suatu pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan-pernyataan itu mengikuti aturan-aturan sintaksis yang berlaku atau syarat yang berlaku.

5) Kebenaran Semantis

Menurut teori kebenaran ini suatu pernyataan memiliki kebenaran bila memiliki arti dan makna.

Teori ini menguak kesyahan proposisi dalam referensi. Arti di sini menunjukkan dengan jelas ciri khas dari sesuatu yang ada.

6) Teori Kebenaran Non-Deskripsi

Teori ini menyatakan bahwa pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan ini memiliki fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari.

7) Kebenaran Logik-yang-berlebihan

Menurut teori adalah problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan dapat mengakibatkan pemborosan, karena pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama.

2. Sifat Kebenaran Ilmiah

Kebenaran ilmiah ada dari hasil penelitian ilmiah, suatu kebenaran tidak akan muncul tanpa adanya prosedur-prosedur yang dilalui. Prosedur itu melalui tahap-tahap metode ilmiah yang berbentuk teori. Kebenaran dalam ilmu tidaklah subyektif, tetapi objektif yang berarti bahwa kebenaran teori ataupun sebuah paradigma harus didukung fakta-fakta dan kenyataan yang objektif. Kebenaran ini benar-benar tidak terpengaruh oleh subjek seseorang saja. Oleh karena itu kebenaran bersifat umum atau universal sejauh masih dapat dipertahankan.

Kebenaran ilmiah memiliki struktur yang diskursif atau rasional, empiris dan sekuler. Sedangkan Rishi mengemukakan kebenaran pada pokoknya bersifat mistik, absolut dan transendental. Kebenaran ilmiah merupakan suatu bentuk yang muncul tiba-tiba dari jenis tertentu yang ada pada manusia dan tidak dapat ditangkap oleh orang yang berbeda pengalamannya. Teori ilmiah mempunyai bentuk

premis-konklusi, dengan teori ilmiah itu bersifat rasional sehingga setiap orang dapat berfikir jernih dan mampu untuk menguasai bahasanya. Kebenaran ilmiah ini bersifat universal.

Pada dasarnya kebenaran dalam ilmu ada dua yaitu kebenaran korespondensi dan koherensi. Teori kebenaran korespondensi merujuk pada ilmu-ilmu alam, sedangkan kebenaran koherensi merujuk pada ilmu-ilmu sosial. Kebenaran ilmiah bersifat empiris, namun diantara konsep dan teori ilmu pengetahuan modern, terutama fisika menuntut lebih banyak imajinasi dari teori dan konsep agama lain. Seiring dengan perkembangan nalar manusia, imajinasi dapat dibebaskan dari belenggu rumusan-rumusan tradisional dan mengembangkan daya jangkau yang melampaui batas-batas imajinasi orang jaman dulu. Namun hal ini harus ada kontak relitas fisik sehingga ada pengalaman yang benar-benar bisa menentukan. Ketidakberhasilan kontak ini akan membuat kita terjerumus pada ketidaktahuan kita membedakan dengan hal yang fantasi. Sehingga tidak dapat dikatakan ilmiah.

Pada tahun 1561-1626 Francis Bacon mengemukakan sebuah metode yang dinamakan dengan Induksi Gaya Bacon. Metode ini dibagi menjadi dua bagian yaitu metode ilmiah dan metode teknologi tradisional. Menurutnya ada dua cara untuk menemukan kebenaran, yang pertama tidak hanya dengan panca indra atau secara empiris; yang kedua melalui metode induksi yaitu dengan bertitik tolak dari aksioma-aksioma melalui pengalaman khusus hingga secara bertahap dan terangkai tanpa putus berkembang ke aksioma-aksioma yang lebih umum.

Oleh karena itu metode kebenaran itu harus partikular, berurutan tanpa keterputusan serta orang-orang disekelilingnya harus mengesampingkan imajinasi mereka dengan mulai mengenali fakta-fakta yang ada. Metode Bacon

ini berpandangan bahwa seseorang harus mengesampingkan pengandaianya untuk menuju ke hipotesis-hipotesis dengan lebih memperhatikan fakta yang real.

3. Kesalahan dan Kekeliruan

Kekeliruan berbeda dengan kesalahan. Kekeliruan merupakan sesuatu yang menyangkut tindakan kognitif subyek penahu, sedangkan kesalahan merupakan hasil dari tindakan tersebut. Faktor yang menyebabkan kekeliruan antara lain: sikap terburu-buru dan kurang teliti dalam salah satu atau seluruh tahap yang diketahui, sikap takut salah yang keterlaluan ataupun sikap gegabah dalam melangkah, kerancuan dan kebingungan akibat emosi ataupun nafsu yang mengganggu yang membuat kurang terbuka pada bukti yang tersedia, prasangka dan bias-bias, keliru dalam penalaran ataupun melenceng dari kaidah logika.

E. ILMU PENGETAHUAN YANG BEBAS NILAI DAN TIDAK BEBAS NILAI

Mengenai ilmu yang tidak bebas nilai, Berger mencoba mengaitkan analisis ilmiah dengan kepekaan etis. Namun pada dasarnya Berger juga mendukung argumen mengenai ilmu yang bebas nilai sebatas pada analisis sosial, kecuali pada kebijakan politik. Mengapa kebijakan politik tidak bebas nilai? Hal ini karena kebijakan politik apabila diarahkan pada perubahan sosial dan perkembangan sosial pastinya menuju pada tujuan dan maksud yang akan dicapai. Maksud dan tujuan itu pastinya tidak mungkin kalau tidak terikat oleh suatu nilai yang menjadi pilihan etis. Pada dasarnya banyak ilmuan yang membantah ilmu bebas nilai. Hal ini karena banyak ilmuan sosial yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sosial dan analisisnya selalu mengandung nilai-

nilai tertentu yang mempengaruhinya sehingga mustahil kalau “bebas nilai”.

Pandangan dari Berger ini menyentuh ruang teori ilmu pengetahuan epistemology yang sangat mendasar dan kontroversi mengenai ilmu sosial yang bebas nilai yaitu dalam arti yang tidak terikat oleh nilai-nilai tertentu yang akan merujuk pada subjektivitas. Oleh karena itu ada perbedaan antara ilmu sosial yang ilmiah objeknya “bebas nilai”, dan kebijakan politik bersifat etis yang tidak bebas nilai.

Hingga ada ada perdebatan mengenai analisis ilmu sosial harus bebas nilai atau tidak bebas nilai yang terdapat dalam perdebatan yang sangat terkenal “Pertenggaran Positivisme dan Sosiologi Jerman”. Hal ini terjadi antara aliran “Kristicher Raturalismus” yang condong neopositivis dengan Karl R. Popper sebagai pelopornya, dan aliran “Kristicher Theori “ yang disebut-sebut neo marxistis dengan Theodor W. Adorno sebagai pelopornya serta mazhab Frankfurt di lain pihak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti apa yang dikemukakan Weber, perlu dibedakan antara fakta yang objektif dan penilaian subjektif. Hal ini perlu diperjuangkan agar para ilmuwan tidak terikat dengan nilai-nilai subjektivitasnya sehingga ilmu pengetahuan menjadi tidak ilmiah. Tidak dapat disangkalkan lagi ilmu itu terjerat dalam kebenaran pendiriannya.

Peter L. Berger dalam konteks objektivitas lebih menamainya dengan istilah mitos. Mitos merupakan keyakinan semua yang tak perlu dipertanyakan. Karena tidak mengelak kenyataan dan tidak menggunakan dengan akal budi. Ide pertumbuhan dalam ideologi kapitalisme dan ide evolusioner dalam ideologi sosialisme dinamakan mitos. Kedua ideologi ini seolah olah meramalkan kebaikan dan kecerahan hidup yang sesungguhnya berdampak negatif bagi manusia saat ini.

Terdapat pula pandangan dari Myrdal mengenai objektivitas dalam ilmu-ilmu sosial tetap terdapat premis-premis nilai yang terbuka bersifat umum dan dikupas secara ilmiah dan kritis. Sikap yang beranggapan bahwa ilmu-ilmu sosial itu bebas nilai sebenarnya tidak tepat, karena akan ada subjektifitas menurut keinginan dan pendiriannya yang dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ilmiah tak jarang dari ilmuwannya selalu ada pengaruh dari riwayat hidup, kultur dan lingkungan sosial. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kepentingan politik, nepotisme, materi dan juga subjektifitas masing-masing individu. Pendekatan ilmiah dan metode penelitiannya pun tak pernah bisa untuk benar-benar “bebas nilai” seutuhnya.

Bab IV

HUBUNGAN FILSAFAT DENGAN ILMU PENGETAHUAN, AGAMA, ETIKA DAN SEJARAH

A. FILSAFAT DAN ILMU PENGETAHUAN

Pada abad ke 17 muncul ilmu pengetahuan alam, maka mulailah terjadi perpisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebelum abad ke 17 tersebut ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Peursen yang mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Menurut Jujun S. Sumantri mengenai masalah dari ilmu pengetahuan, bagaimana cara mendapatkannya dan nilai guna yang ada dapat ditinjau dari filsafat. Jadi filsafat menjadi induk ilmu pengetahuan.

Filsafat itu sendiri sebagai induk dari ilmu pengetahuan menggambarkan bagaimana “pohon ilmu pengetahuan” telah bercabang tumbuh dan berkembang dengan baik. Masing-masing cabang melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri-sendiri sehingga setiap cabang mempunyai buah sendiri-sendiri juga. Dengan demikian, ilmu pengetahuan berkembang dengan baik ke arah bidang-bidang tertentu selain filsafat, dan akhirnya memunculkan pula sub-sub ilmu pengetahuan baru bahkan kearah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi seperti spesialisasi-spesialisasi.

Untuk mengatasi pertentangan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, dibutuhkan bidang ilmu yang dapat menjembatani serta mewedahi perbedaan yang muncul. Bidang filsafatlah yang mampu mengatasi hal tersebut. Disamping itu, karena manusia pada hakikatnya selalu bertannya dan bertanya, maka filsafatlah yang mampu menjawab semua permasalahan yang ada. Faktor keheranan, kesangsian dan kesadaran akan keterbatasan manusia barulah timbul setelah pengamatan atau observasi lebih dahulu. Filsafat dewasa ini tidak dapat berkembang dengan baik apabila terpisah dari ilmu. Ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan.

Ada perbedaan antara ilmu dan filsafat, antara lain yaitu:

Ilmu

1. Diperoleh dari Riset, pengalaman, dan percobaan
2. Rumusan-rumusannya pasti
3. Obyek penelitian terbatas
4. Kebenarannya nisbi
5. Bertugas untuk memberikan jawaban

Filsafat

1. Berasal dari perenungan dari ratio secara mendalam, universal dan menyeluruh
2. Mencoba memberikan jawaban dan argumen atas pertanyaan.
3. Memandang segala sesuatu secara umum
4. Kebenarannya positif dan nisbi (relatif)
5. Mengintegrasikan ilmu-ilmu

Filsafat adalah induk ilmu Pengetahuan dan Teknologi, filsafat tidak memperlihatkan banyak kemajuan dalam bidang penyelidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi banyak berkembang ke IPA dengan adanya penciptaan

bom dan nuklir. Di satu pihak fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berutang dan ketergantungan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, berupa penciptaan sarana dan prasarana yang memudahkan pemenuhan kebutuhan manusia untuk hidup sesuai dengan kodratnya. Inilah dampak positifnya disatu pihak sedangkan dampak negatifnya teramat sangat membuat kekhawatiran dan kehancuran.

B. FILSAFAT DAN AGAMA

Sejarah membuktikan ilmu pengetahuan sudah mulai menonjol sejak zaman Yunani. Bangsa Yunani ditakdirkan Allah sebagai manusia yang mempunyai akal jernih dan cerdas. Bagi mereka ilmu itu adalah suatu keterangan rasional tentang sebab-musabab dari segala sesuatu didunia ini. Dunia adalah kosmos yang teratur dengan aturan kausalitas yang bersifat rasional. Demikianlah tiga dasar yang menguasai ilmu orang Yunani pada waktu itu, yaitu: Kosmos, Kausalitas dan Rasional.

Cara berfikir inilah yang menjadi revolusi besar dalam dunia ilmu pengetahuan, karena sebelum itu manusia lebih banyak berpikir menurut angan-angan dan mitos. Dengan berilmu dan berfilsafat manusia ingin mencari hakikat kebenaran daripada segala sesuatu. Tidak disangsikan lagi, manusia merupakan mahluk yang selalu ingin bertanya untuk mendapat sebuah kebenaran mutlak. Dalam mencari pengetahuan dan kebenaran itu manusia pada akhirnya tiba pada kebenaran yang absolut atau yang mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia ingin mengetahui segala hal, asal mula dan tujuannya, perihal kebebasannya, tujuan, hakikat hidup, dan kemungkinan-kemungkinannya. Dengan sikap yang demikian itu manusia sudah menghasilkan pengetahuan

yang luas sekali yang secara sistematis dan metodis telah dikelompokkan kedalam berbagai disiplin keilmuan.

Ketidakmampuan ilmu pengetahuan dalam menjawab sejumlah pertanyaan itu, maka filsafat tempat untuk memberi penjelasan dan argumennya. filsafat adalah ilmu yang tanpa batas, tidak hanya menyelidiki salah satu bagian dari kenyataan saja, tetapi segala aspek yang akan menjawab seluruh pertanyaan manusia. "*Ilmu tanpa (bimbingan moral) agama adalah buta*", demikian kata tokoh Einstein.

C. FILSAFAT, ILMU, DAN AGAMA

Filsafat Yunani sangat bersifat deduktif, yang lebih mendasarkan pada pemikiran spekulatif. Oleh karena itu agama sangat diperlukan yang ada dalam Al-Quran sebagai pendukung fakta empiris (Armahedi Mahzar, 2004:210). Manusia dapat menguraikan dari semua materi, baik materi yang dapat diamati, maupun yang dapat diketahui. Apabila manusia berpikir tentang keseluruhan realitas tentang kehidupan (asal mula, hakikat dan tujuannya), maka ia akan kembali pada pemikiran filsafatnya. Menurut Aristoteles baik bidang metafisika, bidang matematika maupun bidang fisika, masih merupakan kesatuan yang keseluruhannya disebut 'filsafat' atau metafisika.

Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Batas penjelajahan ilmu sempit sekali, sehingga untuk mendalaminya perlu falsafah keilmuan. Demikian pula tentang baik buruk, semua itu (termasuk ilmu) berpaling kepada sumber-sumber moral (filsafat Etika), tentang indah dan jelek (termasuk ilmu) semuanya berpaling kepada pengkajian filsafat Estetika. Kebutaan moral dari ilmu itu mungkin membawa kemanusiaan ke jurang malapetaka.

Kenisbian ilmu pengetahuan bermuara kepada filsafat

dan relativitas atau kenisbian ilmu pengetahuan serta filsafat bermuara kepada agama. Filsafat merupakan ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan karena masalah-masalah itu berada di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk dapat memahami dan mendalami secara mendalam dan menyeluruh daripada segala sesuatu yang ada mengenai :

- a. Hakikat Tuhan
- b. Hakikat alam semesta
- c. Hakikat manusia

Bahkan ilmu pengetahuan saat ini telah menguasai alam. Kemajuan ilmu teknologi bukan lagi meningkatkan martabat manusia itu, tetapi bahkan harus dibayar dengan kebahagiaannya dan dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Berbagai polusi dan kehancuran peradaban manusia disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Oleh karena itulah perlu ada pembatasan dari perkembangan ilmu secara moral. Perkembangan ilmu yang tidak sesuai moral ini dapat dibatasi dengan adanya norma agama. Dimana agama sangat berpengaruh agar ilmu yang ada tidak sekuler, sehingga tidak melewati batas.

Ilmu pengetahuan, filsafat dan agama sama-sama merupakan sumber dari kebenaran. Dalam mencari kebenaran ketiganya sama-sama mengolah, mempunyai metode, dan sistem yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi secara intrinsik tidak ada pertentangan antara ilmu dan agama. Ilmu merupakan pengembangan dari filsafat.

Adapun perbedaan filsafat, ilmu dan agama antara lain sebagai berikut:

- a. Ilmu dan filsafat adalah hasil dari sumber yang sama

yaitu : ra'yu (akal, budi, *ratio*, *reason*, *nous*, *rede*, *ver nunft*) manusia. Sedangkan agama bersumber dari Wahyu Allah.

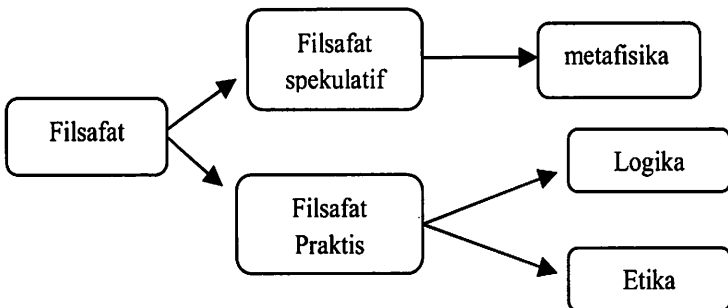
- b. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan penyelidikan, pengalaman (empiri) dan percobaan (eksperimen). Filsafat mencari kebenaran dengan cara mengekspresikan akal budi secara radikal (mendalam), dan integral (menyeluruh) serta universal, tidak merasa terikat oleh ikatan apapun, kecuali 'logika' Manusia dalam mencari dan menemukan kebenaran dalam agama dengan jalan mempertanyakan pelbagai masalah bersumber dari kitab Allah yang dikodifikasikan dan Firman Allah.
- c. Kebenaran ilmu pengetahuan ialah kebenaran positif, Kebenaran ilmu pengetahuan dan filsafat keduanya nisbi (relatif). Sedangkan kebenaran filsafat ialah kebenaran spekulatif (dugaan yang tak dapat dibuktikan secara empiri, riset, eksperimen, yang tidak dapat diinderawi). Sedangkan agama kebenarannya mutlak karena dari Zat Yang Maha Benar.
- d. Dalam filsafat tujuannya adalah kecintaan pada pengetahuan yang menghasilkan kedamaian, kebahagiaan dan kepuasan jiwa sepenuhnya. Sedangkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, tujuannya untuk peningkatan taraf hidup manusia khususnya bidang ekonomi dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Lain pula halnya dengan agama yang bertujuan untuk menemukan arti hidup sebenarnya dengan kedamaian, kelarasan dan ketentraman.

Dengan demikian terungkaplah bahwa manusia adalah mahluk pencari kebenaran. Di dalam mencari, menghampiri dan menemukan kebenaran itu terdapat tiga buah jalan yang ditempuh manusia yang sekaligus merupakan institut kebenaran yaitu : ilmu, filsafat dan agama.

D. FILSAFAT, ILMU DAN ETIKA

Etika merupakan bagian filsafat normatif tentang perilaku manusia, mengenai benar atau salah, maupun yang baik bagi manusia yang dapat dimengerti akal. Menurut faham Yunani bentuk tertinggi ilmu adalah kebijaksanaan. Bersama itu terlihat suatu sikap etika (Jujun S. Sumantri, 2009: 233). Kebijaksanaan politik ini menjadi pedoman bagi jalannya kehidupan negara. Ilmu tidak dapat merubah apa-apa.

gambar 3
Diagram kedudukan Etika sebagai bagian dari filsafat



Filsafat merupakan ibu ilmu pengetahuan yang menerangkan segala sesuatu secara mendalam. Etika merupakan filsafat Praktis, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Etika juga disebut sebagai filsafat moral, karena merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran-ajaran moral. Jadi ada ciri pemikiran filsafat, yaitu:

1. Rasional : berdasarkan pada akal, atau ratio manusia, bukan berangkat dari mitos.

2. Radikal : Pemikiran filsafat itu dilakukan secara mendalam sampai pada akar masalah-masalahnya.
3. Kritis : pemikiran filsafat tidak puas hanya pada dasar-dasarnya dan dangkal.
4. Sistematis : Dalam penelitian dilakukan dengan metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penelitian.
5. Normatif : Tidak terpaku pada pelaporan pandangan moral tapi juga pada penyelidikannya.

Oleh karena itu etika secara tidak langsung dapat diakui sebagai buah dari filsafat yang melalui pemikiran rasional, mendalam, kritis, sistematis serta normatif. Hasil riset ilmiah dapat dipakai untuk menindas, bukan untuk menguntungkan rakyat (Kenneth R. Hoover, 1990:108). Ilmu memang memenuhi sarana kebutuhan manusia saat ini. Tetapi tanpa dielakkan lagi, ilmu pengetahuan juga dapat menyengsarakan manusia. Oleh karena itu perlu adanya moralitas ilmu. Dimana ilmu diterapkan manusia dengan batasan moral agar ilmu ada tidak untuk membantai kehidupan manusia. Agar ilmu tetap pada etika keilmuan yang tidak banyak merugikan manusia dan tetap ilmiah. Tidak untuk menjadi penghancur bagi pilar-pilar sebuah bangunan yang kokoh.

Pada dasarnya nilai guna ilmu terletak pada penggunaannya. Ilmu mengabdikan pada masyarakat, sehingga ilmu bukan merupakan tujuan tapi sarana untuk sebuah kemajuan. Banyak orang yang mengatakan bahwa ilmu mengejar kebenaran dan kebenaran itu merupakan inti etika ilmu, tetapi perlu diingat bahwa sebenarnya kebenaran itu ditentukan oleh derajat penerapan praktis oleh ilmu. Menurut Karl Jaspers, ilmu adalah usaha manusia untuk mendengar jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang dihuninya. Disinilah bukti hubungan ilmu dan etika (Jujun S. Sumantri, 2009: 234-244).

E. FILSAFAT, SEJARAH DAN AGAMA

1. Sejarah dan filsafat

Di lihat dari bentuknya sejarah itu merupakan silih bergantinya perputaran kekuasaan. Sedangkan dilihat dari isi atau muatan di dalamnya sejarah adalah sebuah penalaran kritis, cerdas dan cermat untuk mencari kebenaran tentang asal usul sesuatu, proses bagaimana kejadian atau peristiwa itu berlangsung dan terjadi. Sejarah dipandang menjadi bagian dari filsafat. Sejarah mempunyai posisi kedua setelah filsafat khususnya filsafat politik tetapi di atas ilmu sosial lainnya. Sejarah merupakan penghubung masa kini dan masa lalu yang bisa memberi gambaran dan pelajaran di masa depan. Namun dalam mengambil sebuah kebijakan harus disesuaikan dengan zamannya. Sejarah dapat memberi pertimbangan terhadap hal tersebut.

Sejarah sangat perlu dengan unsur logika yaitu filsafat yang mengkondisikan sejarah. Filsafat juga memerlukan unsur intuitif yaitu sejarah yang mengkondisikan filsafat. Jadi ilmu yang kaya akan sumber harus dirangkaikan dengan logika, karena semua masalah sejarah tidak mungkin dipahami tanpa merujuk rancangan filsafat. Filsafat pun tidak bisa dipecahkan tanpa adanya fakta. Seorang sejarawan harus filosofi, seorang filosof harus berakar kuat pada sejarah. Filsafat akan memberikan kekuatan penalaran yang tidak mudah digoyahkan. Sejarah dapat dijadikan cermin untuk sebah kematangan.

2. Sejarah dan Agama

Masyarakat yang tidak peduli dengan kehidupan moral dan keagamaan berarti tidak peduli dengan masa depannya. Sejarah adalah jalan menuju iman. Agama pada tingkat yang

murni dan agung memberi penawaran keamanan ontologis dan sebuah fondasi spiritual yang kokoh kepada sejarah dan filsafat. Dengan sejarah dan filsafat di atas pilar religius akan mampu memberikan dimensi baru dalam dunia dan peradaban, yang tidak mungkin terwujud dengan pandangan peradaban sekuler.

Bab V

FILSAFAT DAN METODOLOGI PENELITIAN

Pemahaman mengenai metode penelitian menuntut agar kita perlu mengetahui akar filsafat dari sebuah metodologi penelitian. Pemilihan serta penggunaan metode harus didasarkan pada suatu argumen yang benar agar memberi kegunaan dari suatu metode tertentu. Jika metode ini diambil dari pemikiran filsafat yang benar dan tepat maka akan membantu peneliti menggunakan metode tersebut.

Dari sisi pemikiran filsafat ilmu metodologi penelitian dapat dipahami melalui dua pendekatan yaitu pendekatan positivitis kuantitatif dan pendekatan fenomenologi kualitatif. Pendekatan positivitis kuantitatif merupakan explanasi yang menjelaskan fakta fenomena dan memahami pola yang berulang. Pola itu meliputi 5W dan 1H, contohnya: Menjelaskan mengapa terjadi pemberontakan Revolusi Cina, Amerika Latin, revolusi Perancis. Sedangkan pendekatan kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Pada penelitian kualitatif teori dibatasi pada pengertian. Bodgan dan Biklen dalam hal ini lebih memilih istilah paradigma. Paradigma merupakan kesepakatan masyarakat ilmiah tentang kesepakatan ilmu, metodologi, pendekatan, aksioma, objek formalnya yang mengarahkan cara berfikir dan cara penelitian. Penelitian mengenal dua kecenderungan yaitu yang merujuk pada filsafat positivisme dan filsafat fenomenologi. Pendekatan kualitatif ini yang dipakai hingga sekarang dengan metode fenomenologi. (Sumber Rujukan, th, Hl)

A. FILSAFAT ILMU POSITIVISME DAN FENOMENOLOGI

Filsafat Ilmu Positivisme

Dalam filsafat Positivisme, berasumsi bahwa yang nyata dan yang benar adalah yang dapat dibuktikan secara empiris, dapat dirasakan oleh indera serta dapat diobservasi. Jadi kebenaran ilmu pengetahuan adalah pernyataan yang didukung oleh teori-teori empiris. Dalam positivisme hanya yang inderawi yang dapat diterima sebagai fakta. Empiris di sini masih merupakan sesuatu yang masih murni.

Aristoteles sebagai tokoh positivisme menyatakan bahwa prinsip-prinsip kebenaran ada dalam kerangka kualitas-kualitas yang dapat dideteksi dengan panca indera. Yang dapat dideteksi tersebut dapat berupa panas atau dingin, kasar atau halus, basah atau kering. Yang nyata juga berupa serangkaian sebab seperti materi, pelaku, tujuan, dalam tatanan yang semakin menaik berdasarkan analogi karya ahli (*craftwork*) dengan prinsip "seni meniru alam" (Jerome R. Raverts, 2009: 12).

Pengetahuan yang asli itu yang berasal dari sesuatu yang dapat kita rasakan, lihat, sentuh dan berbau. Filsafat ilmu positivisme menggunakan metodologi analitik dalam pengembangan ilmu dengan mencari unit terkecil yang diambil dari fakta inderawi yang bersifat subjektif. Dalam filsafat positivisme ini, sesuatu yang hanya dalam bayangan ide bukanlah kebenaran. Positivisme tidak mengenal hal-hal di balik sesuatu yang nyata. Sesuatu yang ada di balik kenyataan hanyalah bayang-bayang inderawi yang tidak dapat dikuatkan sebagai suatu pengetahuan maupun kebenaran.

Filsafat Ilmu Fenomenologi

Pemikiran dari Edmund Husserl mengenai teori kebenaran fenomenologi, menjadi lawan dari filsafat ilmu positivisme yang menguasai dunia ilmu. Filsafat ilmu positivisme menggunakan metodologi analitik dalam pengembangan ilmu dengan mencari unit terkecil yang diambil dari fakta indrawi yang bersifat objektif. Pada era positivisme induktif ilmu sosial kehilangan keasliannya, karena filsafat ilmu digunakan di bidang eksak. Hingga pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 ilmu sosial mulai diperhatikan.

Pada masa 19-20 ini, fondasi-fondasi sosial kelembagaan mengalami kematangan ilmu. Bersamaan dengan itu muncul kesusasteraan dan seni yang menjadi penting. Namun ilmu sosial memiliki kelemahan karena dalam hal penggarapan analitiknya dan dipisahkan antara subjek dan objek penelitian, terhapusnya anggapan manusia sebagai subjek atas objeknya hingga terhilangnya orientasi humanisme ilmu sosial dan humaniora. Filsafat ilmu fenomenologi induktif mempunyai beberapa varian, yaitu Model Interpretatif Geertz, Model *Grounded Research*.

Kualitatif Interpretatif

Penelitian Kualitatif Interpretatif ingin menemukan sosok kualitatifnya. Menurut Prof. Dr. Noeng Muhadjir penelitian kualitatif interpretatif mengemukakan enam macam model yaitu model interaksi Geertz, model *grounded research* dari Glasser dan Strauss, model etnometodologi dari Bogdan, model *paradigma naturalistic* dari Guba dan Lincoln, model interaksi dari Blumer dan konstruktivis Godman.

a. Interaksi Geertz

Model interaksi geertz mencari makna dibalik data empirik sosial. Geertz melalui karyanya yang terkenal

“Religion of Java” menganalisis masyarakat Jawa menjadi tiga klasifikasi yakni Abangan Santri dan Priyayi. Ritual Abangan mempunyai kebiasaan selalu mendoakan orang mati dengan kenduri, mempunyai kebiasaan tidak sembahyang, serta main dan minum. Kaum abangan cenderung memilih partai nasionalis. Sedangkan Santri cenderung taat beribadah, di samping berdoa ia juga menjalankan sembahyang. Kaum Santri cenderung pada partai Islam dan Nasionalis seperti Masyumi dan NU. Kaum Priyayi selalu cenderung terfokus dari keturunan, pekerjaan dan tempat tinggalnya serta memilih partai Nasionalis.

Walaupun model Geertz banyak mendapat kritikan, namun model yang ditawarkan Geertz ini banyak dipakai oleh ilmuwan sosial yang ada sesudahnya. Dari itulah model ini menjadi inspirasi bagi ilmuwan selanjutnya untuk mengembangkan model lain yang sesuai dengan dinamika masyarakat. Uniknya lagi penelitian dari model ini dilakukan di Mojokuto. Hampir seluruhnya berhasil menggunakan metode ini.

b. Model *Grounded Research*

Model ini memberi sumbangan operasionalisasi kualitatif, khususnya dalam upaya mencari dan merumuskan teori berdasarkan data nyata. Walaupun pada akhirnya akan menjurus pada kerangka kualitatif yang mencari skala umum melalui pembuktian empirik.

c. Model Ethnometodologi Bogda

Model ini merujuk pada pengembangan konsep berfikir kualitatif, tetapi pemikirannya masih bersifat kuantitatif.

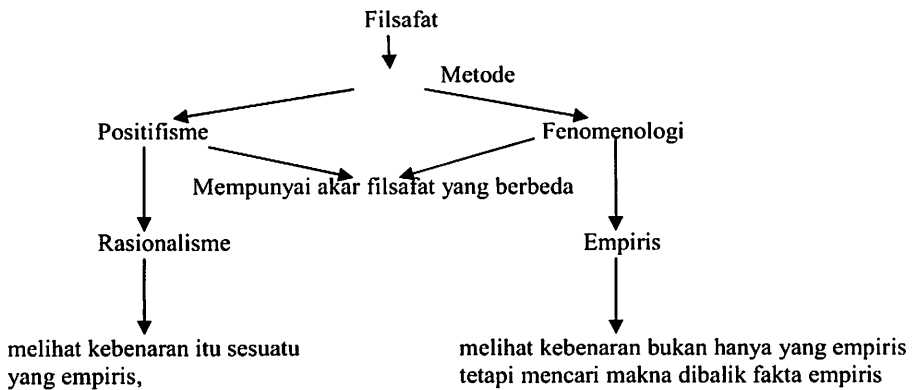
d. Model paradigma naturalistic Guba dan Lincon

Menurut Prof. Neng Muhadjir, hampir sepenuhnya berhasil menggunakan metode pertama (interpretatif Geertz) dan model kedua (*Grounded Research*) yang cocok kualitatif dan layak serta representative untuk

- mewakili metode kualitatif.
- e. Model interaksi simbolik dari Brumer.
Model ini lebih dekat pada pemikiran kuantitatif-statistik-positivistik, dalam membangun konsep.
 - f. Model konstruktivist Goodman
Model ini mengembangkan fenomenologik-intrepretatif yang ideografik menjadi *system interpretation* yang mempunyai *frames of interpretation*.

B. METODE PENELITIAN DALAM FILSAFAT

gambar 4



Metodologi Penelitian

1. Metode Positivisme

Pemikiran Rasionalisme yang dipelopori oleh Rene Descartes pada tahun 1596-1650 menjadi akar dari metode positivisme. Rasionalisme bersumber dari dari pengetahuan

yang dapat dipercaya yaitu akal atau rasio. Pengalaman nyata hanya berfungsi meneguhkan pengetahuan yang diperoleh dari akal. Akal dapat menurunkan bagi dirinya sendiri karena akal juga tidak memerlukan pengalaman indrawi. Sedangkan yang indrawi harus disikapi secara ragu-ragu karena menyesatkan, tidak pasti, dan berubah-ubah.

Dari pemikiran rasionalisme tersebut muncul metode positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte tahun 1798-1857 atau sekitar abad ke-19. Positivisme menolak metafisik dan teologi. Kebenaran dalam pandangan positivisme dikatakan benar apabila nyata, tidak abstrak, dapat diukur, dapat dilihat dan didukung fakta sehingga bermanfaat dapat diarahkan untuk mencapai kemajuan. Metode ini menuju generalisasi fakta-fakta dengan bersandar pada pengetahuan nyata pandangan-pandangan ilmiah. Positivisme kuantitatif menguji kebenaran bukti empirik. Empirik bagi positivisme adalah fakta yang ditangkap sebagai mana oleh indra. Dalam positivisme hanya yang indrawi yang dapat diterima sebagai fakta. Empiri di sini masih merupakan sesuatu yang masih murni.

Sebagai lawan dari fenomenologi yang mengakui hukum-hukum subjektif, positivisme membatasi diri pada hukum-hukum objektif yang menekankan pada prinsip objektif dan reduksionistik. Kalau filosofinya menggunakan positivisme, maka pendekatannya tidak bisa menggunakan fenomenologi. Fenomenologi tidak menerima bahwa kebenaran adalah hanya terlihat suatu yang empiris, sehingga tidak bisa dipakai dalam metode positivisme. Namun metode positivisme mempunyai kelemahan, pendekatan ini biasanya menggunakan angket. Sehingga kadang data yang diperoleh tidak valid atau dibuat-buat, karena objek yang diteliti mengetahui bahwa ia diteliti.

Lima asumsi dasar teori positivisme, yaitu:

1. Logika-Empirisme
Suatu pernyataan hanya benar jika dapat dibuktikan dengan inderawi dan fakta yang mendukung. Jadi sebuah konsep kebenaran jika bisa dibuktikan secara pengamalan empiris yang mendukung.
2. Realitas-Objektif
Hanya ada satu kenyataan, yaitu realitas yang diketahui dari pengalaman. Kenyataan yang realita bisa berbeda dengan yang ada pada pikiran atau pengetahuan kita.
3. Reduksionisme
Menegaskan bahwa subjek dapat memecah-mecah objek penelitian menjadi satu-satuan kecil. Contoh: Cinta, benci itu karena kelenjar yang dimiliki manusia; dari populasi menjadi sampel. Subjek dapat mengeneralisasikan pada dunia yang lebih besar. Segala masalah besar dapat disederhakan menjadi masalah yang kecil yang tidak kompleks.
4. Determinisme
Determinisme menegaskan bahwa keteraturan dunia dimungkinkan karena adanya hukum sebab akibat yang bersifat linear. Relasi fakta satu dengan fakta lainnya dideskripsikan dalam sebab dan akibat, *causal relation*. Dengan struktur "jika... , maka...". Sebab dan akibat ini hanya ada di dunia yang nyata. Namun dalam perilaku manusia tidak dapat berlaku determinis. Dengan determinisme ini maka dapat meramalkan fenomena alam yang ada.
5. Bebas nilai (*Free Values*)
Posisi subjek peneliti dan objek yang diteliti terpisah, sehingga peneliti ilmiah harus bebas nilai agar tidak bersifat subjektif. *Free values* merupakan kritik pendekatan positivisme. Ada keterputusan bahasan dengan kehidupan.
Data penelitian seringkali menjadi sebuah permulaan

semu dan terartikulasi tidak sempurna. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan hal ini maka diperlukannya interpretasi untuk membandingkan interpretasi partikular. Pendekatan interpretatif berpandangan bahwa manusia yang menafsirkan dirinya.

2. Metode Fenomenologis

Pemikiran empiris yang dipelopori oleh Francis Bacon pada tahun 1561-1626 merupakan akar dari metode fenomenologi. Inti ajaran pemikiran empiris yaitu dunia merupakan suatu keseluruhan sebab akibat yang sumber pengetahuannya adalah kebenaran nyata. Perkembangan akal dalam pemikiran ini ditentukan oleh perkembangan pengalaman yang empiris karena akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri, namun pengetahuan datang ada dari rasio pasif sewaktu pertama kali pengetahuan didapatkan. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap rasionalisme yang tidak membawa kemajuan karena asas filsafatnya bersifat praktis. Pemikiran empiris menjadi awal digunakannya prosedur ilmiah dengan hakikat ilmu pengetahuan melalui pengamatan, percobaan, penyusunan fakta dan penarikan hukum-hukum umum.

Dari pemikiran empiris tersebut lahirlah metode fenomenologi yang dipelopori oleh Edmund Husserl pada tahun 1859-1938 yang muncul sekitar abad ke-20. Metode ini beranggapan bahwa setiap fenomena dapat dideskripsikan sesuatu yang empirik terkait kehidupan sehari-hari, menempatkan subjek terteliti sebagai subjek kritis menyertakan pengetahuan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Fenomenologi kadang digunakan sebagai perspektif filosofi dan sebagai pendekatan dalam metode kualitatif. Fenomenologi lebih menekankan pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi

dunia. Fenomenologi memiliki beberapa ciri utama yaitu :

1. Sebagai kritik dari positivisme, fenomenologi cenderung mempertentangkan dengan objektivisme dan positivisme.
2. Dalam fenomenologi memastikan kognisi yang menggambarkan secara jelas dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda seperti yang di kemukakan Husserl. Metode ini menghubungkan kesadaran dengan obyek dengan bersatunya subjek dan objek. Untuk menentukan hakekat harus dilakukan 3 reduksi, yaitu:
 - a. Reduksi Fenomenologis
Yang penting adalah apa yang di belakang penampakan, seperti sistem nilai, konsep, adat, agama.
 - b. Reduksi Eiditis
Mencari yang inti di antara tanda-tanda yang nampak.
 - c. Reduksi Transendental
Bergerak dari yang sensual ke yang logic kemudian transendental. Bergerak dari sensual locic ke transendental.
3. Fenomenologi cenderung percaya bukan hanya sesuatu benda yang ada di alam dan budaya seperti apa yang nampak.

Secara stimulus ada 3 hal, yaitu: eksternalisasi, objektifitas dan internalisasi yang melahirkan pemahaman tentang benda, fakta.

Realita sosial ini dibentuk oleh 3 macam, yaitu:

1. Subjektifitas
Contoh: ada info, memperoleh darimana
2. Internalitas/ Objektivitas

Contoh: Dari radio, koran, tv (ada pengaruh). Jika banyak orang yang percaya maka wacana tersebut akan bersifat obyektif dan merambat menjadi eksternalitas.

3. Eksternalitas

Eksternalitas yang tidak diklarifikasi akan menjadi sebuah kebenaran nyata.

Kriteria kebenaran menurut Husserl yang kemudian menjadi kebenaran perspektif fenomenologi, yaitu:

- Kebenaran empirik sensual
Kebenaran yang dapat ditangkap melalui alat indera manusia.
- Kebenaran empirik logik
Kebenaran yang tidak semata-mata dapat diindera, tetapi merupakan suatu hal yang rasional.
- Kebenaran empirik etik
Kebenaran secara logic tidak benar, namun secara etik itu benar. Contoh: Mencium tangan orang tua.
- Kebenaran empirik transendental
Tidak dapat dijangkau secara inderawi, biasanya dikaitkan dengan nilai-nilai sakral yang datang dari Tuhan.

C. METODE ILMIAH

Cara memperoleh dan menyusun pengetahuan yang benar ialah melalui metode ilmiah. Untuk memperoleh pengetahuan ilmiah maka perlu melalui prosedur yang ilmiah pula agar memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah ataupun prosedur ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan pengujian yang teruji kebenarannya. Sehingga pengetahuan tersebut dapat disebut dengan ilmu.

Alur berpikir dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam kegiatan ilmiah sebagai berikut (Supardi, 2011:19):

Tabel 1

1	Perumusan Masalah	Pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya
2	Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis	Argumentasi menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengaitkan dan membentuk kontelasi permasalahan
3	Perumusan Hipotesis	Jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan
4	Pengujian Hipotesis	Pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang dihasilkan untuk memperlihatkan apakah fakta-fakta yang ada mendukung hipotesis atau tidak.
5	Kesimpulan	Merupakan penelitian apakah sebuah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima

Dalam penelitian tidak semua metode menggunakan hipotesis. Contohnya dalam bidang sejarah

Tabel 2

1	Perumusan Masalah	<p>Pengajuan masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang • Identifikasi • Pembatasan • Perumusan • Tujuan penelitian • Kegunaan penelitian
2	Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis	<p>Penyusunan kerangka teori dan pengajuan hipotesis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian teori • Pembahasan penelitian yang relevan • Penyusunan kerangka berpikir • Perumusan hipotesis
3	Perumusan Hipotesis	<p>Metode penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan penelitian • Tempat penelitian • Metode • Teknik pengambilan contoh • Teknik pengumpulan data • Teknik analisis data
4	Pengujian Hipotesis	<p>Hasil penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel yang diteliti • Teknik analisis • Kesimpulan analisis data • Penafsiran kesimpulan analisis data • Kesimpulan pengujian hipotesis
5	Kesimpulan	<p>Ringkasan dan kesimpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi • Kesimpulan penelitian • Pembahasan hasil penelitian • Implikasi penelitian • Saran

Bab VI

PENERAPAN FILSAFAT DAN METODE PENELITIAN FENOMENOLOGI

A. PENGANTAR

Fenomenologi adalah merupakan ilmu pengetahuan (*logos*) tentang apa yang tampak (*phainomenon*) atau apa yang menampakkan diri (*fenomen*). Fenomen menurut Husserl adalah realitas yang tampak bagi kita. Bagi Husserl tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan antara kita dengan realitas. Husserl berpendapat bahwa kesadaran menurut kodratnya terarah pada realitas. Kesadaran berarti kesadaran akan sesuatu. Kesadaran menurut kodratnya bersifat intensional (Basrowi, 2003:47)

Para pendukung pendekatan fenomenologi percaya bahwa untuk memecahkan permasalahan penelitian suatu suyek atau objek, seorang peneliti perlu menggambarkan subyek atau objek yang diteliti secara total. Disamping itu mereka juga percaya bahwa untuk memahami gejala sosial yang paling tepat adalah apabila mereka mampu memperoleh *fakta pendukung* yang sumbernya *berasal dari persepsi dan ungkapan dari para pelaku itu sendiri* (Noeng Muhadjir, 2002:4).

Secara etimologi, fenomenologi berasal dari kata Yunani 'fenomenon', yaitu suatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya, yang dalam bahasa Indonesia disebut 'gejala' jadi fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau gejala sesuatu yang menampakkan diri.

Arti fenomena dan fenomenologi mengalami perubahan secara mendasar setelah Edmund Husserl menerbitkan bukunya *logische Untersuchungen* (penelitian tentang logika, 1913) yang merupakan penelitiannya dalam hal landasan-landasan logika. Dalam hal ini Husserl menghadirkan fenomenologi sebagai metode objektif yang bisa diterapkan pada filsafat maupun ilmu pengetahuan. Akan tetapi fenomenologi, dalam arti yang berbeda dari arti-arti yang telah disebutkan sebelumnya, menurutnya fenomenologi merupakan suatu pemikiran yang memiliki keterkaitan dengan pemikiran filosofis secara keseluruhan. Bagi Husserl fenomenologi adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena, tentang objek-objek sebagaimana objek-objek itu dialami atau menghadirkan diri dalam kesadaran manusia.

Kecenderungan berikutnya fenomenologi lebih diartikan sebagai studi tentang kenyataan sebagaimana tampilnya (asal kata bahasa Yunani *phenomenon* berarti penampilan). Meskipun kata fenomena telah digunakan oleh sejumlah filsuf sebelumnya, sejak Edmund Husserl (1859-1938) kata itu belum menjadi istilah dengan batasan yang jelas. Bagi Husserl Fenomena adalah sesuatu (objek) sebagaimana kita alami dan menghadirkan diri dalam kesadaran kita. Maka fenomenologi menurut Husserl ialah cara pendekatan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu (objek) sebagaimana tampilnya dan menjadi pengalaman kesadaran kita. (Noeng Muhadjir, 2002:4-6).

Dalam perkembangan berikutnya pandangan Husserl disempurnakan oleh Schutz, dengan menghubungkan antara *fenomena transendental* dari konsepnya Husserl dan konsep *verstehen*-nya Weber, karena dunia sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubyektif dan pengalaman penuh dengan makna (Ferguson, 2000, Collin, 1977, Campbell, 1988). Dalam pandangan Schutz dunia keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubyektif

dan pengalaman penuh makna. Dengan demikian fenomena yang ditampilkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman transendental dan pemahaman tentang makna atau *verstehen* (Collin, 1997, Waters, 1994, Campbell, 1994, dalam Basrowi, 2003: 48)

Dalam melakukan *verstehen* ini menurut Trauzzi (Orleans, 2000) seorang peneliti harus masuk dalam pikiran informan. Oleh karena itu, menurut Bogdan dan Taylor (Orleans, 2000) fenomenologi harus menggunakan metode kualitatif, wawancara intensif (agar mampu menyibak orientasi subyek atau 'kehidupannya'), melakukan analisa dari kelompok kecil, dan memahami keadaan sosial. Bahkan menurut Menhan dan Wood, (Orleans, 2000) peneliti harus mampu membuka selubung praktik yang digunakan oleh orang yang melakukan kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar mengetahui bagaimana rutinitas itu berlangsung. Menurut Scheglof dan Sacks, dalam melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif *verstehen*, peneliti merekam kondisi sosial sehingga memungkinkan peneliti mendemonstrasikan tentang cara yang dilakukan oleh informan. Pada saat itu peneliti melakukan interpretasi terhadap makna perbuatan dan pikiran mereka akan struktur keadaan. Dalam fenomenologi, masa lampau seperti yang dilihat, didengar, dan diinterpretasi informan disebut dengan *first order understanding*, sedangkan masa lampau yang dipahami peneliti disebut *second order understanding*. (Basrowi, 2003: 49-50).

B. LATAR BELAKANG LAHIRNYA FILSAFAT ILMU PHENOMENOLOGIK

Pemikiran Edmund Husserl, dalam filsafat Ilmu menawarkan solusi atas kebuntuan dunia ilmu yang dikuasai oleh filsafat ilmu positivisme. Filsafat ilmu positivisme

menggunakan metodologi analitik dalam pengembangan ilmunya; secara analitik mencari unit terkecil, dihimpun fakta indrawi sebagai *percieved view*, yang dieliminasi dari konsep, idée dari subyek. Pada era positivisme induktif, filsafat ilmu tersebut digunakan untuk IPA sejak abad XVIII, belum disadari kelemahannya.

Pada perkembangan berikutnya, abad 19 dan awal abad 20 metodologi tersebut mulai dikembangkan sebagai metodologi pengembangan ilmu sosial. Dalam perjalanannya pengembangan ilmu social dan humaniora disadari kelemahannya, antara lainnya penggarapan analitiknya dan dipisahkannya subyek dari obyek; dengan implikasi dunia ilmu tereleminasikannya manusia sebagai subyek atas obyeknya; dan lebih lanjut kehilangan orientasi humanitas ilmu sosial dan humaniora.

Kelemahan penggunaan metodologi positivistic yang induktif tersebut memperoleh jalan keluar setelah para ahli menengok pemikiran Edmund Hasserl. Karya-karyanya kemudian menjadi sosok *phenomenology* yang berpengaruh sebagai alternatif lain dalam filsafat ilmu dan metodologi pengembangan ilmu untuk ilmu sosial dan humaniora. Filsafat Ilmu *Phenomenologi Induktif*. Ada beberapa varian yaitu *Model Interpretatif Geertz*, *Model Groundded Research*.

Fenomenologi kadang digunakan sebagai perspektif filosofi dan juga digunakan sebagai pendekatan dalam metodologi kualitatif. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada focus kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Para fenomenologis ingin memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain. Ada beberapa ciri pokok fenomenologis yaitu:

1. Fenomenologis cenderung mempertentangkannya dengan naturalisme yaitu yang disebut objektivisme dan

- positivisme, yang telah berkembang zaman renaisans dalam ilmu pengetahuan modern dan teknologi.
2. Secara pasti, fenomenologi cenderung memastikan kognisi yang mengacu pada apa yang dinamakan oleh Husserl, '*Evidenz*', yang dalam hal ini merupakan tentang sesuatu benda itu sendiri secara jelas dan berbeda dengan yang lainnya dan mencukupi untuk sesuatu dari segi itu.
 3. Fenomenologis cenderung percaya bahwa bukan hanya sesuatu benda yang ada dalam dunia alam dan budaya.

C. PERSPEKTIF FENOMENOLOGIS

Perspektif penelitian fenomenologi yang merujuk pada pandangan Peter L Berger dan Luckmann (1990) beranggapan bahwa setiap fenomena dapat dideskripsikan sebagai sesuatu yang empirik, terkait dengan kehidupan sehari-hari, menempatkan subyek terteliti sebagai subyek yang kritis dan problematik - dalam arti menyertakan pengetahuan yang dimiliki oleh subyek terteliti, juga memperhatikan konsep vertehen-nya Weber yang lebih melihat *in order to motive* dari suatu tindakan, juga merujuk pada konsep Schutz tentang alasan yang mendasari perilaku subyek melakukan tindakan (*because motive*) (Basrowi, 2003: 19-20).

Berger dan Luckmann (1990:29) menyatakan bahwa proses berfikir secara fenomenologi dimulai dari proses pemahaman atas kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai realitas utama. Kehidupan masyarakat terbentuk melalui proses yang terus-menerus melalui pengalaman *intersubyektif* (inter subyektivitas). Melalui intersubyektivitas dapat menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tertentu dibentuk secara terus menerus. Konsep *intersubyektivitas* menunjuk pada *dimensi struktur kesadaran umum* ke

kesadaran *individu* dalam suatu kelompok yang sedang saling berintegrasi dan berinteraksi (Basrowi, 2003: 20).

D. KONSTRUKSI SOSIAL

Konstruksi sosial dalam pandangan Berger dan Luckmann (1990) adalah sebuah *proses* eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat. Ketiga proses tersebut terjadi secara simultan membentuk dialektika, serta menghasilkan realitas sosial berupa pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum dan wacana publik.

Dalam pandangan Berger dan Luckmann (1990) konstruksi sosial itu dibangun oleh individu dan masyarakat secara dialektik. Dalam hal ini, konstruksi sosial yang dimaksud adalah realitas sosial berupa *realitas objektif, subyektif, dan simbolik*. Sedangkan materi realitas sosial itu adalah konsep-konsep, kesadaran umum, dan wacana publik. Berger dan Luckmann tidak menjelaskan siapa yang lebih dominan di antara individu dan masyarakat dalam proses konstruksi sosial. Dalam kaca mata Berger dan Luckmann dunia sosial kultural adalah masyarakat yang melahirkan individu, walau individu itu sendiri adalah yang melahirkan masyarakat (Basrowi, 2003:21).

Teori konstruk sosial yang juga merupakan derivasi dari pendekatan fenomenologis yang digagas oleh Berger dan Luckmann (1990), menyatakan bahwa dalam memahami konstruksi sosial ada beberapa hal yang perlu dipahami. *Pertama* mendefinisikan tentang “kenyataan” dan “pengetahuan”. Dalam konteks ini kenyataan sosial tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerja sama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial, dan sebagainya. Kenyataan sosial ini ditemukan di dalam pengalaman intersubyektif.

Sedangkan pengetahuan tentang “kenyataan”, sangat berkaitan dengan penghayatan kehidupan bermasyarakat dan segala aspeknya yang meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif.

Kedua, untuk meneliti sesuatu yang *intersubjektif* tersebut, Berger menggunakan panduan cara berfikir Durkheim mengenai obyektivitas dan merujuk pada Weber mengenai subyektivitas. Jika Durkheim melihat keterpilahan antara subyektivitas dan obyektivitas, dengan menempatkan obyektivitas di atas subyektivitas, sedangkan Weber mengakui juga keterpilahan keduanya dan menempatkan subyektivitas di atas obyektivitas atau dengan kata lain individu di atas masyarakat (Weber) sedangkan masyarakat di atas individu (Durkheim). Berger melihatnya keduanya sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. (Berger dan Luckmann, 1990). Dalam Basrowi, 2003:26-27).

Berger dan Luckmann (1990:29) menyatakan bahwa proses berfikir secara fenomenologi dimulai dari proses pemahaman atas kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai realitas utama. Kehidupan masyarakat terbentuk melalui proses yang terus-menerus melalui pengalaman intersubjektif (*intersubyektivitas*). Melalui *intersubyektivitas* dapat menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tertentu dibentuk secara terus menerus. Konsep *intersubyektivitas* menunjuk pada *dimensi struktur kesadaran umum* ke kesadaran *individu* dalam suatu kelompok yang sedang saling berintegrasi dan berinteraksi. (Basrowi, 2003:39)

Kenyataan kehidupan sehari-hari memiliki *dimensi-dimensi objektif dan subyektif*. Manusia adalah pencipta kenyataan sosial objektif melalui proses eksternalisasi. Sementara itu kenyataan objektif mempengaruhi kembali melalui proses internalisasi. Proses ini mencerminkan kenyataan subyektif. Berger (1994:3) memandang

masyarakat adalah suatu fenomena dialektik dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Dengan kata lain masyarakat adalah sebagai kenyataan objektif dan sekaligus sebagai kenyataan subyektif. Sebagai kenyataan objektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia dan berhadapan-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subyektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian tak terpisahkan. Dengan kata lain individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu. Kenyataan sosial itu bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan kenyataan subyektif. Kenyataan objektif ialah kenyataan yang berada di luar diri manusia sedangkan kenyataan subyektif adalah kenyataan yang berada di dalam diri manusia (Berger dan Luckmann, 1990:66)

Dalam pandangan Berger berpartisipasi dalam pandangan hidup merupakan salah satu gejala objektivasi dari individu. Individu yang berpartisipasi berarti ia menerima kenyataan objektif yang mempengaruhi hidup individu diterima dan mendapat legitimasi status sebagai norma, dan sebaliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pengetahuan mendahului sistem nilai dalam masyarakat (*knowledge precedes values in the legitimation of intitutions*) (Berger dan Luckmann:xxiv).

Dunia kelembagaan adalah aktivitas manusia yang diobjektivasi. Objektivasi dunia kelembagaan adalah objektivitas yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Produk aktivitas manusia yang dieksternalisasikan akan memperoleh sifat objektif. Dunia sosial dalam pengalaman manusia ditandai oleh objektivitas. Manusia sebagai produsen dan dunia sebagai produknya merupakan hubungan yang dialektis. Manusia dalam kolektivitasnya dan dunia sosialnya berinteraksi satu sama lain. Produk berbalik mempengaruhi produsennya.

Dengan demikian, objektivasi dan eksternalisasi merupakan momen dalam suatu proses dialektis yang berlangsung terus-menerus. Masyarakat merupakan produk manusia, masyarakat merupakan kenyataan objektif dan manusia merupakan produk sosial.

Momen ketiga yaitu internalisasi. Dunia sosial yang sudah diobjektivasi dimasukkan kembali ke dalam kesadaran selama berlangsungnya sosialisasi. (Berger dan Luckmann, 1990:87). Dengan memandang *masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam tiga momen dialektis* yang simultan yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi serta menyangkut masalah legitimasi, maka yang disebut dengan kenyataan sosial itu adalah *merupakan konstruksi sosial* buatan masyarakat sendiri dalam perjalanan sejarahnya di masa silam ke masa kini dan menuju masa depan.

Dalam perspektif fenomenologi dikenal juga motif penyebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*). Ada beberapa hal yang termasuk dalam motif penyebab antara lain; Pertama, akibat runtuhnya keamanan ekonomi dan melemahnya dasar-dasar kehidupan masyarakat pedesaan (Hobsabawm 2000: 101-115). Tingginya derajat eksploitasi para tuan tanah kepada para petani miskin (Barington Moore, 1996). Meluasnya komersialisasi pertanian yang mengakibatkan merosotnya keamanan ekonomi petani, terbongkarnya hubungan sosial pedesaan dan melemahnya nilai-nilai tradisional. (Brockett, 1990:192)

Kedua, terjadinya proses perluasan pasar yang menciptakan strata sosial baru (Paige, 1970). dan berkembangnya pasar yang mendorong munculnya kepentingan pribadi melalui makin mengerasnya dasar dan paham kesejahteraan sebagai norma-norma resiprositas dan hak-hak substantansi (Wolf, 1969). Disamping itu juga ada yang disebut dengan *underlying factors* (faktor pokok

yang mendasari) dan *precipitating factors* (faktor pemicu), misalnya perubahan politik yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai tuntutan dan kontrol kepada pemerintah.

Proses Eksternalisasi

Menurut Berger (1994:4-5), eksternalisasi adalah suatu pencurahan kehadiran manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Proses ini menurut Berger sebagai suatu keharusan, karena manusia dalam praktiknya tidak bisa berhenti dari proses pencurahan dirinya ke dalam dunia yang ditempatinya. Manusia mustahil bisa tinggal di dalam dirinya sendiri.

Menurut Berger dan Luckmann (1990) dalam momen eksternalisasi ini, manusia memproduksi tatanan sosial yang berlangsung terus-menerus. Dengan kata lain tatanan sosial diproduksi secara terus-menerus dalam proses eksternalisasi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam konsep eksternalisasi, keberadaan manusia terus menerus mengeksternalkan diri dalam aktivitas. Aktivitas yang telah menjadi kebiasaan, menghasilkan makna-makna yang sudah tertanam sebagai hal yang rutin. Dengan demikian pembiasaan memberikan arah spesialisasi kegiatan yang berlangsung sepanjang waktu dan membentuk suatu lembaga. Proses pelembagaan tindakan sehari-hari yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat secara luas menjadi milik bersama (Berger dan Luckmann, 1990:78).

Dengan demikian hubungan antara individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika (*interaktif*) yang diekspresikan dengan tiga peristiwa: *society is human product*, *Society is an objective reality*. *Man is social product*. Dialektika ini dimediasikan oleh pengetahuan yang disandarkan atas memori pengalaman di satu sisi dan oleh peranan-peranan

yang merepresentasikan individu dalam tatanan institusional (Water, 1994:35). Di dalam konteks realitas sosial, ketiga peristiwa yang secara simultan merupakan konstruksi sosial dapat dipakai untuk melihat bagaimana proses pelembagaan berbagai kegiatan di dalam masyarakat.

Berger menerima asumsi bahwa eksistensi kenyataan sosial objektif dapat ditemukan dalam hubungan antara individu dan lembaga sosial, karena lembaga sosial yang ada merupakan produk kegiatan manusia. Struktur sosial yang ada dalam lembaga bercirikan adanya perkembangan aktivitas manusia dalam proses eksternalisasi atau interaksi manusia dengan struktur-struktur sosial yang sudah ada. Dengan demikian aturan-aturan sosial pada prinsipnya bertujuan untuk memelihara struktur-struktur sosial yang sudah berlaku, meskipun belum tentu menyelesaikan proses eksternalisasi individu-individu yang berada di dalam struktur-struktur itu. Proses eksternalisasi individu bisa jadi berupa proses penggerogotan tatanan sosial yang ada dan mengganti dengan suatu orde yang baru menuju keseimbangan-keseimbangan baru.

Menurut Berger dan Luckmann (1990:xxiii) bahwa salah satu lembaga besar dalam masyarakat yang sangat mempengaruhi proses eksternalisasi individu adalah negara. Negara dengan birokrasinya sangat mewarnai kehidupan publik. Bahkan birokrasi negara mampu mempengaruhi kehidupan privat individu.

Namun demikian individu juga bisa memiliki kemungkinan untuk melakukan perlawanan terhadap institusi negara. Menurut Berger perlawanan terhadap institusi negara tidak akan pernah terjadi apabila individu sudah merasa aman dalam berhadapan dengan struktur objektif. Rasa aman di sini bukan dalam arti aman secara material, akan tetapi aman secara rohani, antara lain karena kehidupannya dijamin dalam struktur objektif itu. Lebih

lanjut ditegaskan bahwa apabila individu-individu kehilangan rasa aman atau mengalami alienasi maka perlawanan terhadap struktur objektif akan mulai muncul, meskipun hanya terbatas pada kesadaran subyektif. Sejalan dengan pandangan ini Wolf (1969) menyatakan bahwa gerakan-gerakan protes sering kali berpusat pada lahirnya kesadaran tentang suatu tatanan sosial yang lebih adil dan lebih merata dibandingkan dengan tatanan sosial yang sekarang yang hirarkhis. Lahirnya suatu kesadaran bersama tentang keadilan yang transendental seringkali dapat menggerakkan suatu komunitas tertentu untuk bertindak. Kesadaran seperti ini akan dapat menyatukan suatu komunitas hingga berhasil membentuk koalisi-koalisi. Koalisi ini memang merupakan suatu pengelompokan yang tidak stabil dan sangat rentan, namun demikian keberadanya sangat berarti bagi lahirnya kesadaran untuk melakukan perlawanan dalam skala yang lebih besar.

Proses Objektivasi

Menurut Berger dan Luckmann (1990) kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai *kenyataan* yang ditafsirkan oleh manusia dan mempunyai makna subyektif bagi mereka sebagai satu dunia yang koheren. Dunia kehidupan sehari-hari diterima sebagai kenyataan dalam berperilaku dan bermakna subyektif dalam kehidupan mereka. Kehidupan sehari-hari merupakan suatu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan anggota masyarakat dan dipelihara sebagai suatu kenyataan.

Analisa fenomenologi tentang kehidupan sehari-hari harus dilakukan dengan cermat tidak menerima begitu saja. Seorang peneliti dalam melihat kehidupan sehari-hari tidak boleh langsung menyakini sebagai suatu intensionalitas, melainkan harus dibuktikan berulang kali, agar dapat

diketahui secara benar bahwa kehidupan sehari-hari itu benar-benar dilakukan masyarakat dengan kesadaran penuh dan membentuk kenyataan yang tertib dan tertata. Kenyataan yang mengacu pada suatu dunia yang sama-sama dialami oleh banyak orang. Pemahaman yang dimiliki oleh anggota masyarakat sama dengan pemahaman orang lain dalam kegiatan rutin yang normal dalam kehidupan sehari-hari.

Kenyataan kehidupan sehari-hari menghadirkan *dunia intersubjektif*, yaitu suatu dunia yang dihuni anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Kenyataan sehari-hari terbagi dalam dua sektor yaitu sektor yang dipahami sebagai hal yang *rutin* dan sektor yang menghadapi masyarakat sebagai *masalah*.

Kenyataan sehari-hari dalam konsep Berger dan Luckmann (1990:218) merupakan alat yang bekerja giat untuk secara terus-menerus memelihara, memodifikasi, dan membangun kembali kenyataan subyektif. Sedangkan wahana yang paling penting untuk membangun dan memelihara kenyataan adalah percakapan, termasuk komunikasi nonverbal yang mewarnai penuturan yang justru mempunyai kekayaan suasana. Potensi percakapan (pengungkapan melalui pembicaraan) merupakan proses objektivasi linguistik. Proses objektivasi linguistik ini berfungsi untuk mengobyektifikasi dunia dan pengalaman menjadi suatu tatanan yang kohesif.

Masyarakat dalam pandangan Berger Luckmann (1990) adalah merupakan suatu kenyataan objektif, yang di dalamnya terdapat proses pelebagaan yang dibangun di atas pembiasaan (*habitualisation*), dimana terdapat tindakan yang selalu diulang-ulang sehingga kelihatan pola-polanya dan terus direproduksi sebagai tindakan yang dipahaminya. Jika habitualisasi ini telah berlangsung maka terjadilah pengendapan tradisi. Keseluruhan pengalaman manusia

tersimpan di dalam kesadaran, mengendap dan akhirnya dapat memahami dirinya dan tindakannya di dalam konteks sosial kehidupannya dan melalui proses pentradisian, akhirnya jadilah pengalaman itu ditularkan kepada generasi berikutnya.

Untuk menularkan atau transformasi ini, salah satu diantara instrumen terpentingnya adalah bahasa. Bahasa digunakan manusia untuk mengobjektifkan pengalaman-pengalaman tersebut kepada orang lain. Disinilah terdapat peranan di dalam tatanan kelembagaan, termasuk di dalam kaitannya dengan pentradisian pengalaman dan transformasi pengalaman tersebut.

Objektivasi merupakan upaya individu memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia. Objektivasi merupakan isyarat yang tahan lama dari proses subyektif. Berger mencontohkan objektivasi pada proses marah. Sifat marah diobjektivasikan melalui berbagai macam isyarat badan, raut muka, warna mata, gerak-gerik tangan dan kaki, sikap badan, dan sikap spesifik lainnya. Kemarahan menurut Berger dapat diobjektivasikan dengan menggunakan senjata.

Proses objektivasi menurut Berger dan Luckmann (1990:50) dapat berupa pembuatan tanda-tanda (*sign*) yang bertujuan untuk digunakan sebagai isyarat atau indeks bagi makna-makna subyektif. Berger mencontohkan bahwa senjata yang digunakan sebagai objektivasi individu dapat dimaknai sebagai tanda agresif dan kekerasan. Begitu pula tanda X dengan cat hitam pada daun pintu kamar orang lain, merupakan upaya objektivasi dari musuh bahwa mereka secara resmi sedang bermusuhan.

Menurut Berger tanda-tanda dalam proses objektivasi dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah sistem tanda. Ada sistem tanda dengan tangan (mengepalkan tangan ke arah

musuh sebagai tanda bermusuhan atau menantang), sistem gerak-gerak badan yang terpola, sistem tanda berbagai artefak material, sistem tanda dengan suara seperti menggertak lawan, sistem tanda dengan tulisan. Berger dan Luckmann berkeyakinan bahwa bahasa lisan merupakan sistem tanda yang paling penting dalam masyarakat, karena bahasa lisan memiliki sifat timbal balik yang inheren hingga menimbulkan kedekatan intersubjektif yang tidak mungkin dimiliki oleh sistem tanda yang lainnya. Dengan bahasa seorang individu mampu mengobjektivasi pengalamannya.

Seluruh pengalaman manusia mengendap dan tersimpan terus dalam kesadaran. Ia menggumpal dalam ingatan sebagai entitas yang bisa dikenal dan diingat kembali. Pengendapan intersubjektif terjadi apabila beberapa individu mengalami suatu biografi bersama, dimana pengalaman masa lalu menjadi bagian dari suatu cadangan pengetahuan bersama. Pengendapan intersubjektif itu benar-benar terjadi apabila pengalaman intersubjektif itu telah diobjektivasi dalam suatu sistem tanda. Proses objektivasi pengalaman itu dapat dilakukan melalui bahasa, bahasa mampu mengobjektivasi pengalaman bersama dan menjadikannya tersedia bagi semua orang di dalam komunitas bahasa itu. Bahasa merupakan alat yang paling penting untuk meneruskan endapan-endapan yang sudah diobjektivasi dalam tradisi kolektivitas.

Proses Internalisasi

Proses internalisasi menurut Berger (1994:5) adalah proses peresapan kembali realitas objektif ke dalam realitas subjektif. Atau dengan kata lain, mentransformasikan struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Proses internalisasi bagi Berger dan Luckmann(1990:186) juga menyatakan bahwa proses

internalisasi merupakan proses pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa objektif dan proses itu merupakan pengungkapan suatu makna. Proses internalisasi juga merupakan proses pemahaman tindakan subyektif orang lain, dan pemahaman mengenai dunia sebagai suatu yang maknawi atas kenyataan sosial.

Proses internalisasi pada hakekatnya juga merupakan proses pengambilalihan dunia orang lain, kemudian dimodifikasi secara kreatif dan diciptakan kembali menjadi dunianya sendiri. Dalam proses internalisasi ini tidak bisa lepas dari proses partisipasi dan sosialisasi baik primer maupun sekunder. *Sosialisasi primer* adalah sosialisasi yang pertama kali dialami individu, sosialisasi ini merupakan proses yang paling penting bagi individu, sedangkan *sosialisasi sekunder* adalah setiap proses sosialisasi berikutnya yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dunia objektif. Dunia yang diinternalisasikan dalam sosialisasi primer jauh lebih kuat tertanam dalam kesadaran dibandingkan dengan dunia-dunia yang diinternalisasikan dalam sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer berakhir apabila konsep tentang orang lain pada umumnya telah terbentuk dan tertanam dalam kesadaran individu. Dalam proses sosialisasi, pengaruh orang lain sangat mempengaruhi entitas yang direfleksikan. Dengan kata lain, proses internalisasi akan memantulkan sikap yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh padanya.

Pengaruh dari masyarakat terhadap proses internalisasi juga berkaitan dengan struktur sosial. Struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat secara horisontal ditandai oleh homogenitas yang tinggi dan secara vertikal ditandai oleh struktur yang berbentuk kerucut. Dalam struktur kerucut ini, posisi puncak strata sosial diduduki oleh kaum elit yang berjumlah sedikit, struktur bawah yang jumlahnya cukup banyak diduduki oleh petani penggarap dan buruh tani.

Dalam struktur masyarakat seperti ini faktor kepemimpinan memegang peranan penting, sedangkan jabatan pemimpin diduduki kelompok elit yang berada pada posisi puncak dari struktur vertikal yang ada.

Terbentuknya pemahaman dalam kesadaran individu menandai suatu fase dalam sosialisasi. Kenyataan objektif dengan mudah dapat diterjemahkan ke dalam kenyataan subyektif dan sebaliknya. Bahasa merupakan wahana yang utama dan proses yang berlangsung terus menerus dalam kedua arah ini. Kenyataan objektif diinternalisasikan ke dalam kesadaran tiap individu.

Dalam proses internalisasi, tatanan kelembagaan dikerahkan sehingga menghasilkan suatu yang memaksa bagi kenyataan objektif. Dengan tatanan itu, setiap orang tahu, setiap orang lain dan siapa dirinya. Berger mencontohkan setiap ksatria adalah ksatria dan seorang petani adalah petani, baik bagi orang lain maupun bagi diri mereka sendiri. Karena itu dalam proses internalisasi tidak ada masalah identitas. Dalam proses internalisasi mungkin saja terjadi kesalahan, apabila individu dalam menangkap dunia objektif menjadi dunia subyektif, dipengaruhi oleh orang lain yang bukan semestinya mempengaruhi identitas subyektifnya. Ada peran yang asimetris antara identitas yang ditentukan secara sosial dan identitas yang tampak nyata secara subyektif.

E. PANDANGAN FENOMENOLOGI TENTANG 'KESADARAN MELAKUKAN TINDAKAN'

Diantara tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan berakar (Craib, 1986:126). Disini fenomenologi merupakan bentuk idealisme yang tertarik pada struktur-struktur dan

cara bekerjanya kesadaran manusia, yang secara implisit menyakini bahwa dunia yang kita diami, diciptakan atas dasar kesadaran. (Craib, 1986:127).

Dunia kehidupan sosial ditetapkan oleh pengalaman berdasarkan kesadaran. Melalui kesadaran pelaku berusaha mencapai maksud-maksudnya. Jadi kehidupan sehari-hari adalah orientasi pragmatis masa depan. Pengandaiannya adalah bahwa manusia memiliki motif tertentu, dan mereka berusaha merubah dunia yang mereka tangkap.

Kesadaran bagi Husserl adalah aliran pengalaman-pengalaman hidup (*erlebnisse*) yang di dalamnya memiliki esensinya sendiri (antara lain: ingatan, persepsi, emosi). Bagi pengalaman-pengalaman tersebut dan pada tingkat-tingkat esensinya, objek-objek transenden dalam dunia menyajikan dirinya sendiri lebih kurang secara memadai. Tetapi penyajian itu tidaklah menghapuskan transendensi objek.

Kesadaran bagi Husserl memiliki sifat yang aktif dan senantiasa bergerak sebagai aliran pengalaman-pengalaman hidup. Objek-objek menampakan diri sebagaimana adanya dan melekat dalam kesadaran, tetapi sekaligus dengan tetap memiliki transendensinya. Hubungan antara kesadaran sebagai subyek dengan objek yang berada di luarnya – dalam rangka intensinalitas—hanya dimungkinkan oleh adanya “arti” atau “makna” yang dikandung objek. Sebab objek sebagaimana fenomena yang disadari oleh subyek bukanlah semata-mata merupakan suatu benda kongkrit sebagaimana keadaanya dalam ruang, melainkan juga struktur, arti dan maknanya.

Fenomena diartikan sebagai apa yang menampakan diri sebagaimana adanya dalam dirinya sendiri. Jadi fenomena adalah realitas itu sendiri yang tampak tanpa selubung atau tirai yang memisahkannya dari subyek. Fenomena sebagai subyek tidak diartikan sebagai semata-mata objek visual,

juga bukan sekedar gejala atau ilusi, melainkan sebagai benda sebagaimana adanya yang tampak kepada kita melalui stuktur pokok dari benda-benda tersebut yang hadir dan dirasakan oleh kesadaran kita.

Dengan demikian fenomena – dalam fenomenologi— bukanlah penampakan realitas secara alamiah yang berkenaan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang ditangkap melalui sikap “*saints*” yakni realitas dalam rangka ruang – waktu seperti halnya rumah yang terdiri dari pintu, atap, dan jendela, ataupun wanita yang tampak melalui pakaian, rambut, dan kakinya. Melainkan “pepohonan-nya, kerumahan-nya, kewanitaan-nya”. Jadi tampak melalui struktur yang hakiki sejauh disadari seutuhnya, bukan asosiasi sesudahnya maupun penalaran, melainkan stuktur intern dalam fenomena yang diketahui itu.

Bagi Husserl (1976:84) melihat secara langsung, bukan saja melihat dalam arti pengalaman indrawi, tetapi melihat pada umumnya sebagai pemberi asli kesadaran macam apa saja, adalah sumber pembenaran yang terakhir bagi semua pernyataan (*rasional*). Pada dasarnya Scheler menggunakan konsep Husserl bahwa fenomena ditangkap atau diperleh melalui intuisi (*anschauung*), yaitu bahwa intuisi langsung (tanpa menggunakan perantara apapun juga) yang dapat dipakai sebagai kriteria terakhir untuk memperoleh pengetahuan.

Fenomena yang diperoleh melalui intuisi ini mempunyai hakekat (Beerling, 1958:167). Hakekat fenomena adalah murni dan sejati. Hakekat tersebut tidak akan berubah sebab tidak terikat ruang dan waktu. Hakekat tersebut juga terbebas dari segala macam prasangka metafisik, oleh karena itu tidak perlu diragukan keberadaannya.

Husserl menambahkan perlunya peneliti membebaskan diri dari praduga sebelum melakukan pendekatan terhadap

objek yang ingin kita ketahui atau pelajari; maka objek yang bersangkutan seolah-olah seperti dikurung (*einklammerung, bracketing*) sehingga segala praduga dan pra anggapan mengenai objek itu tidak mempengaruhi pengetahuan peneliti memperoleh tentang objek itu. Proses tersebut oleh Husserl disebut dengan *epoche*, yang artinya ‘membisukan segala suara’ yang mungkin pernah mempengaruhi pengetahuan kita terhadap objek yang bersangkutan.

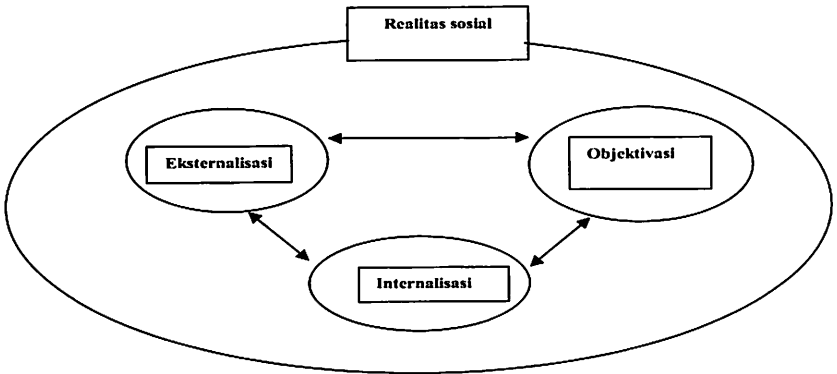
Bagi Husserl semua kesadaran bersifat intensional, maka tidak ada kesadaran belaka, yang ada ialah ‘kesadaran tentang sesuatu’ dengan kata lain kesadaran selalu tertuju pada objek yang mengisinya. Demikianlah tidak mungkin ada kesadaran tentang takut tanpa diisi oleh sesuatu yang tampil menakutkan; kesadaran ‘takut’ merupakan pengalaman yang menyatu dengan objek yang tampil menakutkan itu. Bagi orang lain boleh jadi objek yang sama tidak tampil menakutkan sehingga tidak mungkin menimbulkan kesadaran ‘takut’. Kesadaran manusia adalah kesadaran yang terjalin dengan kesadarannya tentang berbagai hal (*dated*) dan keberadaannya dalam berbagai situasi (*situated*). Dunia manusia bukanlah sekedar kenyataan objektif melainkan merupakan *lebenswelt*, yaitu dunia sebagaimana dialami dan dihayati secara subyektif.

Menurut Schutz, dunia individu merupakan sebuah dunia intersubyektif dengan makna beragam. Kita dituntut untuk saling memahami satu sama lain dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Schutz meletakkan hakekat kondisi manusia dalam *pengalaman subyektif* dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa verstehen adalah metode yang masuk akal dalam kehidupan keseharian yang mampu menghasilkan kebenaran umum, yang terkontrol dan dapat dibuktikan (Basrowi, 2003:64-66).

Hubungan antara eksternalisasi, objektivasi dan intrnalisasi dengan realitas sosial dapat digambarkan dalam

skema sebagai berikut;

gambar 5. Realitas Sosial



F. PROSES REDUKSI DALAM PENELITIAN FENOMENOLOGI

Reduksi merupakan proses penjernihan fenomena dengan cara menunda upaya menyimpulkan sesuatu dari setiap prasangka terhadap realitas. Langkah-langkah metodis yang dimaksud adalah reduksi *eidetis*, reduksi fenomenologis dan reduksi transendental (Collin, 1997:111, Abidin, 2000).

Reduksi secara harifiah berarti penyaringan, konsep ini merupakan pilar utama bagi suatu prosedur fenomenologis. Melaksanakan penelitian fenomenologis berarti melakukan proses reduksi. Dinyatakan oleh Beerleing bahwa reduksi adalah permulaan penelitian dan seluruh penelitian, selanjutnya adalah penelitian reduktif, karena peneliti harus selalu mereduksi.

Reduksi sebagai langkah metodis berupa penyisihan sifat-sifat yang ada pada objek. Aspek metodis ini merupakan dasar operasional bagi dilaksanakannya proses reduksi dan menyangkut dua istilah yang pengertiannya sulit dibedakan

secara tegas, yaitu *epoche* dan *einklammerung*.

Istilah *epoche* berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti “tidak memberikan suara”, sedangkan istilah *einklammerung* diambil dari istilah Jerman dalam matematika yang berarti “memasukkan dalam tanda kurung”. Secara umum kedua kata itu dimaksudkan bahwa subyek harus menanggihkan segala penilaian tentang objek agar dapat hadir secara utuh sebagai “dirinya sendiri”.

Meskipun fenomena selalu menyodorkan *seinsgeltung* nya, tetapi subyek tidak boleh menerimanya secara begitu saja. Kecenderungan subyek untuk mengadakan *efirmasi* harus ditahan dulu dan segala keputusan (*urteil*) tentang objek untuk sementara ditanggihkan. Sehingga apa yang hadir dan dialami dalam kesadaran dipandang saja. Dipihak lain subyek sendiri menyimpan pengalaman hidup sehari-hari dari konteks kehidupan alamiahnya, sambil tetap mempertahankan isinya sepenuh dan semurni mungkin. Sehingga subyek menemukan dirinya sendiri sebagai “aku” yang murni ini tampilah dalam kesadaran subyek seluruh dunia yang objektif (Beerling, 1958:186).

Selanjutnya yang dilakukan subyek adalah menyaring setiap keputusan yang muncul terhadap objek yang tengah diamati, sebab syarat utama keberhasilan penggunaan prosedur fenomenologis adalah membebaskan diri dari praduga-praduga dan pra andaian-pra andaian serta meletakkannya dalam tanda kurung.

Akan tetapi sejalan dengan prosedur fenomenologis yang dilakukan, segala keputusan yang telah disingkirkan tidak dibuang begitu saja. Semua itu tetap diperhitungkan kembali apabila penelitian fenomenologi telah memperoleh *wesendeinsicht* (pengetahuan esensial). Keputusan-keputusan tersebut akhirnya dipergunakan kembali ketika penelitian sampai pada tahap penginterpretasian makna-

makna fenomena yang tersembunyi. Dengan demikian, penundaan keputusan-keputusan yang subyektif dan pengurangan pengandaian-pengandaian tentang objek tidaklah berkonotasi bahwa setiap hal yang merupakan objektivasi tersebut tidak valid atau kebenarannya disangsikan. Hal yang dipersoalkan bukanlah benar-salah atau valid tidaknya hal-hal tersebut, melainkan yang terpenting di sini adalah bahwa subyek memfokuskan diri pada kriterium fenomenologi.

Reduksi memiliki tiga segi yakni meliputi reduksi fenomenologis, reduksi eidetis, reduksi transendental, yang dalam penggunaannya masing-masing memiliki operasional yang berbeda. Pertama, reduksi fenomenologis adalah suatu usaha mendeskripsikan pengalaman manusia dan untuk menyatakan suatu perwujudan subyek dunia, yaitu subyek yang mengalami objektivasi dengan cara tertentu, pra-reflektif dan kondisional. Melalui reduksi fenomenologis ini ditinggalkan sikap natural yang biasa pada orang "awam". Dengan demikian yang dilakukan dengan reduksi fenomenologis adalah cara subyek yang dalam sikap reflektif mengarahkan dirinya menuju alam subyek yang imanen, sebab hanya dalam sikap itu muncul struktur-struktur esensial fenomena. Menurut Berger dan Luckmann (1990:xvi), reduksi fenomenologis merupakan proses menyeleksi kenyataan-kenyataan yang penting-penting saja dan sikap-sikap subyektif yang wajar dan alamiah seperti yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam reduksi fenomenologis ini dikesampingkan hal-hal yang sifatnya nonesensial dan kebetulan, supaya diperoleh suatu situasi murni yang tersedia, sehingga dapat dilakukan deskripsi langsung tentang objek. Kesadaran dalam kerangka ini lalu merupakan suatu lapangan penghayatan atau aliran pengalaman hidup (*erlibnisse*). Sedangkan objek tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang terletak di luar atau di dalam kesadaran, melainkan menunjuk pada struktur

intensionalitas subyek-subyek.

Bagi Husserl, hasil reduksi fenomenologis di pihak subyek adalah mengarah (secara implisit) pada ditemukannya kesadaran murni. Arah terbentuknya kesadaran murni ini ditemukan melalui *analisa intensional*, dimana dalam proses konstitusi kesadaran diaktifkan oleh kutub subyek sehingga terjadi pengarahan subyek ke objek.

Sementara itu bagi Merleau-Ponty (1962:vii) deskripsi fenomenologi tidak lain adalah suatu upaya untuk kembali kepada kenyataan itu sendiri, yang secara mutlak berbeda dengan pikiran untuk kembali ke kesadaran. Ia beranggapan bahwa tidak akan mungkin terjadi suatu reduksi yang sungguh-sungguh sempurna dimana subyek dapat mengenal dirinya secara murni dan total dan yang menempatkan dunia kehidupan sebagai dasar pernyataan arti setiap objek.

Kedua reduksi eiditis. Jenis reduksi ini dimaksudkan untuk memenuhi kriteria fenomenologi sebagai ilmu tentang hakekat, yaitu menemukan keseluruhan hakiki yang mendasar dan mendalam dari fenomena, yang oleh para fenomenolo disebut *eidōs*. *Eidōs* ini meskipun terdapat dan tersebar pada setiap fenomena, namun tidak dapat diperoleh secara begitu saja dengan 'kaca mata' biasa. *Eidōs* adalah sesuatu yang invarial (Beerling, 1958:194). Untuk memperoleh *eidōs* ini harus dilakukan abstraksi yang didasari oleh tindakan pengintusian, analisa konstitusi dan deskripsi fenomenologis-eiditis. Abstraksi semacam ini merupakan titik sentral sehingga mampu memberikan objektivitas baru yang bersifat absolut, yakni objektivitas esensial. Konsep Husserl tentang reduksi eiditis, secara implisit mengandung pengertian bahwa kesadaran yang diperoleh mampu "membentuk" dunia tanpa keluar dari struktur-struktur esensialnya.

Reduksi eiditis, memiliki ciri-ciri khas penting; (1)

adanya kegiatan subyek yang menyangkut suatu tindakan kesadaran, (2) adanya sifat instrinsik objek yang disebut sebagai *eidós* atau esensi, dan (3) bahwa objek kognitif dan tindakan kesadaran bersifat korelatif sebagai suatu relasi intensional.

Ketiga, reduksi transendental, yaitu langkah reduksi yang berusaha memilah hakekat yang masih bersifat empiris menjadi hakekat yang murni. Hal yang empirik disaring tinggal kesadaran aktivitas itu sendiri berupa kesadaran murni (*transendental*).

Sasaran yang dituju melalui reduksi transendental bukan lagi fenomena atau objek, melainkan subyek yang harus disaring dari segala pertimbangan eksistensi dan segala hal yang tidak memiliki hubungan timbal balik dengan subyek sebagai kesadaran murni. Sehingga bagai subyek akhirnya tidak ada lagi kesempatan yang berusaha meragukan keberadaan dan kebenaran esensial yang telah dicapainya. Akan tetapi harus selalu diingat bahwa reduksi transendental senantiasa sekaligus *eidetis*, hal ini perlu agar fenomenologi tidak terjebak hanya sebagai empirisme transendental.

Reduksi transendental harus dilanjutkan agar ego transendental yang telah dicapai tidak tinggal mengawangawang dan dibiarkan begitu saja berdiri sebagai *solus ipse* yaitu makhluk yang berdiri sendiri tanpa teman bagi dirinya. Maka ego transendental lalu mengkonstitusikan ego-ego lain sebagai partner sederajat di dalam suatu komunitas inter subyektif, yang dalam "komunikasi" dan "sosialisasi"nya pada tahap berikutnya membentuk dunia objektif yaitu dunia intersubyektif. (Spiegelberg, 1960:158).

Reduksi transendental bertujuan untuk mendapatkan kemurnian dan kejernihan data dengan cara melakukan klarifikasi data terhadap data yang terkumpul. Proses

klarifikasi itu dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber dan teknik yang disebut dengan data *triangulation* maupun *investigator triangulation* (Denzin, 1994:214-215).

Melalui reduksi transendental Husserl menemukan adanya esensi kesadaran yang disebut intensionalitas. Setiap intensional (*noetic*) adalah aktivitas menyadari sesuatu. Pengertian kesadaran selalu dihubungkan dengan kutub objektifnya, yakni objek yang disadari. (Collin, 1997:111:Abidin, 2000).

Dari pemaparan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa reduksi berarti kembali kepada dunia pengalaman, sebab pengalaman adalah tanah dimana tumbuh segala makna dan kebenaran sehingga pada akhirnya diperoleh suatu pemahaman bahwa pengetahuan subyek tentang dunia bukan lagi pengalaman subyektif yang semata-mata dimiliki subyek, melainkan suatu pengetahuan fundamental yang dialami juga oleh subyek-subyek lain. Dasar pemikiran diambil dari konsep Husserl tentang *lebenswelt*, yaitu suatu konsep yang merupakan langkah awal untuk menjelaskan bahwa kenyataan eksistensi dari dunia adalah realitas transendental. *Lebenswelt*, adalah dunia hidup yang berbeda dengan alam objektif yang muncul dari dalam teori, dan sering diterjemahkan sebagai dunia hidup sehari-hari dan muncul dengan istilah yang beragam; *lived world*, *Monde vécu*, *everyday world*, *life world*. Tetapi semuanya ini pada pengertian yang sama yaitu dunia yang dihayati dalam hidup sehari-hari. Pengalaman manusia dalam *lebenswelt* inilah yang pada akhirnya akan mengantarkan setiap manusia untuk mencapai akar ilmu pengetahuan di mana segenap ilmu pengetahuan dibangun di atasnya. Untuk berikutnya mencapai fase *erlabnisse*, (kesadaran murni) tempat untuk mengkonstitusikan atau menyusun objek yang dijadikan sasaran. Dalam fase ini subyek mengalami dirinya sendiri dan kebenaran yang dicapai adalah kesesuaian antara

apa yang dilihat, dipikir, dan dialami dengan makna yang diketemukan. Inilah yang disebut dengan substansi.

G. ANALISIS DATA SECARA FENOMENOLOGI DALAM RANGKA PENARIKAN PROPOSISI

Analisis data secara Fenomenologi dalam rangka dalam rangka Penarikan Proposisi dalam penarikan data secara fenomenologi, Dimiyati (2001) menyarankan langkah-langkah, ada delapan langkah-sebagai berikut.

Pertama, mengkategorikan antara subyek penelitian dan informan penelitian. *Kedua*, menguji kejujuran aktor dengan cara menguji keakuratan data dari aktor yang satu dengan yang lainnya. *Ketiga*, mencari norma atau nilai yang melatarbelakangi perilaku serta tujuan aktor dalam melakukan tindakan. Keempat, melakukan reduksi. Hal-hal yang direduksi meliputi data hasil pengamatan dan data hasil wawancara. Tahapan mereduksi data meliputi langkah-langkah sebagai berikut. (1) *proses selecting dan focusing*, peneliti lakukan pada orang yang hendak diwawancarai dan situasi penelitian. Orang yang diwawancarai hanya peneliti pilih pada orang-orang yang benar-benar mengetahui secara pasti tentang seluk beluk tema penelitian. Situasi penelitian, juga hanya peneliti pilih pada situasi yang benar-benar menarik dan berkaitan langsung dengan tema penelitian. Dengan kata lain, pengamatan tidak ditujukan kepada seluruh aktivitas yang ada di masyarakat, akan tetapi pengamatan dilakukan secara selektif hanya pada kegiatan masyarakat yang benar-benar berkaitan langsung dengan tema penelitian. (Basrowi, 2003: 84). Begitu pula perlakuan peneliti terhadap transkrip wawancara. Tidak semua hasil transkrip itu peneliti ambil sebagai data penelitian, cukup peneliti seleksi dengan cara menstabilkan data-data yang relevan dengan tema penelitian. Data yang peneliti

stabilo itulah yang dimasukkan dalam laporan penelitian. Upaya fokusing juga peneliti lakukan pada saat peneliti melakukan wawancara. Ketika orang yang diwawancarai berbicara panjang lebar, maka peneliti berusaha memfokuskan kembali pada tema penelitian, sehingga proses pembicaraan hanya terfokus pada tema penelitian. (2) *Simplifying*, peneliti lakukan untuk penyederhanaan data. Keterangan yang sulit dipahami dan terkesan berbelit-belit tidak secara langsung peneliti tulis dalam laporan penelitian, akan tetapi peneliti sederhanakan lebih dahulu agar mudah dipahami. Upaya penyerderhanaan dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengurangi makna dan keakuratan data yang diperoleh. (3) *Abstracting*, peneliti tempuh untuk menggambarkan data secara naratif sebagaimana yang ada di lapangan. Misalnya saat peneliti menggambarkan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat peneliti melakukan reduksi dengan cara cukup mengilustrasikan hal-hal yang sekiranya relevan dengan tema penelitian. (4) *Transforming*, peneliti lakukan dengan cara mentransformasikan data pengamatan lapangan yang begitu panjang lebar menjadi kesimpulan catatan lapangan. Transformasi juga dilakukan terhadap wawancara yang panjang lebar menjadi kesimpulan atau inti wawancara. Kesimpulan hasil wawancara dituliskan pada bagian akhir transkrip wawancara. (Basrowi, 2003: 85)

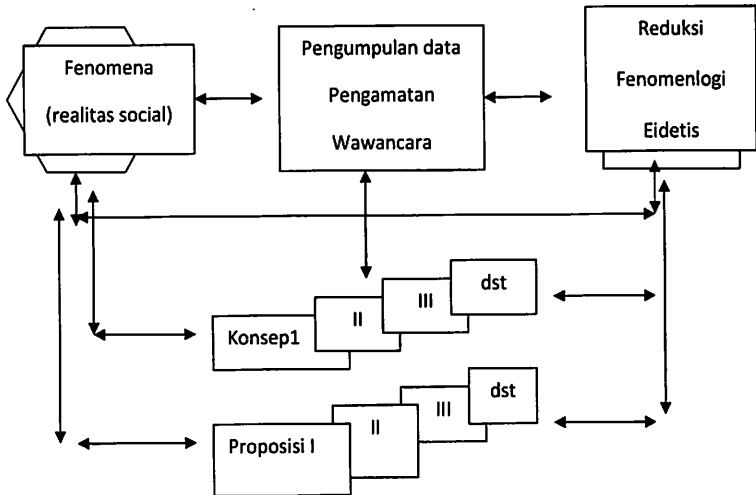
Kelima, mengelompokan hal-hal yang serupa menjadi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Membandingkan kemiripan dan perbedaannya dengan kaidah atau prinsip-prinsip logika. Setelah itu kemudian dilakukan display (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Dalam proses ini data diklasifikasi berdasarkan tema-tema inti. Keenam, membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip-prinsip logika,

kemudian mengangkatnya sebagai temuan penelitian.

Ketujuh, mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Kedelapan, melaporkan hasil penelitian secara lengkap dengan 'temuan baru' yang berbeda dari temuan yang ada. (Basrowi, 2003: 88).

Berdasarkan uraian di atas langkah analisis data secara fenomenologi dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut di bawah ini:

gambar 6



Keterangan gambar:

Dalam gambar di atas terlihat bahwa, analisis data dimulai sejak proses awal pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan data.

Seluruh rangkaian penelitian di atas bersifat interactive, dalam arti analisis data yang dilakukan bersifat memutar dan bolak-balik, hingga mendapatkan kesimpulan yang benar-benar tajam dan bermakna.

Contoh penerapan konsep fenomenologi untuk sebuah penelitian.

Konsep fenomenologi dijadikan kerangka berfikir untuk melakukan penelitian karena (1) studi tertentu akan mengungkap tentang 'makna' dan 'pemahaman' para aktor dan (2) akan mengungkap pola berfikir subyektif-individualistik sebagai gejala yang penuh makna.

Asumsi penggunaan teori ini juga bertujuan untuk memahami "Model Kegiatan Pendidikan Politik "Tarbiyah Siyasyah" dari dalam (*insight*) masyarakat yang tergabung dalam "jamaah gerakan "Tarbiyah", termasuk kehidupan, aktivitas, dan pengalaman mereka, mengingat aliran fenomenologi berada pada area subyektif dan bergerak pada aras makna dan berupaya mengungkap pemahaman makna dan berbagai motif tindakan individu. Sebagaimana disarankan Oetomo (1995) untuk mencari hakekat kebenaran, kita harus masuk menerobos kepada apa yang ada di balik fenomena itu dengan cara mempelajari bagaimana manusia memerikan benda-benda, hal-hal yang ada disekitarnya dan yang dialami melalui indera.

Atas dasar perspektif di atas suatu penelitian mengambil posisi untuk mencoba memahami model pendidikan politik "Tarbiyah Siasyah" yang dilakukan oleh Gerakan Dakwah Tarbiyah khususnya tentang transformasinya menjadi Partai Politik (PKS).

Kelebihan fenomenologi untuk memahami kegiatan pendidikan politik Islam "Tarbiyah Siasyah" yang dilakukan oleh Gerakan Dakwah Tarbiyah dibandingkan dengan

pendekatan lain adalah (1) mampu menggali *because motiv* dan *in order to motiv* pengaruh model pendidikan politik pada transformasi dari gerakan dakwah ke partai politik (PKS); (2) hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Penyimpulan dilakukan melalui proses 'reduksi'. Melalui reduksi, ada upaya menunda proses penyimpulan sesuatu dari setiap prasangka terhadap realitas; (3) Mampu menggali dunia subyektif yang unik, aktif, dan khas secara interpretatif (*interpretatif understanding*); (4) Mampu menyajikan makna-makna yang berkembang di luar makna umum; (5) Mampu membangun dialektika antara individu dan lingkungan hingga mencapai keseimbangan dalam memahami fenomena sosial; (6) Mampu memahami aktivitas manusia sebagai sesuatu yang bermakna bagi aktor dalam masyarakat.

Bab VII

INTEGRASI ILMU DAN AGAMA

A. DISKURSUS ALTERNATIF ILMU PENGETAHUAN

Kondisi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sangat pesat. Namun hal ini diimbangi dengan keadaan yang memprihatinkan akibat hegemoni ilmu-ilmu pengetahuan Barat. Ilmu pengetahuan Barat yang berkembang pesat condong ke arah sekuler menjadi kiblat ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Banyak ilmu pengetahuan di Barat yang tidak sesuai diterapkan di beberapa negara yang berbeda pandangan dengan Barat. Semua belahan dunia merujuk pada ilmu pengetahuan yang berkembang. Di Barat tawaran konsep telah menarik perhatian cendekiawan dunia untuk mengadopsi ilmu-ilmu Barat.

Melihat kondisi ilmu pengetahuan yang demikian, perlu beberapa perombakan. Pendidikan merupakan tonggak perubahan pandangan kelimuan tersebut. Mahasiswa, guru dan dosen merupakan agen yang sesuai untuk melakukan perubahan. Melalui mereka, perubahan dapat diawali dengan perombakan kurikulum pendidikan, penemuan teori ataupun konsep baru, serta gerakan akademik di dalam kampus.

Memperhatikan wajah Asia sendiri, kawasan ini merupakan salah satu bagian yang mengadopsi ilmu-ilmu “ala” Barat. Penjajahan secara kasat mata di Asia sudah tidak kita saksikan lagi. Namun hal itu tidak berarti bahwa penjajahan telah usai. Di era ini bahkan penjajahan lebih tajam dilakukan oleh bangsa Barat. Sekian tahun lamanya penjajahan fisik dan kasat mata terlihat dahulu, saat ini beralih dalam konteks penjajahan ilmu, teknologi dan akademis.

Pada era ini, ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial di Asia sedang dilanda krisis. Ilmu pengetahuan di Asia saat ini tidak dapat hadir sebagai ilmu pengetahuan yang lahir dari historis, budaya dan nenek moyang sendiri. Doktrin ilmu Baratlah yang telah mengambil andil dalam ilmu pengetahuan di Asia. Ilmu pengetahuan Barat menjadi kiblat rujukan baik dari konsep, teori maupun metodologinya. Buku-buku akademis banyak digunakan dari Barat. Teks-teks dan buku-buku lama 'ala' Barat yang menjadi rujukan pendidikan di Asia.

Dikuatkan kembali dengan anggapan bahwa orang-orang Asia dan non-Barat tidak dapat berperan aktif dan hanya pasif tanpa otonomi dalam kancah dunia. Sudut pandang orang Asia dan non-Barat disepelekan dan tidak diperhatikan. Muncul adanya *Orientalisme* dan *Eurosentrisme*. *Orientalisme* merupakan anggapan bahwa Barat lebih unggul dari Timur, sedangkan *Eurosentrisme* memiliki anggapan bahwa Barat lebih unik dan superior dari Timur. Itulah mengapa filsafat Islam-Arab direndahkan sekadar sebagai perantara warisan Yunani ke Eropa. Ilmu pengetahuan Islam tidak ada harganya di mata arat. Pengaruh warisan Yunani ialah penciptaan borjuis yang jujur, bebas dari prasangka religi abad pertengahan (Syed Farid Alatas, 2010:32).

Ilmu pengetahuan Barat telah syarat penghakiman bahwa wajah ilmu pengetahuan Asia dan non-Barat merupakan ilmu terbelakang. Selain itu, beberapa ilmu pengetahuan Barat tidak dapat diterapkan sesuai *culture* budaya Asia. Menurut Yasir Arafat (2011), bahwa beberapa kata kunci dalam ilmu sosial di Barat sungguh tidak memadai untuk diterapkan di Asia. Misalnya saja konsep 'religi' yang sering dipakai oleh para antropolog dan sosiolog untuk melihat 'agama' di barat, hal ini di Asia atau non-Barat tidak sama dengan agama. Ini jelas-jelas memperlihatkan adanya kesenjangan antara Barat dan Timur. Ilmu pengetahuan

Barat juga diarahkan untuk menguasai alam yang akhirnya condong pada ketidakpercayaan Tuhan (Yasir Arafat. 2011).

Di kalangan umat Islam sendiri sebagai umat mayoritas tidak berani untuk mengkritik Barat. Westernisasi telah berhasil masuk dalam pemikiran orang Islam. Barat memiliki otonomi yang kuat dan vokal untuk mengkritik Asia, non-Barat maupun kaum muslim. Menurut AM Saefuddin (AM Saefuddin, 2010: xix) setelah sekularisasi, saat ini program Barat ialah liberalisasi atau dekonstruksi cara pandang muslim dalam prinsip-prinsip fundamental. Dengan cara ini buku tidak diseleksi tetapi dilawan dengan buku. Hal ini telah menghegemoni bahwa kita akan dapat maju apabila meniru Barat. Tidak meniru ataupun bahkan kontra Barat maka ia dianggap tidak maju dan terbelakang.

Ilmu pengetahuan Barat modern sekular merupakan tantangan bagi peradaban Timur saat ini, khususnya umat Islam. Peradaban Barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis. Tak hanya salah memahami makna ilmu, peradaban Barat juga menghilangkan maksud dan tujuan ilmu. (AM Saefuddin, 2010: 56). Memang peradaban Barat telah banyak memberikan manfaat dan kemajuan, tetapi juga telah melakukan banyak musibah dan kerusakan. Ilmu pengetahuan Barat harus bisa diseleksi karena sebagian ada yang bertolak dengan ajaran agama.

Problem utama di sini bukan dikarenakan kebodohan, tetapi penjajahan intelektual yang menyebabkan kekeliruan. Bangsa Asia tidak bodoh, hanya saja karena ketergantungan dengan ilmu pengetahuan Barat secara terus menerus mengakibatkan kekeliruan. Beberapa konsep keilmuan ditawarkan Barat. Misalnya saja konsep demokrasi yang menghargai persamaan derajat dan hak, isu-isu HAM. Semua itu menjadi salah satu alat menghegemoni bangsa-bangsa Asia, non-Barat dan Islam sendiri.

Tidak dapat dielakkan lagi, walaupun dengan keadaan seperti itu, Asia tidak dapat lepas dari penjajahan dan kolonialisme ilmu pengetahuan 'ala' Barat. Ilmu pengetahuan ala Barat ini juga telah melahirkan ilmu sosial yang otonom, bahkan menuntut untuk diikuti. Asia tidak tidak mampu membangkitkan khasanah keilmuannya sendiri dikarenakan telah terhegemoni bahwa ilmu pengetahuan Baratlah satu-satunya jalan kemajuan.

Menurut (Syed Farid Alatas, 2010: 217), perlu ada sekelompok minoritas aktif keilmuan sosial di setiap universitas besar di Asia yang peduli dengan beberapa masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Perlu ada pihak-pihak yang tertarik meninjau ulang literatur diagnostik dan perspektif masa lalu, dan memiliki perhatian serta kemauan untuk menumbuhkan hal baru dalam konsep, kategori, metode dan teknik serta agen riset.

Disini mahasiswa, guru dan dosen sebagai agen yang terlibat langsung dalam pendidikan, diharapkan mampu menerapkan dan menyeleksi ilmu pengetahuan yang '*Baratisme*'. Mereka memiliki peran yang besar dalam mampu untuk mewujudkannya. Ilmuan-ilmuan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai peluang besar untuk menemukan konsep, teori, metode maupun riset yang berakar dari budaya dan historis Asia sendiri. Tugas ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi menguniversalkan ilmu pengetahuan Asia. Syed Farid Alatas juga mengusulkan agar *Eurosentrisme* dapat dinetralisasi pada tingkatan aktivitas ilmu sosial, dengan cara:

Pertama, yang digarap adalah metateori. Yang dimaksud metateori di sini ialah penggalakan studi refleksi atas teori sosial serta pendalaman kajian tentang struktur dasar teori atau konteks sosial kemunculan teori. Yang kedua, membekali mahasiswa sebuah pemahaman mengenai perjumpaan antar peradaban, asal-usul modernitas yang multibudaya dan

aneka sudut pandang.

Menetralkan *Eurocentrisme* juga perlu pengenalan, sosialisasi dan penyebaran ide-ide non-Barat. Cendekiawan Asia tidak mengadopsi begitu saja dan tergantung pada ilmu-ilmu ala Barat. Mereka harus mampu memproduksi ilmu pengetahuan sendiri yang mencirikan non-Barat. Kita mampu mengambil ilmu-ilmu yang memang sesuai dengan peradaban asia dan non-barat, namun menyeleksi yang tidak sesuai dengan peradaban khas kita.

Menengok dari sisi lain pendidikan sebagai perubahan, agama juga memiliki andil yang sangat besar dalam menetralisasi ilmu pengetahuan Barat. Agama yang bersumber dari wahyu Tuhan dapat digunakan sebagai benteng ilmu pengetahuan yang sekuler dan merusak alam. Agama merupakan penyeimbang dalam perkembangan ilmu yang bersumber dari akal manusia agar tetap pada koridor yang wajar. Yang perlu dilakukan di sini ialah memadukan sistem pendidikan dengan agama. Hal ini dapat berupa perpaduan antara pendidikan Islam dan pendidikan sekuler. Adanya pelajaran-pelajaran keagamaan bagi siswa akan menjadikan pada diri mereka tertanam keyakinan akan agama dan warisan budaya yang memunculkan kepercayaan diri untuk menghadapi pengaruh-pengaruh modernisasi Barat.

Islamisasi di kampus juga merupakan alternatif, atas berkembangnya hegemoni Barat. Melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi antar aktivis dakwah di kampus sehingga memiliki pandangan yang positif terhadap sains dan teknologi serta memiliki landasan agama yang kuat. Serta dengan memfasilitasi sarana dan prasarana kader-kader cendekiawan berwawasan keislaman. Kader-kader tersebut dituntut untuk menyebarkan ide-ide baru dan metodologi sains dan teknologi yang berbasis keagamaan (AM Saefuddin, 2010:10-11).

B. PANDANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN ISLAM

Menurut Ziauddin Sardar hubungan ilmu pengetahuan dan Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (Rohadi Awaludin dalam pustaka nomor 3, 2004: 5) :

Pertama mengenai kelompok yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan netral dan universal. Mereka mencari rumus-rumus Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Kelompok ini sering dinamakan Buchailisme. Al-Quran yang merupakan wahyu Allah mempunyai kebenaran yang hakiki. Namun dari pendapat ini Sardar memberikan kritikan mengenai Al-Quran yang dilihat sebagai kitab ilmu dan kitab suci petunjuk dari Allah. Umat Islam condong melenceng dari makna esensi Al-Quran. Mereka memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman menafsirkan ilmu pengetahuan, bukan sebagai petunjuk hidup dunia akhirat. Tujuan pengembangan Iptek pun dibatasi dengan kitab suci Al-Quran, sehingga manusia kurang kreatif mengembangkan ilmu pengetahuannya.

Yang kedua, pandangan yang tetap mempertahankan netralitas dan universalitas ilmu pengetahuan untuk cita-cita Islam dan masyarakat. Hasyimi menganjurkan agar Ilmuan muslim menghilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan Barat. Dalam pandangan ini sardar mengkritisi bahwa pandangan ini terlalu menganggap remeh ilmu pengetahuan. Ilmu modern yang bersumber dari ilmu pengetahuan Barat akan menghancurkan nilai yang terkandung dalam Islam.

Yang ketiga, pandangan yang tidak yakin dengan netralitas dan universalitas ilmu pengetahuan. Pendapat yang terbentuk dari pandangan ini yaitu ilmu pengetahuan Barat dibangun dengan cara pandang filosofi barat sendiri. Oleh karena itu pandangan yang ketiga ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan perlu dibangun dengan cara pandang Islam.

C. TAUHID SEBAGAI PRINSIP INTEGRASI ILMU DAN ISLAM

Konsep tauhid dalam Islam diambil dari lafal “La Ilaha Illallah” yang berarti bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lafal “La Ilaha Illallah” telah menjadi prinsip mendasar dari agama Islam yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Para filosof muslim mempunyai tafsir terhadap makna “La Ilaha Illallah” sebagai keesaan Tuhan. Tuhan haruslah tunggal tidak boleh ada Dzat lain selain Dzatnya sendiri. Tuhan tidak berjenis dan tidak berspesies karena pada esensinya Tuhan itu kesatuan.

Menurut para teolog lafal “La Ilaha Illallah” berarti tidak ada realitas sejati kecuali Allah. Karena pada dasarnya alam semesta ini tidak memiliki realitas. Hanyalah Tuhan satu-satunya realitas sejati yang kebenaran, yang akan memberikan realitas pada alam. Alam hanyalah sarana untuk mengaktualkan ilmu yang bersumber dari Dzat Yang Maha Agung. Alam tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri tanpa realitas dari Tuhan. Jadi, alam bukanlah miliknya sendiri tetapi merupakan pemberian Tuhan yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu manusia dalam memanfaatkan alam tidak boleh melebihi dari batas Tuhan. Karena pada dasarnya nanti alam akan diambil kembali oleh Tuhan. Tuhan merupakan pemilik sejati wujud alam semesta. Sedangkan alam, apabila dilepaskan kaitannya dengan Tuhan hanya memiliki potensi murni, yang oleh Aristoteles disebut materi awal. (Mulyadhi Kartanegara, 2005: 35).

Dalam kaitannya dengan tauhid yang memposisikan kekuasaan itulah harus bersumber pada Allah. Demikian juga hukum dan keadilan sosial dunia kehidupan manusia dan khususnya umat Islam dihadapkan pada satu realitas bahwa praktek kekuasaan dan juga hukum serta keadilan sosial seringkali tidak bersumber pada ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan lebih dari itu, ketidakadilan di bidang sosial, hukum

dan kekuasaan mendapatkan legitimasi dari ilmu-ilmu yang sekuler. Pada saat ini dunia Islam dihadapkan pada banyak fitnah. Fitnah itu meliputi terorisme dan pemberontakan kaum Islam terhadap pemerintahan yang jauh dari konsep Islam. Dengan tuduhan melindungi Islamisme radikal kaum muslim dihancurkan oleh penguasa tunggal peradaban barat yang sekuler. Oleh karena itu perlunya tauhid untuk menjembatani permasalahan tersebut. Konsep tauhid berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman.

Untuk menghadapi Globalisasi peradaban Sekuler, maka ada revolusi dari peradaban Islam. Di dalam Era teknologi yang semakin maju, sistem kapitalisme merangsang gaya hidup modern yang konsumtif dan materialistis. Dengan kata lain, budaya modern memfiltrasi agama yang sebenarnya adalah sumber kebenaran. Berkembangnya sistem pasar bebas, menjadi bumerang peradaban Islam. Menghadapi perkembangan tersebut, Islam memiliki pandangan alternatif dengan kembali kepada relasi Allah.

Dalam hal ini, tauhid sangat berperan sebagai sentralitas keimanan kaum muslim perlu dikokohkan untuk menopang peradaban modern yang telah jauh dari agama, terutama agama Islam. Oleh karena itu pendidikan dan dakwah Islami perlu diperkuat dan disebarluaskan untuk membentuk peradaban Islam yang baru. Peradaban islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan syariat agama Islam. Dalam perspektif ini, teknologi harus diintegrasikan dengan rasa syukur sebagai pengabdian kita kepada Allah SWT. Begitu juga sains dan seni harus diintegrasikan ke dalam belajar sebagai bagian dari kesaksian kepada kebenaran yang hakiki (Armahedi Mahzar, 2004:263)

D. KONSEP ISLAMISASI IPTEK

Pada abad 15 H, ada upaya umat Islam untuk bangkit

kembali dalam berbagai macam prestasi tajam diraih beberapa abad sebelumnya. Momen itu juga yang dicoba digunakan untuk menggali kembali salah satu pencapaian umat Islam yang monumental dalam budaya keilmuan yang sangat tinggi serta sumbangan yang pernah diberikan dalam perkembangan peradaban modern (Chairil Anwar, 2004:2). Dari sejarah yang ada, umat Islam beranggapan bahwa mereka mampu menghidupkan kejayaan Islam pada abad lalu.

Masalah berawal dari apakah ilmu pengetahuan itu sebenarnya sudah diIslamkan atau belum. Hal ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu berasal dari al-Quran. Dalam kitab suci ini telah terangkum mengenai alam semesta. Kitab yang bersumber dari wahyu Allah dan hukum-hukum Allah. Keragu-raguan bahwasanya ilmu pengetahuan itu sudah diIslamkan belum, dikarenakan ada ketidak sesuaian teori ilmu dengan agama Islam sesuai dalam Al-Quran. Cara berfikir yang menyamakan ilmu pengetahuan dengan fenomena alam pun menjadi pendorong anggapan bahwa Ilmu itu belum diIslamkan.

Mengenai keberadaan Tuhan yang tidak logis, hal ini tidak boleh dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu alam. Objek ilmu pengetahuan terbatas pada alam semesta. Ilmu pengetahuan diharamkan untuk menyentuh keberadaan Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini.

Ilmu pengetahuan di Barat, membatasi objek dan kenyataan berdasar materi yang dikandung ataupun dihasilkannya. Namun cara pandang orang Barat yang materialistik-sekularistik ini berbeda dengan cara pandang orang Islam secara transendental. Ilmuan Barat kokoh pada pendapatnya bahwa ilmu pengetahuan dibatasi hal yang nyata, dan pasti. Ilmuan beranggapan bahwa ilmu itu lahir dari diri sendiri tanpa harus menguak secara dalam fenomena alam dibalik ilmu ini.

Di dalam ilmu pengetahuan Barat, satu-satunya cara mendapatkan ilmu dan kebenaran itu melalui metode penelitian secara rasionalisme dan empirisme. Ilmu pengetahuan barat dimanfaatkan hanya untuk mengejar materi dan kesenangan dunia dengan tidak memikirkan kehidupan akhirat ataupun mudharatnya. Francis Bacon mengatakan bahwa ilmu pengetahuan ada untuk meningkatkan kemampuan manusia. Ia lebih menegaskan lagi bahwa ilmu itu akan bermanfaat jika mampu memuaskan kekuasaan manusia dan dijadikan doktrin bagi kekuasaannya. Konflik antara sains dan agama sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, harus ada jalan tengah untuk memecahkan masalah tersebut.

Ilmu pengetahuan di Barat bebas nilai, karena ilmu pengetahuan adalah nilai itu sendiri. Hal ini mengakibatkan tidak ada keterbatasan dalam mengembangkan ilmu di sana. Manusia bebas mengeksploitasi alam semesta sebatas demi kebutuhan manusia tanpa mempertimbangkan dampak dari ilmu tersebut. Ilmu di Barat berkembang tanpa batas-batas hukum agama sehingga menjadi sekuler.

Proses Islamisasi iptek menurut Mulyanto, merupakan proses pengembalian atau pemurnian ilmu pengetahuan yang ada pada prinsip yang hakiki yaitu tauhid sebagai makna kebenaran dan kesatuan sumber. Ketiga proses ini diturunkan dalam ontologi, epistemologi, aksiologi. (Rohadi Awaludin dalam Mulyanto, 2004: 4).

Prinsip pertama yaitu tauhid. Ilmu pengetahuan tidak hanya dimanfaatkan secara praktis untuk kebutuhan manusia, tetapi juga harus dikuak dibalik fakta empirisnya. Allah adalah sumber dari asal ilmu pengetahuan. Jadi seseorang yang mengembangkan ilmu pengetahuan diharapkan dapat meningkatkan keyakinannya kepada Allah.

Prinsip yang kedua yaitu kebenaran ilmu yang

transendental akan membebaskan ilmu pengetahuan dari sekulerisme. Dengan begitu tidak akan ada lagi perbedaan kebenaran alamiah dan kebenaran religius. Karena kebenaran itu hanya ada tunggal dari Allah. Sains akan memperoleh karakternya yang rasional selama peradaban Islam. Rasional sains ini tidak akan terlepas dari rasionalitas religius karena ada hubungan antara sains, filsafat, agama dan teologinya.

Prinsip ketiga menjadikan alam dan Al-Qur'an sebagai ilmu pengetahuan. Jadi kedua sumber itu mempunyai keistimewaan dan posisi utama dalam memperoleh kebenaran. Ayat-ayat Allah selalu benar dan tidak disangsikan lagi, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kontradiksi. Jika ada pertentangan, kesalahan itu ada pada manusiannya sendiri bukan pada ayat-ayat Al-Qur'an.

Tabel 3. Tabel Paradigma Integrasi Sains Islam

	Epistemologi/ Shufi	Aksiologi/ Fiqhi	Ontologi/ Tauhid
Sumber	Subjek <i>Ruhi</i>	Transedental <i>qurani</i>	Transedensi <i>Dzatullah</i>
Nilai	Prinsip <i>qalbi</i>	Universal <i>Sunni</i>	Holarki <i>Shifatullah</i>
Informasi	Teori dan Fakta <i>'aqli</i>	Kultural <i>ijtihadi</i>	Kreativitas <i>Amrullah</i>
Energi	Eksperimen <i>Nafsi</i>	Sosial <i>jima'i</i>	Sirkulasi <i>Sunnatullah</i>
Materi	Instrumen/Objek <i>Jismi</i>	Instrumental <i>'urfi</i>	Sistem-sistem <i>khalqillah</i>

Sumber: Armahedi Mahzar, 2004:22

Menurut Al Faruqi, 1996: 98-118) terdapat dua belas proses islamisasi yang harus dilakukan:

- 1) Penguasaan disiplin ilmu modern melalui penguraian kategoris. Disiplin ilmu dalam tingkat kemajuannya sekarang di Barat harus dipecah-pecah menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip metodologi-metodologi, problema-problema dan tema-tema.
- 2) Survei disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu harus disurvei, dan harus ditulis dalam bentuk bagan mengenai asal usul dan perkembangannya beserta pertumbuhan metodologisnya, perluasan cakrawala wawasannya dan tak lupa membangun pemikiran yang diberikan oleh para tokoh utamanya. Langkah ini bertujuan menetapkan pemahaman muslim akan disiplin ilmu yang dikembangkan di dunia Barat.
- 3) Penguasaan terhadap khasanah Islam dengan cara yang sama. Apa yang diperlukan di sini adalah antologi-antologi mengenai warisan pemikir muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu.
- 4) Penguasaan terhadap khasanah Islam untuk tahap analisis. Jika antologi-antologi telah disiapkan, khasanah pemikir Islam harus dianalisa dari perspektif masalah-masalah masa kini.
- 5) Penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Relevansi dapat ditetapkan dengan mengajukan tiga persoalan. Pertama, apa yang telah disumbangkan oleh Islam, mulai dari Al-Qur'an hingga pemikiran-pemikiran modernis, dalam keseluruhan masalah yang telah dicakup dalam disiplin-disiplin ilmu modern. Kedua, seberapa besar sumbangan itu jika dibandingkan dengan hasil yang telah diperoleh oleh disiplin modern tersebut. Ketiga, Apabila ada bidang masalah-masalah yang sedikit diperhatikan atau sama sekali tidak diperhatikan oleh khasanah Islam, ke arah mana kaum muslim harus

- mengusahakan untuk mengisi kekurangan itu, juga memformulasikan masalah-masalah dan memperluas visi disiplin tersebut.
- 6) Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Jika relevansi Islam telah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisa dari titik pijak Islam.
 - 7) Penilaian kritis terhadap khasanah Islam. Sumbangan khasanah Islam untuk setiap bidang kegiatan manusia harus dianalisa dan relevansi kontemporeranya harus dirumuskan.
 - 8) Survei mengenai problema-problema terbesar umat Islam seperti masalah politik, sosial ekonomi, intelektual, kultural, moral dan spiritual dari kaum muslim.
 - 9) Survei mengenai problema-problema umat manusia.
 - 10) Analisa kreatif dan sintesa. Pada tahap ini perlu dilakukan sintesa antara khasanah Islam dan disiplin ilmu modern.
 - 11) Merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam kerangka kerja (*framework*) Islam. Keseimbangan antara khasanah Islam dengan disiplin modern telah tercapai, maka buku-buku teks universitas harus ditulis untuk menuangkan kembali disiplin-disiplin modern dalam cetakan Islam.
 - 12) Menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan. Untuk menyebarkan bisa melalui konferensi-konferensi dan seminar untuk melibatkan berbagai ahli di bidang ilmu yang sesuai dalam merencanakan pemecahan masalah-masalah.

1. Struktural Transendental

Kata transenden dalam bahasa latin adalah transenderse yang mempunyai arti memanjati di atau ke atas. Dalam kamus Webster, *transendent* memiliki makna yang abstrak, metafisis

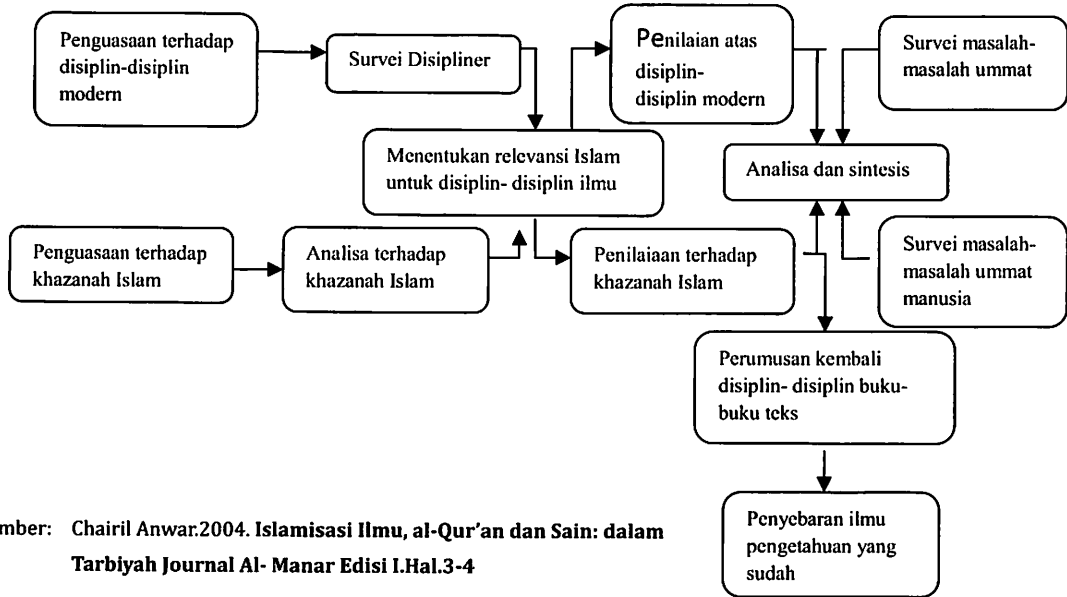
dan melampaui. Cara berfikir transendental berfikir tidak hanya duniawi. Struktur transendental merupakan suatu analisis strukturalis yang dibingkai atau yang diarahkan oleh hal-hal yang bersifat transendent. Dalam hal ini adalah wahyu atau tradisi profetik. Menurut Kuntowijoyo (terinspirasi dari Ali Imran : 10), cara berfikir profetik mempunyai ciri berfikir emansipasi atau humanis, transendensi, dan liberasi.

Teori *strukturalisme* terkenal dalam kajian ilmu politik, sastra dan antropologi. Makna struktur secara etimologis mengandung arti secara konkrit merupakan bangunan atau fondasi dan secara abstrak merupakan social structure (*upper class, middle class, low class*). Menurut Jean Piagette ada 3 ciri strukturalism yaitu: mengandung arti keseluruhan, perubahan bentuk, dan *self regulation*. Keseuruhan maksudnya ada banyak individu yang saling terkait dan saling berinteraksi sehingga pada akhirnya terbentuk struktur, juga harus ada ikatan ideologi.

Analisis strukturalisme mempelajari unsur tetapi ia selalu diletakkan di bawah suatu jaringan yang menyatukan unsur-unsur itu. Unsur hanya bisa dimengerti melalui keterkaitan. Strukturalisme tidak hanya mencari struktur dipermukaan tetapi di bawah atau di balik fakta empiris atau yang tidak nampak. Berusaha mencari de-structure, bahkan lebih dalam lagi mencari kekuatan pembentuk struktur. Misalnya dalam kelas sosial tidak hanya mempelajari siapa saja orangnya tetapi bagaimana ekonominya juga mempelajari mengapa terjadi struktur sosial. Ada pembentuk struktur dalam kelas sosial, hal itu tidak terjadi atau terbentuk dengan sendirinya, namun pasti ada faktor pembentuk kelas sosial tersebut. Strukturalisme memperhatikan unsur-unsur sinkronis artinya unsur-unsur dalam waktu yang sama bukan perkembangan dalam waktu.

Transformasi atau perubahan bentuk maksudnya ada perubahan struktur, selalu ada perubahan dan perubahan

gambar 7
Skema Program Al- Faruqi untuk Islamisasi Pengetahuan



Sumber: Chairil Anwar.2004. Islamisasi Ilmu, al-Qur'an dan Sain: dalam
 Tarbiyah Journal Al- Manar Edisi I.Hal.3-4

itu ada yang baik tetapi ada juga perubahan yang buruk. Perubahan pada intinya mendekati titik yang fana atau akhir. Dalam transformasi ini struktur dapat memperkaya diri, menambah bahan-bahan baru serta memperluas jaringan sosial. *Self Regulation* maksudnya penambahan struktur atau jaringan, tetapi berada di dalam struktur bukan di luar struktur. Penambahan elemen dalam struktur adalah dalam rangka untuk melestarikan struktur, bukan dalam rangka merusak atau merubah struktur.

2. Benang Merah antara Al-Fatihah dan Hanacaraka

Al-Fatihah surat terpenting dalam Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan diantaranya merupakan surat pertama di dalam Al-Quran, sering dibaca oleh umat manusia, surat yang belum pernah diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan juga merupakan intisari dari Al-Quran. Kandungan dalam surat Al-Fatihah dapat dikaji secara filsafat dengan mencakup aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Bagian pertama Al-Fatihah memuat tiga kata kunci yaitu Allah, Al-Rahman, dan Al-Rahim. Karena Allah merupakan awal segala yang ada, maka ayat pertama dapat diklasifikasikan sebagai objek kajian ontologi. Kata Allah dalam ayat tersebut merujuk pada suatu zat Tuhan Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, permulaan, dan Yang Maha Hidup. Sedangkan dilihat dari konsep manusia dalam aksara Hanacaraka dan menurut Ranggawarsita, Hana di sini berarti hidup atau "*hayyu*". Dengan demikian ada benang merah antara kata Allah dalam ayat pertama surat Al-Fatihah dengan unsur "*Hana*".

Ditinjau dari aspek epistemologi bagian kedua ayat 2 Al-Fatihah memuat sifat-sifat Allah yaitu Al-Hamd, Al-Ilah dan Al-Rabb atau sifat *Uluhiyyah* dan *Rubbubiyah*. Ada beberapa sifat Allah yang tercantum dalam ayat 2, 3, dan 4 yaitu

Pencipta, Pengasih, dan Penyayang, serta Penguasa atau Pemilik. Makna sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat Al-Fatihah tersebut mempunyai benang merah dengan ayat-ayat Allah yang terdapat pada diri manusia yakni unsur "*cipta*", "*rasa*", dan "*karsa*". Sifat Ar-Rabb pada ayat 2 yang artinya Maha Pencipta dan Maha Pendidik memiliki keterkaitan dengan unsur "*cipta*" yang ada pada manusia. Melalui sifat Al-Rabb tersebut, Allah mencipta, mengatur, memelihara, mengawasi, menumbuhkan, mengembangbiakkan, sumber segala daya dan kekuatan seluruh alam. Sementara itu melalui akalunya, manusia berusaha mengenal dan memahami hukum-hukum yang mengendalikan jagad raya ini, dan dalam batas-batas tertentu manusia sanggup menciptakan sesuatu berupa karya-karya cipta seperti gedung, jembatan, komputer, pesawat dan lain-lain. Oleh karena itu ada keidentikan fungsi antara Al-Rabb yang tercantum dalam ayat 2 Surat Al-Fatihah dengan unsur "*cipta*" yang secara fisik termanifestasikan dalam bentuk otak yang terdapat di kepala kita. Dalam ayat 3 Al-Fatihah terdapat sifat Allah Al-Rahman Al-Rahim yang berarti Maha Pengasih dan Maha Penyayang memiliki keterkaitan dengan unsur "*rasa*" yang ada di dada manusia. Melalui unsur rasa manusia dapat menyayangi dan mengasihani sesamanya. Sedangkan Al-Rahman merupakan cinta Allah yang universal dan meliputi segala sesuatu.

Di dalam ayat 4 Al-Fatihah kata Al-Malik yang berarti "*Yang Menguasai atau Yang Memiliki*" mempunyai keterkaitan unsur "*ruh*" atau "*karsa*" yang berarti semangat, daya, dan hidup yang ada dalam tubuh manusia. Manusia akan bangkit semangatnya karena dorongan rasa memiliki dan menguasai sesuatu. Ada hubungan yang erat antara kekuasaan, kepemilikan, ego, karsa, kehendak, kekuatan dan semangat hidup. Jadi manusia itu diciptakan dengan citra Allah atau cerminan dari sifat-sifat luhur Allah.

Dalam ayat 5 menyatakan hanya kepada Allah

(seharusnya) manusia menyembah, mengabdikan dan memohon pertolongan. Di satu sisi ayat ini menyatakan kelemahan manusia memohon pertolongan, di sisi lain ayat ini menyatakan kemuliaan Allah sebagai Penolong. Unsur "*nafsu*" yang hina dan lemah seakan-akan berlawanan dengan sifat Allah yang Maha Mulia, zat yang satu-satunya disembah serta Maha Pemberi Pertolongan.

Dalam ayat 6 mempunyai makna satu sisi manusia itu buta dan tersesat, pada sisi lain Allah itu Maha Tahu atau Maha Pemberi Petunjuk atau sebagai cahaya. Unsur manusia yang siap menerima petunjuk Allah (Al-Hadi) itu adalah hati nurani atau qalbu yang dalam aksara Hanacaraka ada dalam kata "*Padajayanya*". Unsur-unsur manusia berupa Hana, Cipta, Rasa, dan karsa atau ruh yang terdapat dalam tubuh manusia seolah-olah merupakan cerminan dari sifat-sifat luhur Allah Yang Maha Pencipta (Ar-Rabb), Maha Pengasih dan Maha Penyayang (Al-Rahman dan Al-Rahim) dan Maha Kuasa, Maha Pemilik (Al Malik) yang terdapat dalam ayat 1-4 Al-Fatihah. Ada pula pertentangan antara unsur manusia berupa nafsu yang mempunyai sifat hina dan lemah dengan sifat Allah yang Maha Mulia dan Maha Penolong.

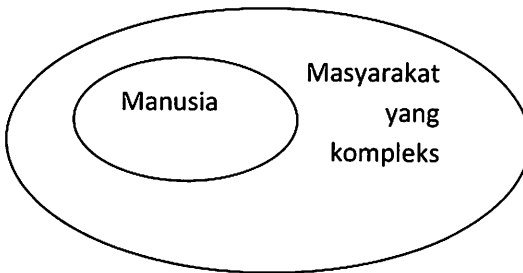
Dilihat dari filsafat ilmu, bagian ketiga atau ayat kejuh dapat dikategorikan sebagai aksiologi yaitu jasad atau "*magabathanga*". Jadi ada keterkaitan antara ayat 7 tentang Ash-shirat al-Mustaqin sebagai jalan yang benar dengan konsep Hanacaraka dalam kata "*magabathanga*" yaitu mati. Diharapkan manusia yang mati bisa mengikuti jalan yang benar dan lurus.

Bab VIII

FILSAFAT ILMU SOSIAL

Sebelum jauh pada pembahasan apa itu filsafat ilmu sosial, kita akan mengkaji terlebih dahulu apa itu ilmu sosial. Ilmu sosial pada dasarnya adalah ilmu yang membahas dan mempelajari manusia, perilakunya, serta interaksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu sosial mempelajari hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya. Obyek ilmu sosial ialah manusia beserta lingkungannya. Lingkungan disini bukan berarti hanya terpaku pada tempat tinggal, tetapi juga manusia lain dan obyek fisik di sekitarnya.

gambar. 8



Dalam gambar tersebut jelas interaksi antara manusia dan manusia yang membentuk masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan dan pasti berinteraksi dengan manusia lain. Hal itulah yang menjadi bahasan dalam ilmu sosial maupun filsafat sosial. Ilmu sosial mengkaji masyarakat dari beragam karakter yang ada. Manusia sangat beragam

dan kompleks, maka menimbulkan gejala yang kompleks pula. Oleh karena itu dalam mengkaji tidak hanya dapat menggunakan satu disiplin ilmu saja yaitu ilmu sosial, tetapi juga disiplin ilmu lain seperti filsafat, pendidikan, psikologi dan lain sebagainya.

Ilmu sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Hatta menyampaikan tiga kegunaan ilmu sosial, yaitu:

1. *Critical discourse*

Keabsahan penelitian ditentukan oleh keterikatan pada semua keharusan akademis

2. *Academic enterprise*

Memosisikan bahwa ilmu-ilmu sosial tidak bebas nilai. Ilmu sosial yang ada memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ilmu sosial tidaklah terlepas dari nilai yang melekat padanya.

3. *Applied Science*

Ilmu sosial diperlukan untuk hal-hal praktis membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Ilmu sosial ini digunakan untuk mendeskripsikan, memprediksi dan menjawab isu-isu sosial yang muncul. Jadi ilmu sosial mampu menggambarkan fenomena yang terjadi. Dari fenomena tersebut dijadikan acuan dalam mengkaji dan menatap masa yang akan datang. Dengan begitu manusia dapat berfikir untuk masa mendatang, mengurangi kesalahan dan menjadikan pelajaran untuk kebaikan ke depannya. Dari apa yang terjadi masa lalu dijadikan batu pijakan untuk pelajaran yang akan datang, sehingga manusia tidak mengalami kegagalan kesekian kalinya.

Filsafat sosial adalah suatu wacana yang mengkaji isu-isu fundamental berkaitan dengan keilmuaan sosial. Filsafat ilmu sosial mengkaji secara menyeluruh tidak parsial dan

secara radikal atau mendalam sampai ke akar-akar masalah sosial yang ada. Isu-isu sosial yang ada dapat dikritisi dengan filsafat sosial. Dengan begitu, seseorang akan menggunakan akalannya untuk berfikir secara rasional dan sistematis tertuju pada sistem tertentu menanggapi permasalahan yang ada.

Filsafat sosial perlu dipahami secara historis untuk melihat fenomena sosial yang ada dalam kehidupan saat ini. Segala fenomena yang terjadi harus dikaitkan dengan masa lalu dan sejarah yang ada, agar pengkajiannya sesuai dengan kenyataan dan memahami fenomena ke depan. Mustahil tatkala memahami filsafat sosial saat ini tanpa ada pengetahuan dari akar-akar filsafat sosial di masa lalu. Mustahil memahami struktur suatu masyarakat tanpa mengetahui masa silam yang lalu.

Dalam mengkaji filsafat sosial perlu kita mengkaji sejarah filsafat sosial yang ada di muka bumi. Filsafat sosial lama berpijak pada isu-isu tentang yang benar dan salah dalam hal pendistribusian tenaga kerja dan hak kepemilikan. Saat ini kajian filsafat sosial bukan hanya mencermati berbagai hal melalui bermacam-macam perspektif melainkan bagaimana dan hal apa yang harus dilakukan.

A. SEJARAH FILSAFAT ILMU SOSIAL

Tidak dapat dipungkiri ilmu telah berkembang sangat pesat dan menguasai hajat hidup manusia. Manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari dosa dan kekeliruan. Sifat tamak dan rakus mendorong pada kehidupan yang memprihatinkan. Tindakan menundukkan manusia atas manusia, pembunuhan dan pembinasaaan manusia oleh manusia tanpa mempedulikan rasa kemanusiaan. Manusia menjadi hal yang sangat mengerikan. Perang Dunia I dan Perang Dunia II merenggut banyak korban tanpa rasa kemanusiaan.

Pada abad ke 20 nasionalisme sangat kuat dibanding sosialisme internasional. Terjadi perpecahan antar kaum sosial demokrat. Loyalitas terhadap negara-negara masing-masing dalam Perang Dunia I lebih tinggi dibanding solidaritas terhadap negara lain. Rasa permusuhan timbul antar negara. Pertentangan antara borjuis dan buruh pun begitu tajam. Kelas buruh terpaksa bergerak di bawah dan para pemimpinnya ada dalam pengasingan. Kaum buruh lebih menginginkan keuntungan ekonomis jangka pendek bersifat praktis dibanding kemenangan jangka panjang yang membawa kebahagiaan. Mereka lebih memilih menerima upah harian yang adil dibanding memperjuangkan penghapusan buruh upah. Keruntuhan Rusia merupakan dampak dari peperangan Jerman. Pemberontakan timbul dari tubuh kaum buruh, petani maupun militer yang membawa koalisi sosialis liberal dan reformis pada kekuasaan, namun keraguan akan kelanjutan perang menimbulkan banyak masalah.

Revolusi sosialis pertama yang berlangsung, dikarenakan meluasnya kapitalisme tidak lagi menjadi mode nasional tetapi mode internasional. Revolusi sosialis harus berskala internasional, mengingat kapitalisme telah mengglobal. Namun kediktatoran proletariat tidak membuka jalan bagi perencanaan sosial yang semakin demokratis, tapi justru mengacu pada kediktatorian oleh kelompok pejabat partai. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi dibatasi. Oposisi pun tidak dapat ditolerensi, bahkan akan dilawan melalui jalan kekerasan. (Supardi, 2011)

Paska Perang Dunia I, terjadi reformasi pada partai-partai sosial demokrat dan buruh. Mereka mulai memainkan peran dalam politik dan pemerintahan. Perluasan partisipasi demokratis membawa pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan juga. Kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Mereka memiliki hak

suara dan hak politik yang setara dengan lainnya. Kaum perempuan Rusia mendapatkan hak politik yang setara melalui revolusi. Namun di beberapa Negara Eropa seperti Swiss dan Belgia, kaum perempuan baru bisa memperoleh hak politik dan hak suara setelah Perang Dunia II.

Pada tahun 1920-an pengangguran membengkak, penutupan dan pemogokkan perusahaan pun terjadi di mana-mana. Krisis ini berlangsung sampai Perang Dunia II. Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan absolut memberikan modal ke seluruh dunia, dan menjadikan basis pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selama pertumbuhan ekonomi ini, terjadilah peningkatan yang pesat, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini disertai dengan pengurangan buruh tani dan peralihan keterlibatan dalam industri.

Dalam bahasan selanjutnya, persoalan mengenai masyarakat seperti apakah yang dikehendaki saat itu dianggap tidak irasional yang muncul dari perasaan pribadi belaka saja. Selain itu, moralitas dianggap sebagai permasalahan individu yang bukan merupakan masalah publik untuk dikaji. Hal tersebut menarik perhatian tajam di Wina terkait *human right*. Klaim liberalism muncul atas nama martabat manusia serta kesetaraan hak demi membebaskan kemanusiaan dari belenggu penindasan politik, ekonomi maupun fisik.

Kapitalis secara filosofis tidak dapat dipertahankan, namun karena masyarakatnya yang tidak bisa lepas dari kapitalisme membuat sulit untuk terlepas dan melepaskan dari belenggu tersebut. Dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai selera, suatu subjek memiliki selera dan kriteria masing-masing.

Setelah tahun 1960-an terjadi peningkatan tajam harga-harga bahan baku yang mencirikan kapitalisme. Kelangsungan hidup manusia pun mengalami banyak ancaman. Bahaya

dan ancaman integrasi bangsa dan kedamaian pun tidak bisa lagi diabaikan. Kaum kapitalis menganggap tenaga kerja merupakan komoditas yang dapat dibeli dan diperlakukan semaunya. Permasalahan politik dalam suatu negara sangat berpengaruh pada kestabilan internasional.

Ditahun 1960-an muncul kaum perempuan aktif dalam melawan penindasan seksual yang masih berlangsung dalam kehidupan, bahkan paska adanya pengakuan hak-hak dan kesetaraan perempuan. Gerakan mahasiswa muncul sebagai aksi kritis terhadap penindasan dan ketidakadilan yang ada. Minoritas-minoritas etnis melancarkan protes melawan diskriminasi resmi dan tidak resmi yang terus berkelanjutan. Kehidupan lebih demokratis dengan adanya kebebasan tiap individu dalam kancah politik maupun pemerintahan.

Dari sejarah filsafat ilmu sosial tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sejarah merupakan silih bergantinya kekuasaan. Sebuah penalaran kritis, untuk mencari kebenaran tentang asal usul sesuatu, proses bagaimana kejadian atau peristiwa itu berlangsung dan terjadi. Sejarah merupakan penghubung masa kini dan masa lalu yang bisa memberi gambaran dan pelajaran di masa depan. Pada perkembangan selanjutnya, segala bentuk aktivitas sosial yang ada harus melihat akar historinya. Masalah-masalah ilmu sosial yang ada dapat dipecahkan secara mendalam dengan mengacu pada perkembangan zaman yang terjadi.

B. PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA ILMU-ILMU SOSIAL

Seorang ilmuwan kenamaan Indonesia Selo Soemardjan, mengekspresikan kegelisahannya tentang perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia yang sangat memprihatinkan, karena sangat minim (untuk tidak mengatakan nihil) kontribusi ilmuwan sosial Indonesia dalam melahirkan

teori-teori sosial yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Kegelisahan intelektual tersebut sudah diteriakkan oleh Selo Soemardjan 22 tahun yang lalu pada suatu forum akademis yang prestisius di Yogyakarta. Kegelisahan intelektual-keilmuan dari Selo Soemardjan hingga hari ini masih tetap relevan untuk dijawab oleh kaum terpelajar Indonesia, karena sampai hari ini belum ada jawaban serius secara akademik yang komprehensif-elaboratif.

Dengan nada yang hampir sama seorang Cendekiawan Muslim Indonesia, Kuntowijoyo, juga memberikan kritik yang tajam tentang perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia. Dalam pandangannya Ilmu Sosial di Indonesia mengalami proses kemandegan bahkan kehilangan kerangka nilai yang mampu mengarahkan kemana transformasi masyarakat di Indonesia digerakan. Dalam kaitan ini untuk memperbaiki kondisi ilmu-ilmu sosial di Indonesia Kuntowijoyo mengusulkan perlunya memberikan ruang untuk hadirnya apa yang disebut dengan Ilmu Sosial Profetik (ISP).

Dalam ruang lingkup yang lebih luas menghadapi kemandegan Ilmu-Ilmu Sosial di Asia, sejumlah intelektual Muslim di berbagai negara memiliki kegelisahan yang sama untuk menghadirkan ilmu sosial yang dapat langsung diterapkan dalam menjelaskan masyarakat Muslim. Pada dekade 1970-an, Ismail Raji Al-Faruqi mengemukakan idenya mengenai islamisasi ilmu-ilmu sosial kontemporer. Untuk mencapai tujuannya itu, Al-Faruqi mendirikan *The Assosiation of Muslim Social Scientists* dan menjadi ketua umumnya antara 1972-1978, kemudian berpartisipasi aktif dalam lembaga internasional *The International Institute of Islamic Thought* (IIIT). Langkah Al-Faruqi menggagas mengenai islamisasi ilmu-ilmu sosial itu menjadi terobosan penting dalam proses interaksinya dengan teori-teori Barat. Gagasan Al-Faruqi itu didukung oleh Naquib Al-Attas yang juga mendorong dilakukan islamisasi ilmu-ilmu secara luas

dengan memasukkan elemen-elemen Islam dalam ilmu-ilmu kontemporer. (Syarifuddin Jurdi. 2011)

Diantara pandangan penting Al Faruqi dan Al Atas adalah berkaitan dengan *Pertama*, fenomena kebiasaan ilmuwan di Negara-Negara Asia untuk menggunakan kategori-kategori, pemilihan masalah, konseptualisasi, analisis, generalisasi, deskripsi, eksplanasi dan interpretasi yang ditiru dari Barat. Sebagian negara dunia ketiga sebenarnya telah berusaha untuk keluar dari *belunggu imperialisme akademis* seperti yang dilakukan oleh intelektual India, China dan juga negara-negara berkembang lainnya, tetapi keinginan itu belumlah dilakukan secara sistematis dan melembaga. Tingkat kebergantungan akademis dipandang paralel dengan tingkat ketergantungan ekonomi. Tingkat kebergantungan ilmuwan sosial negara berkembang menurut catatan Syed Farid Alatas meliputi; 1) kebergantungan pada gagasan; 2) kebergantungan pada media gagasan; 3) kebergantungan pada teknologi pendidikan; 4) kebergantungan pada bantuan riset dan pengajaran; 5) kebergantungan pada investasi pendidikan; 6) kebergantungan ilmuwan sosial Dunia Ketiga pada permintaan Barat akan ketrampilan mereka (Syed Farid Alatas. 2010:56)

Kedua, adalah pencermatan Alatas kebiasaan ilmuwan di Negara-Negara Asia dalam hal proses meniru Barat secara membabi buta. Merespon kondisi kelimuan di Negara Dunia Ketiga tersebut, pada dekade 1970-an Syed H Alatas telah memperkenalkan *teori captive mind* sebagai cara membaca perkembangan ilmu sosial di Dunia Ketiga. Menurut *teori captive mind* bahwa ilmu sosial Nusantara (Indonesia) menjadikorban *orientalisme* dan *Eurocentrisme* yang dicirikan oleh cara berpikir yang didominasi pemikiran Barat dengan cara meniru dan bersikap tak kritis. Peniruan yang tidak kritis tersebut merasuk ke semua tingkatan aktivitas ilmiah, memengaruhi latar masalah, analisis, abstraksi, generalisasi,

konseptualisasi, deskripsi, eksplanasi dan interpretasi (Syed Husen Alatas:11-12). Teori ini dikembangkan bersesuaian dengan pola penyebaran konsumsi di Dunia Ketiga, begitu juga dengan pola imperialisme akademik yang berlangsung di Indonesia.

Berkaitan dengan pentingnya ditumbuhkan sikap kritis, kiranya perlu dicatat bahwa Ilmu sosial Barat tentu lahir dan berkembang dari struktur dan sistem sosial serta pranata sosial yang berbeda dengan masyarakat Indonesia, bahkan para orientalis membaca Timur menurut kategori dan perspektif Barat. Intelektual-akademisi Nusantara terpesona dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial Barat, bahkan isu-isu dan masalah yang menjadi topik kajian para intelektual Barat juga menjadi topik yang ditiru oleh intelektual kita, tanpa memiliki dasar pijakan empiris yang kuat. Keadaan itu terus berlangsung, bahkan setelah lebih dari satu abad ilmu-ilmu sosial berkembang di Nusantara, hingga kini belum ada teori-teori sosial yang dihasilkan oleh intelektual kita dalam rangka menjelaskan kehidupan sosial masyarakat secara memadai. Keadaan ini barangkali rendahnya penghargaan sesama intelektual Nusantara dalam menghargai ide dan gagasan diantara mereka, atau tradisi kutip-mengutip di antara mereka, sehingga ilmu sosial Nusantara tidak pernah mengalami perkembangan, bahkan mereka yang selesai belajar di Barat dengan sangat bangga dan hebat meniruniru dan mengulang-ulang apa yang mereka pelajari di Barat tersebut, tidak muncul kesadaran kritis untuk merumuskan teori-teori sosial yang orisinal dan khas Nusantara (Syarifuddin Jurdi. 2011)

Kendatipun semangat meniru begitu kuat, namun masih ditemukan sejumlah sarjana kita yang konsisten mengembangkan ilmu sosial yang khas, kepada mereka itu kita harus memberi apresiasi yang tinggi. Usaha mengembangkan ilmu sosial alternatif seperti yang pernah

dilakukan Kuntowijoyo dengan Ilmu Sosial Profetiknya, bisa menjadi pilihan pengembangan ilmu sosial Nusantara. Sebab kalau hanya meniru dari Barat saja, maka tentu bisa dinyatakan bahwa teori-teori sosial Barat tersebut merupakan teori yang tercerai dengan realitas, tidak memiliki dasar pijakan pada realitas masyarakat. Sarjana Nusantara lain seperti Soejatmoko pernah mengkritik teoritisasi masyarakat Jawa yang dilakukan oleh sarjana Barat, padahal watak dan tradisi masyarakat Nusantara merupakan yang khas, berbeda dengan elemen-elemen yang membentuk tradisi masyarakat Barat.

Perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu sosial yang ada di barat. Selama ini dikotomi barat dan timur menjadi salah satu hal yang menyebabkan perkembangan ilmu sosial di Indonesia terkesan didominasi pemikiran barat. Barat selalu dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan sedangkan timur sebagai pengguna ilmu pengetahuan itu yang secara tidak sadar didoktrin oleh dunia barat. Sangat jarang bahkan hampir tidak ada pemikiran orisinal ilmu sosial yang bersumber dari ranah timur, khususnya dari Indonesia. Asia secara umum yang dipersepsikan sebagai bagian dunia timur yang dipersepsikan selalu terbelakang dan tertekan oleh dominasi pemikiran barat sehingga sangat jarang pikiran teori yang dihasilkan oleh pemikir dari timur. Selama ini hanya Cina, India dan Korea yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan keilmuan di Asia (Alatas, Syed Farid. 2010)

Kritikan terhadap perkembangan ilmu sosial di Asia muncul dari diskursus-diskursus alternatif. Beberapa pemikiran barat yang menjadi sumber kritikan seperti tinjauan *orientalisme*, *eurosentrisme*, *the captive mind*, *imperialisme akademik* dan kebergantungan akademik yang menyerukan perlunya diskursus alternatif yang

membebaskan (Alatas, Syed Farid. 2010). Kritikan tersebut menjadi salah satu pemicu untuk secepatnya menemukan diskursus alternatif pemikiran ilmu sosial yang muncul dari negara-negara dunia ketiga.

Dalam sejarah perkembangan ilmu sosial, Jerman, Prancis dan Spanyol masih dianggap sebagai negara-negara yang menjadi sumber kekuatan utama ilmu sosial. Teori-teori sosiologi banyak mengacu pada pemikiran Marx, Weber dan Durkheim yang selama hidupnya berpindah-pindah di negara-negara eropa. Secara tidak langsung pemikiran yang diungkapkan tokoh-tokoh tersebut menjadi landasan bagi pemikir di Asia untuk mengadopsi untuk mengembangkan ilmu sosial di Asia.

Ilmu sosial di Indonesia terkesan juga lebih condong pada pemikiran barat. Ketidaktepatan teori yang ada di barat untuk membaca realita dan fenomena yang ada di Indonesia turut andil dalam menambah ketidakmampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Akademisi di Indonesia terkesan hanya mengambil tanpa melihat apakah teori yang diambil pas untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan apabila selama ini banyak permasalahan yang mendera negara-negara di Asia tidak mampu diantaskan secara tuntas, bukan karena ketidak mampuan ahli dan akademisi di negara asia, tetapi lebih pada kesalahan pembacaan masalah akibat ketidaktepatan alat analisis yang dalam hal ini berupa teori. Ironisnya pemilihan topik riset dan prioritas wilayah riset pun mendapat arahan dari lembaga-lembaga ilmu sosial barat (Alatas, Syed Farid. 2010)

Diskursus yang berkembang selama ini menunjukkan adanya hegemoni pemikiran Barat terhadap timur yang mana bagi akademisi di Asia ingin menghentikan hegemoni ini dan memunculkan pemikiran alternatif. Dalam posisi ini akademisi di Asia ingin bersanding sejajar dengan pemikiran-pemikiran barat. Di Indonesia sendiri

diskursus mengenai pengembangan teori ilmu sosial baru mulai banyak diperbincangkan. Mulai muncul pemikiran-pemikiran yang berasal dan muncul dalam membaca dan menganalisis permasalahan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh pemikiran Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial profetik mencoba untuk membuka pengembangan ilmu sosial di Indonesia dengan mencoba mengabungkan antara ilmu sosial dengan nilai-nilai transendental yang menjadi salah satu kekhasan budaya Indonesia atau pemikiran Selo Sumarjan tentang perubahan sosial dan masyarakat jejaring bisa menjadi contoh mulai munculnya ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan akademisi lokal.

Proses merumuskan ilmu sosial alternatif terkendala banyak hal, setidaknya soal ketekunan dan kemandirian intelektual menjadi penyebab utamanya. Ilmu sosial alternatif secara sederhana dapat dimaknai sebagai ilmu yang membebaskan, ilmu sosial yang sesuai dengan corak masyarakat Indonesia atau ilmu sosial yang tidak terkolonialisasi (<http://makassar.tribunnews.com/2012/01/26/dekonstruksi-ilmu-sosial-indonesia.2012>. Diakses pada 1 Maret 2012).

Kebutuhan terhadap lahirnya ilmuwan-ilmuwan baru yang mampu menawarkan teori baru dalam menelisik fenomena sosial mengalami kemandegan (<http://sosbud.kompasiana.com/2010/03/01/kematian-ilmu-ilmu-sosial-di-indonesia>. diakses pada 13 Maret 2012). Hal tersebut menurut Sunyoto Usman disebabkan perguruan tinggi sebagai agen pencetak intelektual mengalami krisis. Ada 3 krisis yang dialami oleh perguruan tinggi: Pertama, mahasiswa pascasarjana yang diharapkan mampu memberikan kritik pada teori dan menghasilkan teori baru, masih berkutat pada identifikasi teori dan mengekor pada teori-teori yang sudah ada. Kedua, dosen tidak dijadikan sebagai “patner diskusi”, tapi sebagai sumber dari segala

sumber. Ketiga, banyak professor yang dipaksa/memaksakan diri membimbing mahasiswa meneliti bidang yang tidak dikuasainya. Selain dari ketiga hal tersebut ada *intelektual hazard* dimana kaum intelektual sibuk dengan pekerjaan struktural yang 'memaksa' mereka untuk abdi birokrasi.

Dari berbagai diskursus tersebut menarik untuk kemudian menelisik sejauh mana perkembangan ilmu sosial yang ada di Indonesia, sehingga nantinya dapat dipetakan secara jelas ilmu sosial lokal yang dikembangkan oleh tokoh akademisi Indonesia asli, dan bagaimana pula perkembangan ilmu sosial yang dikembangkan sebagai bagian dari mimpi melokalkan (*indigenisasi*) ilmu sosial dalam kacamata lokal.

C. PRIBUMISASI ILMU-ILMU SOSIAL

Isilah pribumisasi secara etimologis sepadan dengan istilah *indigeneus* dalam bahasa Latin berarti asli atau pribumi. Beberapa penulis menyebut pribumisasi, indonisasi ataupun *indigenous*. Disamping mengandung muatan lokal, pribumisasi membuka ruang gerak untuk mengaktualisasikan ilmu sosial dalam realitas.

Ilmu merupakan buah pikir dari manusia. Saat ini telah menjadi isu yang meluas bahwa ada asumsi ilmu sosial menjadi ilmu yang tertinggal dibanding ilmu-ilmu alam. Jujun S. Suriasumantri dalam Heru Santoso (2003: 49) menyatakan bahwa ketidakberdayaan ilmu-ilmu sosial tersebut bersumber dari ketidakmampuan ilmu-ilmu sosial dalam mengidentifikasi pikiran-pikiran dasar yang cocok dengan situasi kontekstual yang kemudian mengalami kegagalan dalam memilih konsepsi ilmiah yang cocok.

Syed Farid Alatas (2012) menyatakan bahwa sejak kurun kesembilan belas telah ada kesadaran akan kekurangan dan ketidakcocokan antara ilmu-ilmu sosial di dunia berkembang. Kenyataan ilmu-ilmu di Barat diamalkan di

negara berkembang pada awalnya oleh sarjana penjajah dan Eropa selainnya dan ditanamkan dikalangan sarjana-sarjana tempatan.

Ilmu-ilmu sosial di Indonesia saat ini masih mengadopsi ilmu-ilmu dari Barat. Ilmu sosial yang ada tidak dapat muncul dari alam pikiran histori bangsa sendiri. Ilmu Barat menjadi kiblat bagi ilmu yang berkembang di negara-negara berkembang khususnya Indonesia sendiri. Penjajahan intelektual berlangsung melalui legitimasi ilmu-ilmu sosial yang dipelajari dan dikembangkan di Indonesia. Orientalisme telah mempengaruhi ahli-ahli sejarah dan cendekiawan Indonesia dalam mengkaji ilmu sosial.

Indonesia cenderung masih mengkonsumsi besar-besaran teori-teori dari luar. Ilmu Barat dianggap absolut dan mutlak untuk dipelajari. Para ilmuan dan sarjawan Indonesia yang *study* di luar negari memang mengkaji kehidupan masyarakat Indonesia. Namun para ilmuan dan sarjana Indonesia mengkaji menggunakan kenyataan dan realitas yang ada di negara tempat mereka menimba ilmu. Orang-orang Indonesia tidak memainkan peran utama dalam menyuburkan proses belajar.

Tidak dipungkiri realitas yang mereka hadapi di sana belum tentu sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Para cendekiawan menghasilkan teori-teori namun tidak sesuai penerapannya di lapangan penelitian yang mereka kaji. Misalnya saja dalam mengkaji keistimewaan DIY. DIY memiliki khasanah keistimewaan sendiri sesuai nilai-nilai luhur primordialnya. Keistimewaan DIY memiliki akar historis yang tidak dapat dikaji menggunakan demokrasi ala Barat yang telah kita adopsi. Bisa jadi demokrasi yang ditawarkan Barat justru menghilangkan nilai-nilai histori bangsa sendiri.

Usaha gerakan pribumisasi (*indigenisasi*) ilmu-ilmu sosial ke dalam analisis kontekstual dengan memakai pikiran-

pikiran dasar yang cocok dengan kondisi riil masyarakat Indonesia yang hendak dijelaskan (Heri Santoso. 2003:49). Hal ini berarti pribumisasi ilmu sosial sangat diperlukan untuk menumbuhkan pemikiran baru dalam ilmu sosial yang berasal dari histori bangsa. Dalam menggapi ilmu-ilmu dan teori dari Barat bukan berarti kita menolak mentah-mentah, melainkan menyeleksi dan menyaring mana yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Salah satu *indigenisasi* adalah usaha melepaskan dan membebaskan metode ilmu sosial dari metode ilmu alam Barat. Hendaknya ilmu sosial dapat menemukan jati dirinya sendiri. Tantangan yang dihadapi ialah ilmu sosial dalam menemukan teori baru sesuai konteks berdasarkan kondisi yang ada. Masalah-masalah sosial suatu negeri tidak dapat diselesaikan secara internasional, melainkan menggunakan sarana-sarana yang lebih sesuai dengan kultur historis suatu bangsa.

Pribumisasi dapat dimaknai dalam tiga hal (Heri Santoso. 2003:56):

1. Pribumisasi diartikan sebagai domestikasi, lokalisasi, islamisasi ataupun partikularisasi.
2. Pribumisasi dimaknai sebagai upaya membangun teori yang khas, digali dari akar histori, budaya, etnik dan agama.
3. Pribumisasi penyelesaian teori yang sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia.
4. Pribumisasi diartikan menguak kearifan lokal yang dimiliki bangsa.

Ada beberapa usul yang disampaikan oleh Purwa Santoso (2012) mengenai cara pribumisasi ilmu-ilmu sosial di Indonesia, yaitu :

- 1) Ada kebijakan politik keilmuan yang dirumuskan oleh pemerintah.

- 2) Metodologi diajarkan sebagai suatu keterampilan. Para ilmuwan harus diekspose terhadap semua spektrum metodologi yang tersedia, dan diminta memilih dan menerapkan metodologi tertentu dengan menyadari kelemahan dan kelemahan metode yang bersangkutan.

Semua ilmu dan materi yang disampaikan dalam dunia pendidikan tidak dapat diingkari masih Baratisme, sekedar mengkopi dari ilmu yang lahir dan ada di Barat. Ilmuwan, guru dan dosen di Indonesia sekedar sebagai alat untuk menyalurkan materi ilmu sosial yang telah disiapkan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Mereka tidak dapat keluar dari patokan keilmuan Barat yang telah ditetapkan. Seharusnya materi ilmu sosial yang disampaikan harus berkaitan dengan diri kita sendiri.

Menurut Zamroni dalam makalah Seminar (2012) Nasional Indigenisasi ilmu sosial dan implementasinya dalam pendidikan ilmu sosial di Indonesia, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia perlu membangun paradigma baru, berupa:

1. Menanamkan *good citizenship* dengan menitik beratkan pada pengembangan nilai-nilai luhur tradisi bangsa melalui nasionalisme, toleransi, cinta tanah air, bekerja keras dan jujur
2. Mengembangkan keterampilan pada diri siswa untuk melakukan pengamatan, pengumpulan data dan penguasaan teori
3. Mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dengan penekanan pada analisis kritis, analisis nilai dan berpikir rasional.
4. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan inovasi sosial dengan mengkaji, mengkritik dan merevisi praktik-praktik sosial dan cara pemecahan masalah yang ada selama ini.

5. Menanamkan jati diri dan sifat positif.

Oleh karena itu perlu ada revolusi ilmu sosial berupa pribumisasian ilmu sosial di Indonesia, dimana membawa kultus budaya sendiri dan tidak bersifat ahistoris. Lembaga pendidikan merupakan tonggak untuk merubah keabsolutan kitab-kitab Barat dalam melegitimasi ilmu di negara-negara berkembang.

Bab IX

MENUJU ILMU SOSIAL PROFETIK

A. DARI 'ITIBAR MENUJU ILMU SOSIAL PROFETIK

Persoalan serius yang dihadapi oleh ilmuwan sosial di Indonesia adalah bagaimana menghadirkan ilmu sosial yang mampu melakukan transformasi? Mengapa perlu menfokuskan pada pertanyaan ini. Hal ini dikarenakan ilmu sosial pada dekade ini masih mengalami kemandekan. Ilmu sosial yang dibutuhkan adalah bukan hanya mampu menjelaskan fenomena sosial, namun juga mentransformasikan fenomena sosial tersebut, kearah mana transformasi dilakukan, untuk apa dan oleh siapa? Menurut refleksi Kuntowijoyo dalam menghadapi persoalan ini ilmu sosial akademis dan ilmu sosial kritis, belum bisa memberikan jawaban yang jelas. (Kuntowijoyo, 2006:86, AM Saefuddin, 2010:39-49).

Jalan keluar yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo adalah dengan membangun ilmu sosial profetik, yaitu suatu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Oleh karena itu ilmu sosial profetik, tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan *cita-cita etik* dan *profetik* tertentu. Dalam pengertian ini maka ilmu sosial profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakatnya. Menurut Kuntowijoyo arah perubahan yang diidamkan adalah didasarkan pada cita-cita humanisasi/emansipasi, liberasi dan transendensi, suatu cita-cita profetik yang diderivasikan

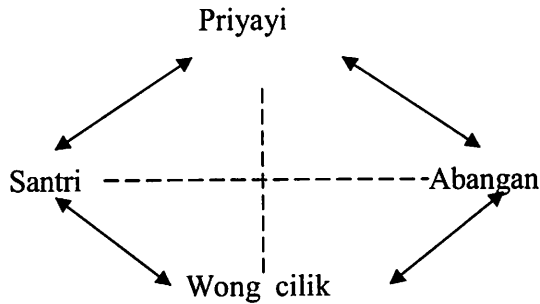
dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam surat Ali Imron ayat 110. (Kuntowijoyo, 2006:87).

Dengan Ilmu sosial profetik, akan dilakukan orientasi terhadap epistemologi, yaitu orientasi terhadap *mode of thought* dan *mode of inquiry*, bahwa sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari rasio dan empirik, tetapi juga dari wahyu. Dengan gagasan ilmu sosial profetik ilmuwan sosial Muslim tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan terhadap dominasi ilmu sosial Barat di dalam proses *theory building*. Islamisasi pengetahuan dengan proses peminjaman dan sistesis ini tidak harus diartikan sebagai westernisasi Islam. (AM Saefuddin, 1993:23-46).

Dalam pencermatan penulis, Kuntowijoyo telah merintis melalui sebuah ikhtiar sebagaimana dapat disimak misalnya dalam analisis yang dilakukannya dengan melakukan kritik sekaligus penyempurnaan pada tipologi Santri, Abangan dan Priyayi yang dikonseptualisasikan oleh Clifford Geertz, berikut ini.

Diantara kritik dan sekaligus penyempurnaan dari konsep Geertz dilakukan oleh Kuntowijoyo. Menurutnya, pada saat ini (dekade delapan puluhan-sembilan puluhan) pengelompokan abangan-santri secara horisontal (berdasarkan pengamalan keagamaan) dan priyayi-wong cilik (berdasarkan stratifikasi sosial) telah mengalami perubahan karena adanya konvergensi sosial. Terjadi mobilitas sosial dari wong cilik ke atas, dan sebaliknya priyayi ke bawah. Sementara itu golongan Santri dan Abangan sudah membuka diri sehingga terjadi proses saling mengisi. Akibatnya, batas-batas kultural diantara mereka sulit dikenali lagi. (Kuntowijoyo, 1986:3-5). Pandangan Kuntowijoyo dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

gambar. 9



Sungguhpun demikian secara sosiologis, kehidupan keagamaan, setiap pemeluk agama memiliki perangkat aturan dan pola perilaku sebagai pengatur tata hubungan komunitas kelompok tersebut. (Jackson, 1986). Untuk pemeluk agama Islam aturan nilainya bersumber pada Al Qur'an, Sunnah Rosulullah, atau sistem nilai lainnya yang diadaptasi tetapi tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasulallah. Hal tersebut sejalan dengan perspektif yang memegang prinsip bahwa Islam Nusantara (Indonesia) adalah merupakan hasil persenyawaan antara Islam normatif yang berasal dari Tradisi Besar di Timur Tengah dengan konteks lokal Indonesia. (Azyumardi Azra, 2002:24).

B. POLITIK PROFETIK: PEMIKIRAN POLITIK KUNTOWIJOYO

Route pemikiran Cendekiawan Muslim Kuntowijoyo (1943-2005) yang ingin dipaparkan dalam tulisan ini hanyalah pemikiran beliau yang berkaitan dengan tema-tema masalah politik khususnya politik Islam. Pengambilan posisi yang demikian mengingat beberapa pertimbangan pertama karena tema politik adalah merupakan tema kajian yang akrab bagi penulis serta demi memungkinkannya

kajian ontologi pemikiran Kuntowijoyo ini menjadi fokus pada *angle-angle* tertentu, sehingga sajian menjadi enak untuk dinikmati.

Kesan kuat pertama yang ada pada penulis ketika ingin menuliskan pemikiran Kuntowijoyo di bidang pemikiran politik Islam, adalah kokohnya landasan teoritis pemikiran beliau dipadu dengan kejernihan berpikir dan akhirnya mampu melahirkan perspektif alternatif yang ia namakan dengan *Ilmu Sosial Profetik*. Sebagai contoh kecil penulis pernah membaca salah satu tulisan beliau yang dibuat pada tahun 1980-an, tulisan tersebut merefleksikan betapa beliau kokoh dalam penguasaan teori-teori social besar, penulis menemukan tulisannya yang dimuat di jurnal Prisma tahun 1980-an beliau sudah fasih dengan teori sosial kritis dari Gramsci, Habermas, padahal saat itu masih sedikit pengamat yang menggunakan pemikiran kritis mengingat situasi politik di Indonesia yang berada di bawah regim otoriter Orde Baru.

Kekokohan pijakan kerangka teoritis yang beliau miliki sangat terasa misalnya ketika kita membaca analisis tulisan beliau yang berkaitan dengan masalah perubahan sosial, perubahan budaya dan implikasinya pada perubahan politik. Lebih khusus lagi keterkaitan antara perubahan sosial-budaya dengan pergeseran dan peranan politik umat Islam di Indonesia. Para pembaca dan pemerhati pemikiran politik Islam dapat merasakan betapa Cendekiawan Kuntowijoyo sangat menguasai teori-teori sosial besar dalam bukunya yang sangat monumental yang terbit pada awal tahun 1990-an, *Paradigma Islam*, demikian juga buku "*Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*", yang terbit pada tahun 1994.

Karakteristik lain yang menjadi kelebihan dari pemikiran dan analisis yang dibuat oleh Kuntowijoyo, sejauh yang dapat penulis tangkap adalah dalam *stand of point*, posisi pijak pemikiran Kuntowijoyo sekali pun *familiar* dan fasih mengutip dan menggunakan teori-teori sosial barat tetapi

secara substansi gagasan pemikirannya tidak menunjukkan ketundukan pada arus besar pemikiran barat yang sekuler. Kuntowijoyo sebagai intelektual tidak mau menyerah dan tunduk pada *mainstream* pemikiran yang sekuler bebas nilai. Dan dalam waktu yang sama. Ia juga tidak terjebak pada posisi eksklusif hanya bersedia menjadikan Islam sebagai satu-satunya alternatif pemikiran, tanpa pengayaan dan dialog yang cerdas dengan khazanah pemikiran peradaban dunia lainnya. Menghadapi posisi dunia pemikiran yang cenderung tunduk pada perspektif pemikiran Barat yang sekuler dan bebas nilai, yang tidak sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya (Islam) dari sisi pemikiran Pak kunto, telah melakukan ikhtiar yang cerdas, kreatif dan jernih yaitu dengan gagasannya untuk melahirkan suatu paradigma ilmu yang dapat mempertemukan antara tradisi pemikiran Barat yang rasional dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat industri dan tradisi pemikiran timur yang dekat dengan nuansa religius-mitos sangat kuat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat agraris. Itulah yang beliau sebut dengan nama *ilmu sosial profetik*.

Dalam pandangan ilmu sosial profetik yang digagas oleh Kunto berpandangan bahwa teks suci Al Qur'an dapat diposisikan sebagai nilai/norma, yang kemudian dapat diturunkan menjadi *grand theory*, *middle theory* sampai ke *praxis*. Dengan rumusan lain ia menganjurkan agar Umat Islam melakukan proses objectivikasi pada ajaran Islam sehingga dapat diterima secara universal lantaran berpijak pada titik temu nilai-nilai yang objektif yang memang dibutuhkan oleh semua manusia dengan baju primordial agama apapun. Atau dapat juga ditempuh jalan sebaliknya yaitu berangkat dari fenomena dan fakta sosial politik yang ada kemudian didialogkan dengan teks normatif al Qur'an. Pemikiran Kuntowijoyo tentang objectivikasi Islam dapat dicermati pada bukunya "*Identitas Politik Umat Islam*",

khususnya pada Bab VI dan VII yang secara mendalam tema objektivikasi Islam. Buku ini terbit bulan Juni tahun 1997, oleh penerbit Mizan, beberapa saat sebelum bergulirnya era reformasi, dimana munculnya fenomena berseminya musim kebebasan untuk mendirikan partai politik, termasuk juga tumbuhnya partai-partai politik Islam.

Dalam pandangan Kuntowijoyo bahwa dalam politik umat Islam seperti penumpang perahu yang berlayar di laut lepas, tanpa bintang tanpa kompas, tidak tahu tujuan dan tidak tahu cara berlayar. (Kuntowijoyo, 1997:219) Kunto menuliskan bahwa kepentingan politik Umat Islam bukan hanya kekuatan moral, tetapi politik adalah kekuatan pemaksa (*coercion*) dan bukan hanya sekedar kekuatan moral. Politik menyangkut *publik policy*, bukan kesalehan personal. Adapun aspek-aspek dari kepentingan politik Umat Islam meliputi aspek moralitas, perubahan struktural, mekanisme politik, reorientasi psikologi. Strategi yang diusulkan oleh Kunto untuk mencapai kepentingan politik Umat Islam adalah melalui tiga strategi yaitu struktural, kultural dan mobilitas sosial. (Kuntowijoyo, 1997:206).

Kuntowijoyo tidak secara spesifik menyebut strategi perjuangan Islam melalui instrumen partai politik, juga tidak memasukan dalam strategi perjuangan umat melalui jalur struktural. Hal ini nampaknya sesuai dengan keyakinan teoritis Kunto, bahwa pada era sekarang seharusnya umat Islam sudah berpindah dari perjuangan yang berpijak pada mitos dan ideologi ke perjuangan yang berbasis pada ilmu. Posisi pandangan Kunto ini jika ditelusuri konsisten sejak awal pemikiran beliau sampai tahun-tahun akhir kehidupan Beliau sebagai intelektual Islam. Hal tersebut misalnya dapat kita baca pada orasi/pidato ilmiah untuk pengukuhan guru besar Kuntowijoyo, dibidang ilmu sejarah tahun 2001, Kuntowijoyo tetap konsisten dengan pendiriannya bahwa pentingnya umat Islam menyadari tahapan-tahapan

perkembangan sejarah yang mengharuskan dilakukannya reorientasi strategi perjuangan umat dari berbasis pada ideologi bergeser pada paradigma Islam sebagai ilmu. Menurut hemat penulis, mengingat pandangan Kuntowijoyo tersebut dikemukakan di forum ilmiah yang sangat penting maka nampaknya hal tersebut dapat juga dimaknai sebagai pandangan khususnya dalam hal pemikiran politik Islam, keterkaitannya dengan konteks dinamika sejarah umat Islam yang memformulasikan paradigma Islam sebagai ilmu sudah selesai (*khatam*) dan tidak akan mengalami perubahan pandangan yang berarti sampai akhir hayatnya.

Dengan kata lain, partai politik Islam, lebih kental nuansa simbol dan ideologinya maka beliau tidak memberikan rekomendasi untuk berjuang melalui partai Islam, tentu mempunyai argumen untuk posisi pandangannya ini. Kuntowijoyo memberikan rekomendasi untuk berjuang melalui partai politik yang secara substantif memperjuangkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, membelaan pada orang tertindas, pemberantasan korupsi, pembelaan kaum perempuan, kebebasan berpendapat, berpolitik dan lain-lain. Tetapi bukan partai politik yang secara vulgar mengeksploitasi simbol-simbol Islam. Posisi pandangan Kunto ini tentu bertentangan dengan pandangan tokoh-tokoh Islam yang berpandangan pentingnya berjuang melalui partai Islam. Untuk menilai pandangan mana yang benar, sejarahlah yang akan memberikan jawabannya kepada kita.

Dalam kaitannya dengan posisi politik umat Islam secara makro Kuntowijoyo telah meninggalkan warisan pemikiran yang merupakan embrio dari ilmu sosial profetik. Beliau mencoba untuk melakukan teoritisasi tentang politik Islam dari Al Qur'an surat Ali Imron ayat 104 dan 110 serta surat Fushilat ayat 51-53. Dari teks normatif tersebut dapat diambil semacam proposisi aksioma. Bahwa kejayaan suatu umat akan ditentukan oleh empat hal mendasar; *pertama*,

tentang adanya kesadaran sejarah (untuk mengambil 'itibar); *kedua*, pentingnya untuk melakukan upaya emansipasi (*al amr bil ma'ruf*); yang *ketiga*, keharusan melakukan liberasi, pembebasan manusia dari kejahatan (*anahy 'anil munkar*); *keempat*, pentingnya melakukan transendensi (*tu'minuna billah*). Berdasarkan nilai aksiomatik yang diambil dari ayat di atas maka Islam dan umat Islam seharusnya mampu memenangkan pertarungan menjadi umat terbaik tidak berada dalam dominasi dan posisi ketundukkan pada ideologi kapitalisme ataupun sosialisme seperti dialami oleh umat Islam semenjak beberapa abad semenjak lebih khusus lagi setelah terjadinya revolusi industri abad 16 di negara barat.

Dari gabungan antara realitas politik umat Islam dengan proposisi yang ada dalam teks normatif kemudian dapat disusun suatu pertanyaan mengapa umat Islam mengalami keterbelakangan, kemunduran, kekalahan? Jawaban atas pertanyaan sentral ini dapat dipandu dan diturunkan dari nilai-nilai normatif teks al Qur'an dengan kombinasi dari data *real* dan fenomena sosial, politik penyebab kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Persoalan besar tadi dapat dirinci dalam pertanyaan yang lebih spesifik apa penyebab kemunduran umat Islam? Apakah faktor pemahaman dan kesadaran Islam yang lemah telah dipenetrasi oleh ideologi kapitalisme dan sosialisme pada hampir seluruh aspek kehidupannya sehingga pada kenyataannya umat Islam telah jauh dari Islam, sehingga sebenarnya yang bertarung dalam realitas politik dan ekonomi bukan lagi antara Islam dengan ideologi kapitalisme ataupun sosialisme. Tetapi antara umat Islam yang tidak memiliki ideologi dengan bangsa barat yang sangat yakin dengan ideologi kapitalisme yang sudah diperjuangkan semenjak abad pencerahan dengan pengorbanan yang sangat besar baik tenaga, pikiran bahkan nyawa. Ataukah kemunduran tersebut lebih karena faktor instrumental karena umat Islam tidak menguasai ilmu dan

teknologi. Atau bahkan kelemahan umat Islam ada pada dua faktor itu sekaligus yakni kelemahan pada pemahaman Islam yang sudah tercerabut dan banyak friksi serta tidak menguasai dan menggegam ilmu dan teknologi.

Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa kemunduran politik umat Islam dalam persaingan secara makro adalah lebih sebagai konsekuensi dari kelemahan pada penguasaan pemahaman keislaman dan kesadaran sejarah dan instrumen. Maka langkah perbaikan yang perlu dipertimbangkan adalah perbaikan pada kedua aspek itu sekaligus. Pendalaman pada ajaran Islam tanpa menafikan dan kemaun untuk belajar hal-hal yang berdifat instrumental dari berkah kemajuan Barat.

Dalam konteks pemikiran yang makro ini maka kiranya dapat dipahami mengapa sampai akhir hayatnya Kunto, tetap istiqomah dengan pilihan strategi perjuangan umat Islam melalui jalur Islam kultural beliau tidak terlalu memberikan rekomendasi pada umat Islam untuk melakukan pilihan perjuangan melalui jalur struktural atau yang lebih populer dikenal melalui jalur politik, Islam politik.

Dalam pandangan Kunto, sepanjang bacaan yang dapat ditelusuri oleh penulis, ada beberapa keterbasan pilihan perjuangan melalui jalur partai politik yaitu;

1. Pilihan perjuangan melalui jalur partai politik membuka peluang untuk merusak soliditas umat Islam karena terkotak-kotak dalam berbagai partai dan friksi;
2. Pilihan perjuangan melalui partai politik akan menggeser alokasi sumber daya umat tersedot kepolitik dan berpeluang menelantarkan pembinaan di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, moral dll;
3. Pilihan melalui jalur partai politik bisa mendorong munculnya pemikiran yang hanya berjangka pendek-kerdil dan miskin pemikiran yang memiliki visi jangka panjang;

4. Pilihan perjuangan melalui jalur politik tidak dapat diandalkan untuk memberikan solusi pada persoalan kompleks yang dihadapi oleh umat Islam;
5. Pilihan perjuangan melalui jalur politik dengan mengabaikan pembinaan aqidah, infrastruktur intelektual umat sebagaimana dibuktikan oleh sejarah (kasus dilarangnya partai Masyumi) tidak akan mencapai kesuksesan;
6. Dalam sejarah modern belum ada bukti empiris yang meyakinkan bahwa umat ini akan meraih kejayaan yang menyeluruh dengan menggunakan partai politik sebagai instrumen perjuangan.

C. DI SEKITAR DISKUSI TENTANG OBJEKTIVITAS

Kuntowijoyo berpandangan bahwa dalam perspektif Ilmu Sosial Profetik, Ilmu Sosial tidak bisa bebas nilai "*free values*", kajian dalam ilmu sosial perlu dikerangkai (*diframe*) oleh suatu nilai-nilai tertentu yang disebutnya sebagai nilai-nilai kenabian (profetik). Pandangan Kuntowijoyo ini dalam pencermatan penulis memiliki irisan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Myrdal. "Buku Myrdal yang berjudul "*Objetivity in Social Research*" yang terbit tahun 1969, semuanya terdiri dari 23 topik pembahasan. Topik pembahasan dalam buku tersebut nampaknya merupakan pemugaran kembali dalam bentuk rangkuman ringkas, keyakinan-keyakinan yang mendasar mengenai penelitian sosial, khususnya dengan mengambil fokus perhatian pada masalah-masalah ekonomi sesuai dengan spesialisasi keilmuan yang ditekuni oleh Myrdal. Myrdal dalam buku ini melakukan gugatan ilmu ekonomi (*economics*) dan Ia ingin mengembalikannya sebagai *political economy* dan *moral science*. Myrdal secara eksplisit menyetakan nilai-nilai yang dijadikan titik tolak pandangannya, yang disebutnya dengan istilah "*value premise*".

Myrdal mengkritik ilmu ekonomi yang memandang dirinya tergolong '*science*' yang beranggapan dapat menyajikan suatu penilaian yang objektif, yang disebut fakta. Ilmu ekonomi dan *welfare economics theory*, yang berpretensi bebas nilai (*wertfrei*) dalam pandangan Myrdal itu sebenarnya menyembunyikan dalam dirinya suatu filsafat moral tertentu sebagai dasar teori. Misalnya seperti filsafat Utilitarianisme, Hedonisme, atau Liberalisme yang disembunyikan padahal sebenarnya telah kuno dan usang yang memerlukan penilaian kritis. Dengan sikap yang salah itulah, maka para ilmuwan ekonomi yang berpandangan bebas nilai padahal sebenarnya menyembunyikan nilai-nilai filsafat tertentu, mereka selalu merasa bahwa mereka bisa mempelajari tingkah laku manusia tanpa menyelidiki sebab-sebabnya, padahal mereka itu hanya mengandalkan kebenaran asumsi hedonis. Sehingga berani menarik kesimpulan bahwa perilaku manusia yang diamati itu bersifat rasional dan mampu menimbang manfaat (utilitas) dan disutilitas tindakan. Hal seperti ini menurut Myrdal akan menjerumuskan ke dalam bias dimana mereka menjadi yakin atau meras yakin seolah-olah ada rasionalitas dan optimalitas pasar.

Berkaitan dengan pembahasan "premis nilai" Myrdal adalah termasuk ilmuwan yang memiliki pandangan pentingnya premis nilai itu dalam suatu penelitian sosial, dalam hal ini Ia menyatakan, bahwa premis nilai dalam riset ilmu sosial harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain; premis itu harus dengan jelas dinyatakan dan tidak disembunyikan sebagai dugaan-dugaan yang tersirat; terperinci dan kongkrit; dipilih dengan sengaja. Mengapa memerlukan persyaratan demikian karena dasar-dasar pandangan tentang nilai tersebut tidaklah secara apriori nyata pada dirinya dan tidak pula berlaku (*valid*) secara umum karena hanya dilandaskan atas fakta-fakta atau

sudah demikian halnya. Dengan kata lain premis nilai itu merupakan suatu unsur yang bersifat kehendak (valitional) dalam riset, yang memang dibutuhkan dalam semua kegiatan yang mempunyai tujuan.

Jika rasionalitas adalah salah satu dari premis nilai, sebagaimana biasa dalam jenis peradaban kita ini, maka rangkaian premis tersebut, tidak memasukan dasar-dasar pandangan tentang nilai yang tidak saling cocok, melainkan harus merupakan suatu sistem yang konsisten. Ia menyadari bahwa dasar-dasar pandangan tentang nilai tidak dapat seluruhnya bersifat apriori, bebas dari riset. Riset seharusnya mulai dengan memberikan perhatian terhadap beberapa premis nilai yang agaknya tepat untuk digunakan, akan tetapi riset itu harus siap sedia melakukan penyesuain secara terus menerus.

Myrdal menyadari adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi menempatkan premis nilai dalam penelitian sosial. Kesadaran ini antara lain terungkap melalui pernyataannya, bahwa premis nilai itu tak boleh dipilih secara sewenang-wenang, dasar-dasar pertimbangan tersebut haruslah didasarkan atas penilaian yang sesungguhnya yang menyaratkan adanya realisme. Walaupun hal ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Paling tidak menurut Myrdal ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi berkaitan dengan premis nilai dalam penelitian sosial ini antara lain;

Pertama alasan untuk mengadakan pemilahan terhadap premis nilai haruslah berdasarkan pada relevansinya, yang ditentukan oleh penilaian sebenarnya dikalangan orang-orang dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam lingkaran relevansi yang ditetapkan demikian, terdapat pula lingkaran signifikansi yang lebih kecil, yang diambil untuk menunjukkan penilaian-penilaian yang dianut oleh kelompok-kelompok yang substansial.

Kedua, relevansi dari premis nilai lebih-lebih haruslah merupakan sesuatu yang dapat dikerjakan (*feasible*). Penilaian-penilaian yang bertujuan pada sesuatu yang tidak mungkin, tentunya janganlah dipilih sebagai premis nilai untuk memuat riset, tetapi harus disanggah secara teoritis sebagai sesuatu yang tidak dapat dikerjakan setelah diadakan suatu studi tentang fakta. Lahirnya sanggahan-sanggahan secara teoritis terhadap penilaian-penilaian yang tidak dapat dikerjakan benar-benar, adalah salah satu tugas yang terpenting dari ilmu sosial.

Ketiga, Landasan ilmiah untuk menentukan penilaian-penilaian dalam masyarakat sangatlah langka. Studi tentang pendapat-pendapat yang ada tidaklah memenuhi persyaratan. Hal ini menyebabkan untuk sementara para ahli ilmu sosial pada umumnya dipaksa untuk bersandar pada pengamatan-pengamatan yang didasarkan pada kesan dan spekulasi. Metode apapun yang digunakan untuk menarik keluar penilaian yang dipunyai orang, menunjukkan bahwa penilaian-penilaian itu terkait dengan kepercayaan akan memperhadapkan kita kepada kesulitan yang utama. Kepercayaan mempengaruhi penilaian, dan sama penilaian akan mempengaruhi kepercayaan. Seorang ilmuwan yang terlibat dalam usaha membuat masyarakat lebih rasional, harus mempertanyakan apakah ia seharusnya tidak hendak menggunakan penilaian-penilaian yang akan dipunyai orang jika kepercayaan-kepercayaan mereka itu benar dan tidak rusak. Untuk alasan ini saja, penentuan terhadap penilaian akan merupakan tugas yang lebih sulit lagi. Lebih-lebih jika penilaian-penilaian yang akan digunakan sebagai premis nilai harus sangat banyak menunjuk pada suatu keadaan di masa depan. Kesulitan *keempat*, ini merupakan kesulitan yang mendasar bersumber pada fakta bahwa penilaian-penilaian itu berbentrok satu dengan yang lain. Bentukkan tidak hanya terjadi antara penilaian perorangan dengan

penilaian kelompok tetapi juga terjadi diantara penilaian-penilaian perorangan itu sendiri.

Myrdal menyadari bahwa apa yang ditawarkannya belum sampai pada penyelesaian yang final, namun ia tetap berpendapat bahwa jika kita mewajibkan diri kita menyatakan secara terbuka premis nilai yang instrumental itu, dalam istilah-istilah yang setepat mungkin, bagaimanapun caranya hal itu dicapai dan apapun bentuknya, dan kalau kita membiarkan premis nilai tersebut menentukan pendekatan, definisi dan konsep-konsep dan perumusan teori-teori kita, itu merupakan suatu kemajuan kearah kejujuran, kejernihan dan efektivitas dalam riset. Ini adalah langkah-langkah yang mengarah kepada *objektivitas* dalam arti yang sebenarnya.

Myrdal dalam kaitannya tentang upaya mencari kebenaran menyatakan bahwa etos ilmu pengetahuan sosial adalah mencari kebenaran *objektif*. Ia menyatakan bagi seorang mahasiswa kepercayaannya ialah kenyakinannya bahwa kebenaran itu ialah segala-galanya dan bahwa hayalan itu merusak, terutama khayalan-khayalan yang oportunistik. Ia mencari "realisme" suatu istilah yang salah satu artinya menunjuk pada suatu pandangan objektif tentang realitas.

Dalam pandangannya masalah-masalah metafologis yang paling mendasar yang dihadapi oleh ahli ilmu sosial adalah, apakah obyektifitas itu, dan bagaimana dapat memperoleh obyektifitas dalam mencoba menemukan fakta-fakta dan hubungan timbal balik antara fakta-fakta tersebut? Bagaimanakah menghindari suatu pandangan yang memihak? lebih khusus lagi bagaimana seorang mahasiswa (ilmuwan sosial) dapat membebaskan dirinya dari;

1. Warisan peninggalan yang kuat dari penulisan-penulisan sebelumnya dibidang ilmiah yang digarapnya, yang biasanya mengandung pengertian-pengertian yang normatif dan teologis yang diwariskan oleh generasi-

generasi terdahulu dan dilandaskan pada filsafat-filsafat moral metafisika tentang hukum alam serta utilitarisme yang merupakan sumber seluruh teori sosial dan ekonomi.

2. Pengaruh-pengaruh seluruh lingkungan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik dari masyarakat tempat dia hidup, bekerja, memperoleh kedudukan dan status di dalamnya.
3. Pengaruh yang bersumber pada kepribadiannya sendiri, seperti yang dibentuk bukan hanya oleh tradisi-tradisi dan lingkungan tapi juga oleh sejarah pribadi, pembawaan dan kecenderungan-kecenderungannya.

Ahli ilmuwan sosial juga menghadapi masalah lanjutan; bagaimana ia bisa menjadi objektif dalam pengertian ini dan sekaligus bersikap praktis? Apakah hubungan antara kehendak untuk mengetahui dan kehendak untuk merubah masyarakat? Bagaimanakah pencarian pengetahuan yang benar dapat digabungkan dengan penilaian-penilaian moral dan politik? Bagaimanakah kebenaran dapat dihubungkan dengan cita-cita.

Selanjutnya terdapat tabu yang irrasional untuk membahas kurangnya kesadaran ini (poin 3), sementara itu tabu ini umumnya dihormati dengan membiarkan ahli ilmu sosial terkungkung didalamnya.

Oleh karenanya seorang ilmuwan haruslah memperhatikan alat-alat logis untuk melindungi riset dari pembiasaan, agar dapat menjamin abjektivitas antara lain;

1. Menyadari sepenuhnya penilaian yang sesungguhnya untuk menentukan riset teoritis maupun praktis.
2. Menelusuri penilaian-penilaian tersebut dari sudut pandangan terhadap relevansi, arti dan kelayakan dalam masyarakat yang sedang dipelajari, merubahnya menjadi premis nilai khusus bagi riset.

3. Menentukan cara pendekatan serta memberikan batasan terhadap konsep-konsep dalam arti sejumlah premis nilai yang secara jelas dinyatakan.

Metodologi ilmu sosial bersifat metafisika dan pseudo objektif, dengan demikian dalam melihat kenyataan kadang-kadang menyimpang. Myrdal menyatakan ada dua macam konsepsi yang dianut orang tentang kenyataan yaitu kepercayaan (*belief*) dan penilaian (*Valuational*). Kepercayaan dan penilaian terwujud dalam bentuk pendapat (opini). Kepercayaan bersifat intelektual dan pengenalan (*cognitive*). Dan penilaian bersifat emosional dan kemuaan (*volutive*). Kepercayaan menyatakan pandangan kita, tentang bagaimana kenyataan itu sebenarnya, sekarang atau dimasa lampau, sedangkan penilaian menyatakan pandangan kita tentang bagaimana kenyataan itu seharusnya.

Orang biasanya setuju bahwa sebagai dalil yang abstrak, penilaian yang lebih umum secara moral "lebih tinggi" daripada hal-hal yang berhubungan dengan perorangan atau kelompok yang khusus. Namun penilaian seperti ini bisa menjadi rendah apabila diberi muatan prasangka. Selain itu kepercayaan juga bisa rusak bila dicampuri oleh pandangan yang oportunistis. Misalnya pandangan orang Amerika pada orang negro yang memandang rendah, karena perbedaan warna kulit dan kesejahteraan. Hal ini akan membentuk kepercayaan palsu yang sulit untuk dibetulkan.

Dalam pandangan Myrdal sebenarnya Ilmu sosial telah memberikan rangsangan bagi arah jangka panjang menuju rasionalisme. Dengan memperbanyak pengetahuan yang benar dan membuang kepercayaan-kepercayaan yang oportunistis dan palsu, maka ilmu sosial meletakkan landasan kerja bagi suatu pendidikan yang semakin efektif : membuat kepercayaan orang lebih rasional, mendorong penilaian lebih terbuka dan mempersulit usaha mempertahankan penilaian di tingkat lebih tinggi. Namun saat ini, masih banyak ahli

ilmu soasial yang mempunyai kecenderungann ke arah "*Scientisme*" palsu (menghilangkan tanggung jawab untuk membentuk pendapat umum dan merosotkan pentingnya riset untuk membuat orang lebih rasional) dan menutup diri dengan cara menggunakan istilah-istilah rumit dan aneh yang tidak dimengerti.

Untuk mengurangi kemencengan atau bias dari pemikiran kita yaitu dengan berpegang pada penilaian dan mementingkan fakta. Namun kita sukar untuk terlepas dari "kemencengan yang sistematis" karena kita berada di bawah pengaruh tradisi dalam ilmu kita, di bawah pengaruh lingkungan kebudayaan dan politik serta pembentukan pribadi kita yang khas. Kemencengan yang sistematis ini dapat ditemukan dalam teori ekonomi klasik dan neo klasik, juga dalam studi tentang persoalan pembangunan di Asia Selatan.

Kemencengan seperti itu akan membawa persepsi yang salah tentang kenyataan dan kesimpulan-kesimpulan kebijaksanaan yang salah pula, hal inilah yang melemahkan kekuatan ilmu-ilmu sosial untuk menyingkirkan kepercayaan yang rusak dan salah. Kondisi yang membawa ke arah kemencengan adalah dua kondisi yaitu kondisi sosial politik yang mempengaruhi arah kerja penelitian dan pendekatan-pendekatan yang kita pilih dalam riset.

Para ahli ilmu sosial cenderung untuk menyembunyikan penilaian-penilaian dengan menyatakan bahwa pandangan mereka itu seolah-olah merupakan sekedar kesimpulan logis dari fakta. Mereka lebih banyak menekan penilaian sebagai penilaian dan memberikan alasan-alasan saja; dengan demikian persepsi mereka tentang kenyataan mudah mengalami distorsi, dan karena itu menjadi menceng dari mulai perencanaan sampai penyajian akhir.

Kemencengan dalam ilmu soasial dapat dikurangi

dengan berpegang pada fakta dan memperhalus metode-metode penanganan data statistik, selain itu juga harus diiringi dengan pikiran murni. Namun demikian, diperlukan juga titik pandang dalam berpegang pada fakta, agar terhindar dari kesimpulan-kesimpulan praktis dan politis.

Rasionalisasi dibutuhkan dalam melakukan riset dan harus didekati dengan pendekatan yaitu penerapan konsep-konsep, model dan teori-teori. Hal ini mempengaruhi seleksi data yang relevan, pencatatan observasi, kesimpulan-kesimpulan teoritis dan praktis yang ditarik secara jelas ataupun terselubung serta penyajian hasil-hasil riset.

Untuk mencapai objektifitas dalam analisa teoritis ialah dengan membeberkan penilaian-penilaian tersebut secara terang-terangan, dan menjadikannya sadar, spesifik dan jelas serta membiarkannya menentukan riset teoritis. Sering terjadi ada usaha untuk mengobjektifkan padahal tidak objektif, misalnya tingkat kehidupan orang negro senantiasa dibandingkan dengan orang kulit putih.

Premis merupakan suatu unsur yang bersifat kehendak (*valitional*) dalam riset, yang memang dibutuhkan dalam semua kegiatan yang mempunyai tujuan. Premis nilai harus ditetapkan pada tujuan dan alat. Pendapat paham utilitarianisme yang menyatakan bahwa tak sutupun yang baik atau jahat dalam dirinya, melainkan hanya hasilnya yang baik atau jahat tidaklah realistis karena orang sebenarnya menilai alat juga pada, begitru juga pada akibat-akibat sampingannya.

Dalam menentukan premis nilai ada kesulitan-kesulitan yang harus dipertimbangkan, yaitu; *pertama*, hubungan antar penilaian dengan kepercayaan-kepercayaan yang lebih benar; *kedua*, validitas penilaian-penilaian berlaku dalam jangka waktu yang lama di masa depan, dan *ketiga*, peluang bagi terjadinya bentrokan-bentrokan penilaian. Karena itu

suatu studi harus mempergunakan beberapa premis nilai alternatif, kemudian kita bisa memilih satu rangkaian premis (*instrumental*).

Penilaian tidak bisa diukur dengan patokan-patokan kebenaran dan kelengkapan. Penilaian-penilaian adalah fakta subjektif. Pembicaraan tentang soal moral dan politik akan dirangsang dan dipermudah apabila ilmu sosial yang konvensional menghapuskan dakwaannya yang palsu bahwa ia sanggup memastikan fakta-fakta yang relevan dan signifikan, bahkan mencapai kesimpulan-kesimpulan praktis tanpa premis nilai yang eksplisit. Dengan demikian relativisme nilai bukanlah nihilisme moral.

Asal moral yang umum yakni, prinsip bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama dan bahwa persamaan dalam syarat hidup dan syarat kerja bagi manusia merupakan cita-cita tertinggi. Disamping itu ada penyimpangan asal moral yang umum yakni peperangan yang mungkin dipakai sebagai suatu alat yang mungkin dalam kebijaksanaan nasional.

Ilmu sosial modern telah dipertajam ke arah suatu alat teoritis yang jelas dan tegas untuk penilaian yang objektif. Alat tersebut adalah "pembuktian", yang biasa terdapat dalam ilmu sosial khususnya ekonomi.

Sifat manusia bisa ditinjau dari pandangan kaum radikal dan kaum konservatif. Menurut kaum radikal, kesalahan dan tanggung jawab atas terjadinya ketidak-beresan dalam masyarakat terletak pada lingkungan, yang dapat diubah. Kaum konservatif sebaliknya berpendapat bahwa watak pembawaan manusialah dan bukan lingkungan secara keseluruhan yang membuat perorangan dan masyarakat sebagaimana adanya. Pembawaan manusia tidak dapat diubah. Rasionalisme sekuler telah memberikan umpan bagi konservatisme dan menentang pendekatan hakiki yang

berdasarkan pada lingkungan. Relatif pentingnya lingkungan dan pembawaan dan lingkungan adalah persoalan fakta, sedang kepercayaan dapat dibuktikan benar tidaknya melalui riset.

Pembuktian akan membawa ke arah paradoksal, seperti akhir abad 18 dan permulaan abad 19, ketika azas persamaan dinyatakan dengan terang-terangan dan diberi tekanan khusus di negara-negara barat yang maju. Pembuktiannya adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi antar daerah, kelas sosial dan kesejahteraannya memburuk. Begitu juga paradok yang terjadi di bidang ekonomi. Para ahli ekonomi yang tergolong dalam aliran utama (*mainstream*) yang kemudian menguasai perkembangan ekonomi, mungkin masih radikal di banyak bidang yang lain, namun tetap konservatif dalam hal kondisi ekonomi. Kemudian terdapat pandangan yang mengatakan bahwa pembaharuan untuk mencapai persamaan akan menghalangi kemajuan ekonomi, baik karena mengurangi rangsangan-rangsangan di pihak yang harus membayar, maupun karena mengurangi motivasi orang miskin itu untuk berusaha keras, bekerja dan menabung, apabila dibebaskan dari himpitan kekurangan dan ketiadaan jaminan.

Pembahasan atas “Obyektivitas Penelitian Sosial”

Pembahasan tentang obejektivitas dalam penelitian sosial adalah merupakan suatu hal yang telah menjadi perdebatan lama, mengingat adanya kemungkinan tingginya subyektivitas dalam penelitian ilmu sosial, jika dibanding dengan penelitian ilmu-ilmu eksakta, hal ini terkait dengan objek yang diteliti juga berkaitan dengan metode penelitian yang digunakannya. Untuk membahas masalah ini ada baiknya jika kita lihat dulu paparan tentang siapa ilmuwan itu. Seseorang yang melaksanakan rangkaian aktifitas yang

di sebut ilmu, kini di sebut ilmuwan (*scientist*). Kata ilmuwan diperkenalkan ke dalam bahasa inggris sekitar tahun 1840 untuk membedakan mereka yang mencari keajegan dalam alam dengan para filsuf, kaum terpelajar dan cendekiawan dalam suatu makna yang lebih umum. *Mc. Grow-Hill Dictionary of Scientific and Technical Term* memberikan definisi ilmuwan sebagai “seorang yang mempunyai latihan, kemauan dan hasrat untuk mencari pengetahuan baru, azas-azas baru dan bahan-bahan baru dalam suatu bidang ilmu”.

Objektivitas ilmu sosial menyangkut gerak dinamika masyarakat dan perilakunya. Pada dasarnya ilmu pengetahuan sosial memiliki objektivitas yang memandang kenyataan sebagaimana adanya (*das sein*) dengan menggunakan teori sosial dan metode sosial sesuai realita yang terjadi (Heri Santoso. 2003:23). Objektif berarti melihat dari kenyataan yang riil benar-benar terjadi dan tidak mengada-ngada.

Ilmu secara nyata dan khas adalah suatu aktifitas manusiawi, yaitu perbuatan melakukan sesuatu oleh manusia. Ilmu merupakan suatu rangkaian aktifitas yang bersifat rasional, kognitif dan teleologis. Aktifitas rasional berarti kegiatan yang mempergunakan kemampuan pikiran untk menalar yang berbeda dengan aktifitas berdasarkan perasaan atau naluri. Ilmu menampakkan diri sebagai kegiatan penalaran logis dari pengamatan empiris. Menurut Bernard Barber pemikiran rasional atau rasionalitas manusia merupakan sumber utama ilmu. Yang dimaksud pemikiran rasional adalah pemikiran yang mematuhi kaidah-kaidah logika, baik logika tradisional maupun logika modern.

Ciri yang kedua dari kegiatan yang merupakan ilmu adalah sifat kognitif bertalian dengan hal mengetahui dan pengetahuan. Filsuf Polandia Ladislav Tondl menyatakan bahwa *science* berarti aktifitas kognitif yang teratur dan sadar. Jadi, pada dasarnya ilmu adalah sebuah proses yang bersifat kognitif, bertalian dengan proses mengetahui dan

pengetahuan. Proses kognitif adalah suatu rangkaian aktifitas seperti pengenalan, penerapan, pengkopsian dan penalaran (antara lain) yang dengannya manusia dapat mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang sesuatu hal.

Ilmu juga bercorak teleologis, yakni mengarah pada tujuan tertentu karena para ilmuwan dalam melakukan aktifitas ilmiah mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini terjadilah bermacam-macam tujuan ilmu, yang salah satunya menurut pendapat Jacob Bronowski ialah menemukan apa yang benar mengenai dunia ini. Aktifitas ilmu diarahkan untuk mencari kebenaran, dan ini dinilai dengan apakah benar fakta-fakta yang diungkapkan itu.

Dalam kaitannya dengan deskripsi di atas, saya berpendapat bahwa Gunnar Myrdal, hanya menekankan aktifitas yang bersifat rasional saja dalam ilmu sosial. Ia menyatakan bahwa etos ilmu pengetahuan sosial adalah mencari kebenaran objektif yang di sebut realisme. Realisme di sini berarti bersifat rasional.

Suatu hal yang kiranya perlu dijelaskan lebih lanjut ialah wujud aktifitas yang bagaimana tergolong sebagai *science*. Dari akar kata latin *scire* yang dapat berarti *to learn* (belajar) tampaknya tidak menyimpang dari kenyataan apabila *science* merupakan rangkaian aktifitas mempelajari sesuatu. Aktifitas seperti ini lazim dinyatakan dengan perkataan "study", "inquiry" atau *search* untuk mencapai kebenaran, memperoleh pengetahuan, dan mendapatkan pemahaman. Penelaahan (*study*) bukanlah menunggu secara pasif sampai sesuatu pengetahuan datang sendiri, melainkan secara giat dengan pikiran mengejar, mencari dan menggali pengetahuan mengenai sesuatu hal yang menarik perhatian. Aktifitas yang demikian ini dikenal dengan penelitian (*research*).

Penelitian sebagai suatu rangkaian aktifitas mengandung prosedur tertentu, yakni serangkaian cara dan langkah

tertib yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah ini disebut metode ilmiah. Metode ilmiah menurut perumusan *The World of Science Encyclopedia* adalah prosedur yang digunakan oleh ilmuwan dalam pencarian sistematis terhadap pengetahuan baru dan peninjauan kembali pengetahuan yang telah ada.

Walaupun Myrdal telah menunjukkan suatu kerangka pemikiran yang rasional, tetap memiliki kelemahan. Metode ilmiah meliputi satu rangkaian langkah yang tertib, yang menurut J. Eigelberner mencakup lima hal:

1. Analisis masalah untuk menetapkan apa yang dicari, dan penyusunan praduga yang dapat dipakai untuk memberikan bentuk dan arah pada telaah penelitian
2. Pengumpulan fakta-fakta yang berhubungan satu sama lain.
3. Penggolongan dan pengaturan data agar supaya menemukan kesamaan-kesamaan, urutan-urutan, dan hubungan-hubungan yang ada.
4. Perumusan kesimpulan-kesimpulan dengan memakai proses-proses penyimpulan yang logis dan rasional.
5. Pengujian dan pemeriksaan kebenaran kesimpulan-kesimpulan itu.

Bila kita membandingkan pendapat Eigelberner dengan Myrdal tentang metode ilmiah, maka Myrdal nampaknya kurang memberikan langkah-langkah metode ilmiah, dalam buku objektivitas penelitian sosial, agar suatu penelitian ilmu sosial menjadi obyektif seperti yang diinginkannya. Dia menggugat obyektifitas penelitian sosial namun tidak memberikan solusi yang tuntas, langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh ilmuwan sosial. Hal ini mungkin karena dalam buku ini Ia hanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya renungan pemikiran.

Myrdal dengan segala upayanya untuk menemukan

adanya objektivitas dalam penelitian sosial memang telah memberikan sumbangan namun Ia sendiri nampaknya tetap terpengaruh oleh ilkim serta pendekatan yang berlaku pada jamannya yang justru Ia malakukan kritik untuk masalah itu. Nampaknya bias-bias pengaruh masyarakat dan tradisi keilmuan pada saat ia hidup tetap masih belum dapat sepenuhnya dihilngkan. Hal-hal lain yang sifatnya masih abstrak seperti tidak dijelaskannya arti metafisika dan *pseuda* obyektif, padahal itu merupakan sifat dari metodologi ilmu sosial. Di bab terakhir yaitu bab 22 tidak dijelaskan pula arti dan maksud dari eskapisme teori.

Dari renungan-renungan yang dilakukan oleh Myrdal tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ilmu sosial, dimana renungan-renungan tersebut adalah merupakan endapan dari pengalamannya selama bertahun-tahun. Ia sebagai peneliti bahkan sebagai ilmuwan terkemuka peraih hadiah nobel, yang dalam renungannya terkadang sangat kritis harus diakui telah menyadarkan para ilmuwan sosial khususnya tentang berbagai kelemahan yang selama ini diderita atau adanya semacam kemunafikan dalam kalangan ilmuwan sosial. Walaupun diakui bahwa apa yang dilakukan oleh Myrdal mungkin lebih merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh generasi ilmuwan berikutnya.

Diantara sumbangan pemikiran Gunnar Myrdal yang bermanfaat dalam metodologi ilmu sosial adalah Ia berhasil menunjukkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh seorang ilmuwan, antara lain ketika seorang ilmuwan menyamakan kondisi ekonomi yang jelas-jelas tidak dapat disamakan. Kesejahteraan orang kulit putih dipakai untuk menganalisis kesejahteraan orang negro. Sehingga timbul kesan kalau orang negro itu miskin. dan orang kulit putih itu kaya. Hal-hal tersebut di atas telah membawa ke arah dua paradoks yaitu:

1. Ketidaksamaan sosial antara negara-negara barat yang

- begitu maju dengan negara-negara berkembang yang miskin dengan tingkat kesejahteraannya rendah.
2. Ahli ekonomi cenderung radikal di bidang lain namun konservatif terhadap kondisi ekonomi.

Dua paradok tersebut mirip dengan teori saling ketergantungan dalam pembangunan sehingga melahirkan *dependency theory*, yang hasilnya adalah ketergantungan negara berkembang terhadap negara-negara maju dan ketidaksamaan sosial makin melebar.

Pemikiran ini juga mengingatkan bahwa ilmuwan sosial jangan menjadi "*scientisme palsu*" yaitu orang-orang yang menghilangkan tanggung jawab riset untuk membentuk pendapat umum, dan memerosotkan pentingnya riset untuk membentuk orang lebih rasional. Mereka juga menutup diri dengan cara menggunakan istilah-istilah rumit dan aneh yang tidak dimengerti. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam hal riset adalah agar kita jangan terjebak dalam kemencengan yang sistematis. Kemencengan tersebut dipengaruhi oleh kondisi budaya, politik, dan kepribadian si peneliti.

Hal penting lain yang dapat dianggap sebagai sumbangan Myrdal, menurut (Dawam Rahardjo, 1988) dalam pengembangan ilmu sosial adalah kejernihan, serta keterusterangan pernyataan Myrdal ditengah-tengah masyarakat Barat pada umumnya serta kalangan ilmuwan sosial pada khususnya yang selama ini memiliki kecenderungan untuk bersikap netral-bebas nilai dalam penelitian sosial, yang dikatakan oleh Myrdal menyembunyikannya dibalik pernyataan netralitas ini. Myrdal mengimbau bahwa penelitian ilmu sosial tidaklah bisa bersifat netral atau bebas nilai karena dibelakangnya sebenarnya ada nilai-nilai yang disembunyikan, maka perlu adanya kejelasan premis nilai yang digunakan. Pernyataan Myrdal ini menjadi memiliki pengaruh yang luas karena ia adalah seorang ilmuwan yang mempunyai karya-karya ilmiah berbobot seperti Dilema

Amerika, Asian Drama, dan banyak karya-karya lainnya yang telah membawanya untuk memiliki penghargaan Nobel, dibidang ilmu ekonomi.

Myrdal juga berjasa mengembangkan suatu pendekatan institusional yang berpandangan bahwa suatu studi ekonomi pada dasarnya adalah suatu ilmu moral (*moral science*) yang secara jelas dan terang-terangan mengemukakan "*value premise*" sejak dari awalnya. Ia juga menganjurkan suatu model penelitian yang dekat pada realitas dan melihat faktor-faktor yang ada dalam hubungan interdependensi?

D. DISKURSUS ISLAM KULTURAL, ISLAM STRUKTURAL, ISLAM POLITIK

Perhatian uraian serta analisis tulisan ini selanjutnya dengan mengambil inspirasi dan menggunakan kerangka Ilmu Sosial Profetik yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, akan berusaha untuk menyajikan suatu telaah Islam politik di Indonesia atau lebih tepatnya ikhtiar untuk menghadirkan perspektif baru pemikiran politik Islam di Indonesia.

Namun sebelum lebih jauh masuk dalam telaah Islam politik, nampaknya penting sekali untuk diketengahkan klarifikasi, berkaitan dengan adanya kesan tumpang tindih antara istilah, *Islam politik*, *Islam struktural*, *Islam kultural*. Diantara cara yang dapat dilakukan untuk memperjelas perbedaan antara ketiga istilah tersebut, perlu dibedakan dua karakteristik perspektif Islam, yaitu pertama, sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam, termasuk dalam konteks tranformasi sosial dan pembentukan sistem nasional. Dalam konteks ini *Islam kultural* mengandung pengertian bahwa sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam dilakukan melalui upaya-upaya yang menekankan pada perubahan kesadaran dan tingkah laku umat (masyarakat) tanpa keterlibatan negara dan tanpa perubahan system

nasional menjadi system Islami. Sedangkan *Islam Struktural*, menekankan upaya-upaya ini melalui penetapan sistem nasional maupun kebijakan publik yang Islami. Upaya semacam ini tidak harus dan hanya dapat dilakukan melalui partai politik Islam, bisa melalui media non-partai politik Islam. (Masykuri Abdilah, 1999:4).

Kedua, ialah karakteristik Islam dilihat dari sisi gerakan Islam yang dikelompokkan pada Islam kultural dan Islam politik. Gerakan Islam kultural adalah aktivitas umat Islam untuk memperjuangkan aspirasinya melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat non-politik, seperti melalui organisasi massa, aktivitas dakwah, lembaga-lembaga sosial. Sedangkan pengertian gerakan Islam politik ialah aktivitas Islam melalui partai politik Islam, yang bisa diidentifikasi melalui penggunaan nama, asas, tujuan ataupun simbol Islam. (Masykuri Abdilah, 1999:4).

Dengan demikian, strategi perjuangan Islam yang memilih model Islam struktural bisa melalui Islam politik (partai politik Islam) maupun melalui model Islam kultural. Sedangkan yang memilih model Islam kultural memilih untuk tidak menggunakan model Islam struktural, tetapi bisa dipadukan melalui Islam politik (melalui partai politik) atau juga bisa tidak memakai partai politik. Sebagai ilustrasi Gus Dur, seorang tokoh yang sejak lama lebih memilih model perjuangan melalui Islam kultural, namun setelah era Reformasi Gus Dur juga menggunakan partai politik (PKB) sebagai alat perjuangannya yang berarti juga menggunakan Islam politik (partai politik). Dengan kata lain Gus Dur menggabungkan antara model Islam kultural dan Islam politik. Sedangkan seorang tokoh yang lain Nurcholish Madjid,¹ memilih untuk tetap konsisten dengan model perjuangan Islam kultural. Sedangkan untuk kasus Amien Rais yang semula berorientasi Islam struktural kini setelah di era reformasi sudah bergeser tidak sepenuhnya

menggunakan lagi Islam struktural maupun Islam politik. Hal tersebut setidaknya-tidaknya tercermin didalam platform PAN, partai yang pendiriannya dimotori oleh Amien Rais dan sekaligus menjadi Ketua Umum I dalam periode 2000-2005. Berikut ini untuk memudahkan perbedaan antara Islam kultural dan Islam struktural dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Bagan Perbandingan Strategi Perjuangan umat Islam kultural dan Struktural

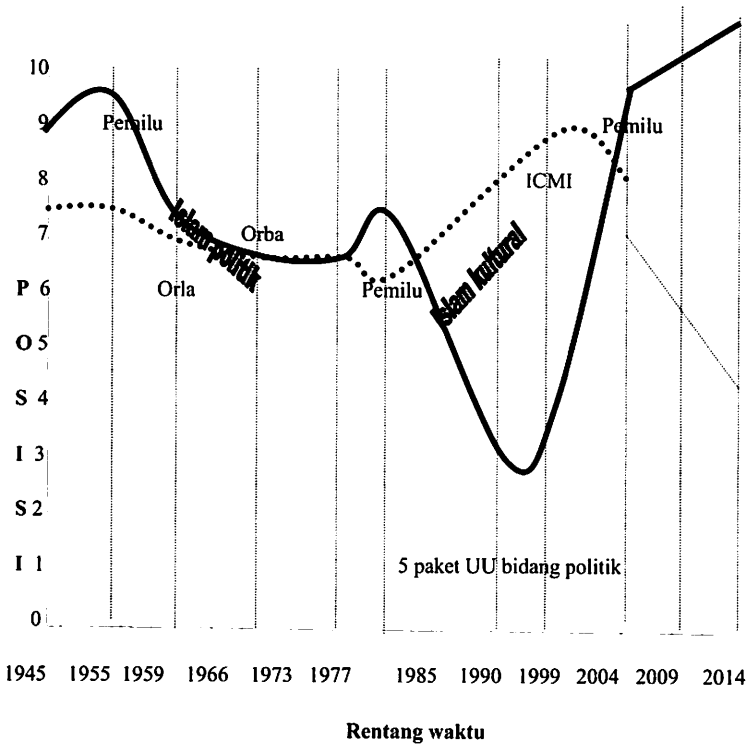
Indikator	Perbedaan strategi	
	Kultural	Struktural
Ciri pokok	Substantif/inklusif	Formalistik/skriptualistik/ Ideologis
Sifat	Horisontal- kemasyarakatan	Vertikal-elitis
Arah/ tujuan/ Sasaran	Mempengaruhi perilaku Sosial/cara berfikir masyarakat	Mempengaruhi/ mengubahStruktur (legislatif, eksekutif)
Metode	Penyadaran dan <i>moral force</i>	Pemberdayaan dan aliansi
Sarana	Simposium, seminar, diskusiceramah, da'wah, lobi, penerbitan media massa, Lembaga Pendidikan	Sarana politik/struktur teknis, berupa birokrasi, lembaga-lembaga, partai- partai dan semua usaha yang mempengaruhi pada pengambilan keputusan politik
Jangkauan	Titik berat pada individu keperluan jangka panjang	Mobilitas kolektivitas untuk keperluan jangka pendek

Sumber dari Thesis, Suwarno, **Muhammadiyah, Islam, dan Runtuhnya Orde Baru**, (Yogyakarta, UGM, 2000), hlm. 33.

Sehubungan dengan penggunaan istilah Islam politik dan Islam kultural, sebenarnya masih menyisakan pertanyaan, sejauh manakah keabsyahan dikontaminasi, “Islam politik” dan “Islam kultural”? Hal ini dikarenakan, sekalipun istilah “Islam politik” digunakan di Timur Tengah, akan tetapi model penghadapan “Islam politik” dan “Islam kultural”, hampir tidak dijumpai dalam wacana politik Islam di wilayah-wilayah lain dunia Muslim, khususnya di Timur Tengah, kecuali di Turki. (Gulap Halil, 1999). Kenyataan tersebut terutama berkaitan dengan pandangan dunia yang dianut oleh kaum Muslimin, yang pada umumnya masih memegang suatu perspektif bahwa melihat bahwa antara agama (*dien*) dan negara (*dawlah*) atau politik (*siyasyah*) memiliki hubungan yang erat, bahkan sebagiannya melihatnya sebagai suatu kesatuan. Sekalipun pandangan ini mengalami banyak gugatan dan tantangan pada masa modern dari sistem politik sekuler, (Azyumardi Azra, 1999:76) tetapi pengaruh sekularisasi politik di dunia Muslim memang ditemukan dalam kadar yang minimal. (Dawam Raharjo, 1999:xv-xvi).

Perspektif yang lain tetapi masih dalam konteks Islam di Timur Tengah, memandang bahwa “Islam politik” adalah refleksi dari gerakan kebangkitan Islam, dan identik dengan fundamentalisme Islam. Dalam pandangan perspektif ini Islam politik yang merupakan bagian dari fundamentalisme Islam adalah merupakan ideologisasi Islam jadi bukan keyakinan Islam itu sendiri. (Bassan Tibi, 2000:35 Bassan Tibi, 2000:199, 204, 214)

Gambar. 10
Grafik Perjalanan Islam Politik dan Islam Kultural 1945-2014



Keterangan grafik

Garis — menunjukkan Islam politik

Garis menunjukkan Islam kultural

Grafik di atas memberikan ilustrasi dinamika perjalanan Islam politik, yang direpresentasikan keberadaannya melalui partai-partai politik Islam, serta Islam kultural sebagai lawan dari Islam politik yang biasa melakukan aktivitasnya

melalui saluran non politik. Indikator yang digunakan untuk melihat posisi Islam politik ialah dilihat dari simbol Islam, doktrin Islam, lembaga Islam, *policy*, aktor Islam. Dinamika Islam politik, menunjukkan proses pasang naik pada awalnya ketika dimulai demokrasi parlementer, kemudian mengalami proses surut ketika dimulai jaman pemerintahan Orde Lama atau demokrasi terpimpin.

Proses surut tersebut terus berlanjut ketika memasuki jaman pemerintahan Orde Baru, bagi Islam politik ada waktu jeda proses pasang naik yakni antara 1971 -1977, namun setelah rentang waktu tersebut karena berbagai persoalan intern partai dan kebijakan depolitisasi Islam (deislamisasi partai), perkembangan selanjutnya Islam politik mengalami proses surut hingga sampai ke titik nadir, pada tahun 1985, yakni dengan diberlakukannya kebijakan depolitisasi Islam dan deislamisasi partai politik. Dengan ditandai keluarnya lima paket undang-undang bidang politik. Masa surut dari Islam politik ini terus berlanjut hingga jatuhnya pemerintahan Orde Baru, setelah jatuh pada tanggal 20 Mei 1998, kemudian berganti dengan pemerintahan Transisi di bawah kepemimpinan Habibie, Islam politik mulai menunjukkan proses pasang naik. Hasil Pemilu Tahun 1999 dan Pemilu 2004, 2009 dilihat secara simbolik, ideologis dan aktor telah menunjukkan adanya kebangkitan kembali Islam politik di Indonesia. Perjalanan Islam politik ini berbeda dengan proses pasang surut dan naiknya Islam kultural, dapat dikatakan bertolak belakang. Islam kultural mengalami proses pasang naik justru ketika Islam politik sedang mengalami proses surut.

E. FENOMENA OBJEKTIF ILMUWAN MUSLIM

Meminjam istilah Ibnu Kaldun, mencoba mencari *'itibar*, mencari pelajaran dan makna, di balik teks yang

telah tersaji. *'Itibar* dalam kadar tertentu adalah merupakan suatu pergulatan intelektual seorang penulis, yang tidak hanya sekedar melibatkan fungsi pikir tetapi sekaligus juga melibatkan nurani (*bashiroh*), ketajaman batin. Inilah dua karakter yang harus dimiliki oleh seorang intelektual, untuk memungkinkan dirinya menghasilkan sebuah analisis yang tajam, kritis, serta mencerahkan. (Ibnu Khaldun, 1986:58-59).

Dari berbagai perspektif sebagaimana telah dikemukakan di atas, bagian ini ingin memberikan sumbangan kontribusi bagi lahirnya perspektif teori politik Islam atau perspektif sosial profetik dalam ilmu politik, betapa pun kecilnya, kontribusi tersebut. Obsesi itulah yang telah memberikan energi luar biasa bagi penulis untuk menelusuri, lembar demi lembar, kalimat demi kalimat, dari berbagai literatur, untuk menggapai obsesi tersebut.

Dari penelusuran dan pergulatan intelektual yang penulis alami, dalam benak pemikiran penulis, hadir dua hal yang sangat mengusik pemikiran. Dua hal tersebut ialah,

Pertama; keprihatinan penulis kepada hampir seluruh cendekiawan yang lahir dari komunitas Muslim terbelah sikapnya, dalam menghadapi perspektif teori yang datang dari Barat. Disatu pihak ada yang berpandangan bahwa modernitas (yang datang dari Barat) adalah tidak bertentangan dengan Islam dan sebaliknya Islam juga modern. Sikap ini dalam masalah ilmu memiliki pandangan kurang lebih dapat dirumuskan bahwa teori-teori ilmu sosial yang datang dari Barat tidak ada persoalan apa-apa serta sesuai dengan wawasan keislaman, mereka berargumen karena semua ilmu itu pada dasarnya adalah netral.

Perspektif seperti ini dalam pandangan kami tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu, hal ini dikarenakan sikap jiwa yang *jumud* seperti ini, telah menghilangkan sikap kritis, yang merupakan bagian

sangat penting bagi perkembangan suatu ilmu, karena justru dari kritik itulah dapat diketahui kelemahan suatu teori tertentu untuk disempurnakan atau bahkan digugurkan dan ditinggalkan untuk diganti dengan sebuah teori baru yang lebih unggul. Tetapi adalah sesuatu yang ironis, karena dalam kenyataannya hampir seluruh orang-orang terpelajar Islam yang belajar ke Barat, tidak berani dan tidak ada keberanian untuk mengkritik perspektif teori yang dipelajarinya, bahkan sikap yang terjadi adalah sangat mendewakan teori-teori yang berasal dari Barat.

Walaupun harus segera dicatat beberapa intelektual sudah menyadari bahwa sikap jiwa seperti itu adalah tidak benar, sehingga sudah mulai muncul kesadaran perlunya menyusun suatu paradigma ilmu yang diturunkan dari nilai-nilai Islam. Ilmuwan yang telah mencoba merintis ke arah tersebut, antara lain, Dr. Ismail Ra'ji Al Faruqi, ² Dr. Zianuddin Zardar, Dr. Iqbal, sementara itu intelektual dari Indonesia yang telah mencoba merintis dapat disebut nama Dr. Kuntowijoyo. ³ Sikap kritis kepada perspektif teoritis yang datang dari Barat, tidaklah berarti menutup diri dan mengharamkan semua yang datang dari Barat.

Sikap kritis di sini memiliki makna tetap menyediakan ruang untuk berdialog dengan pemikiran yang datang dari Barat, dengan tujuan bukan untuk meniru dan membeo pada perspektif teori politik Barat, tetapi adalah untuk menemukan ibrah (puncak-puncak pemikiran cemerlang), hal ini dikarenakan karena sesungguhnya peradaban Islam adalah titik pertemuan dari setiap perkembangan peradaban dunia dari manapun datangnya, sepanjang memberikan manfaat bagi keselamatan hidup manusia. Dengan kata lain sebuah sikap jiwa untuk menerima semua perspektif pemikiran Barat, sulit untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan dan perkembangan suatu ilmu, juga bagi kemajuan umat, kecuali hanya untuk sekedar pelipur lara, sementara waktu saja

untuk menyembunyikan kelemahan dan keterbelakangan yang ada.

Sementara itu di pihak yang lain, juga ada sikap sebagai cendekiawan (ulama) yang menafikan segala sesuatu yang datang dari selain Islam, sikap menutup diri seperti ini disamping tidak membawa banyak kemajuan bagi umat Islam juga tidak sesuai dengan model kehidupan yang Nabi Muhammad saw, wasiatkan kepada umatnya, yang justru menyuruh umatnya untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu sampai pun ke negeri Cina. Kedua sikap sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya tidak cukup untuk mendorong agar umat ini memiliki harga diri, memiliki keunggulan di depan umat Manusia, seperti Allah ilustasikan sebagai umat terbaik (*khoiro umat*).

Kedua, adalah sikap sebahagian cendekiawan yang disatu sisi memberikan kritik yang tajam pada perspektif teoritis yang diajukan oleh para cendekiawan muslim abad pertengahan yang dikatakannya normatif, sementara itu ia tidak mampu memberikan kritik yang tajam dan cerdas pada perspektif teoritis yang ditawarkan oleh cendekiawan dari barat. Tipe cendekiawan seperti ini, dengan mudah menyatakan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang politik, kalau ada konsep politik Islam, mana tunjukan! Sikap seperti ini dalam kadar tertentu adalah menunjukkan sikap pesimis, tidak ada etos dan kreativitas, untuk menghasilkan dan menggali pemikiran Islam untuk dapat disumbangkan bagi kemanfaatan umat manusia. Sikap cendekiawan seperti dikemukakan di atas dari sisi pengembangan teoritis tidak memberikankan sumbangan apa-apa, kecuali hanya ikut menyebarkan teori-teori yang di impor dari bangsa lain, yang sebetulnya belum tentu sesuai untuk menganalisis problem yang timbul di Indonesia.

Sikap yang *fair* bagi seorang cendekiawan – khususnya dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam –

seharusnya tidak memilih satu diantara perspektif sebagai telah disebutkan di atas. Ia idealnya memiliki dua kemampuan sekaligus yakni di satu sisi ia tetap konsisten dengan prinsip keimanannya serta dalam waktu yang bersamaan ia juga dapat berdialog dengan cerdas dengan pemikiran-pemikiran yang datang dari peradaban manapun, termasuk yang datang dari peradaban Barat dalam bidang pemikiran politik. Namun kenyataan telah menunjukkan betapa sulit dan berat untuk menjadi seorang cendekiawan yang di satu sisi tetap kokoh dengan prinsip-prinsip keyakinan agamanya dan di sisi yang lain ia mampu berdialog dengan fasih – cerdas berhadapan dengan pemikiran dari peradaban manapun. Untuk konteks Indonesia secara personifikasi karakter tersebut, kita dapat melihatnya pada ketekunan dan pergulatan sunyi yang telah diteladankan oleh Kuntowijoyo, penggagas Ilmu Sosial Profetik.

F. POLITIK ISLAM: IKHTIAR MEMBANGUN UMAT?

Dari studi yang penulis telah ditemukan pelajaran betapa sulitnya menemukan suatu teori politik Islam yang sistematis dan operasional, yang telah diterima dalam wacana akademis. Hal yang demikian dapat terjadi dikarenakan hampir semua pembahasan tentang teori politik Islam yang dicetuskan pada abad pertengahan dari Imam Mawardi bahkan sampai Al Afghani di abad dua puluh, mengandaikan masih tegaknya struktur politik Islam yang disebut dengan *Khilafah*. Maka ketika lembaga Khilafah ini semenjak tahun 1924 hilang dari dunia Islam, telah menyebabkan teori-teori politik Islam tersebut, sulit menemukan penjelasannya dalam realitas kehidupan.

Sementara itu, kini mulai tumbuh kesadaran bahwa menggunakan semua perspektif teori politik Barat, yang dibangun di atas filosofis, epistemologi, asumsi-asumsi, yang

dipengaruhi situasi sosial kemasyarakatan yang memiliki prinsip menentang keterlibatan agama dalam wilayah publik, adalah tidak cukup memadai untuk mengalisis fenomena politik yang terjadi pada suatu masyarakat yang di dalamnya hidup pandangan sangat berkeinginan untuk melibatkan agama dalam wilayah publik.

Dalam perspektif Islam tidak mengenal pemisahan antara masalah agama dengan politik, sebagian yang lain memandang Islam dan negara itu sesuatu yang terpisah. Namun disadari juga bahwa hal tersebut adalah sebuah realitas yang hidup di Indonesia, dengan demikian pembahasan tidak dapat meloncat dengan mengandaikan jika sudah berdiri negara Islam ataupun khilafah Islamiyah. Pembahasan jauh lebih bermanfaat jika diarahkan untuk menghadapi persoalan real yang dihadapi pada dunia nyata, serta mencari kemungkinan-kemungkinan bukan mencari hanya keharusan yang mesti normatif. Walaupun dengan sebuah kesadaran bahwa kondisi seperti ini sulit untuk menghasilkan sebuah produk analisis teori yang benar-benar dapat keluar dari keterpasungan cara berpikir yang sudah menghegemoni serta mentradisi dalam dunia akademis. Sebagai konsekuensinya akhirnya menjadi sangat sulit untuk menghasilkan suatu produk analisa atau perspektif teori baru yang dapat berlaku lama, serta memiliki manfaat besar bagi perkembangan ilmu.

Namun kesadaran akan pentingnya, sebuah perspektif teoritis yang disatu sisi tidak terhegemoni oleh teori politik Barat yang disadari mengidap sejumlah kelemahan serta di sisi yang lain tidak hanya bersifat normatif sehingga kehilangan daya kontekstualnya, sering terbentur pada banyak keterbatasan iklim kehidupan akademis yang didominasi oleh suasana yang mendorong untuk menerima saja setiap perspektif teori yang ada. Hal demikian sehingga sering kali mematahkan semangat untuk mengkaji topik

dengan suatu perspektif teori yang mencoba keluar dari tradisi yang selama ini berlangsung.

'Tibailain yang dapat diambil dari kelahiran kembali Islam politik di Indonesia, paling tidak telah memunculkan dua persoalan; Pertama dari sisi empiris ternyata kelahiran kembali Islam politik pada masa pasca regim Orde Baru, tidak mendapatkan dukungan sebesar yang diraih oleh partai-partai nasionalis seperti PDIP dan Golkar. Lebih dari itu, nampaknya dalam sejarah modern Islam belum pernah ada bukti yang meyakinkan bahwa umat Islam menjadi maju secara ekonomi, ilmu, moralitas dengan memilih partai politik sebagai instrumen perjuangannya.

Kedua, kelahiran kembali Islam politik, dalam batas tertentu telah melahirkan tuduhan 'stigma' dari elemen kekuatan di luar Islam, bahwa partai-partai politik Islam itu bersifat sektarian. Walaupun segera ditambahkan bahwa stigma tersebut masih membuka peluang untuk diperdebatkan. Berkaitan dengan kelahiran kembali Islam politik, sesungguhnya jika dilacak lebih jauh lagi adalah merupakan suatu ijtihad politik, yang lahir dari kondisi umat Islam yang sedang mengalami kemunduran secara global, demikian juga dengan fenomena kelahiran kembali Islam kultural, lebih khusus lagi untuk kasus Indonesia.

Indikator bahwa pilihan model perjuangan melalui Islam politik adalah sesuatu yang *debatable* adalah adanya bukti dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, dimana kemunculan model perjuangan melalui Islam politik, justru didorong oleh faktor sikap negara yang akomodatif pada aspirasi umat Islam. Model perjuangan melalui Islam politik tidak dipakai justru pada saat negara menggunakan kebijakan yang represif pada umat Islam, hal ini setidaknya-tidaknya berlangsung selama Orde Baru. Dari fenomena tersebut, dapat ditarik suatu pelajaran bahwa model perjuangan Islam politik memiliki keterbatasan daya berlakunya serta tidak

dapat dipakai secara memuaskan untuk menjadi instrumen perjuangan umat Islam justru dalam keadaan terpinggir. Hal ini berbeda dengan kondisi yang terjadi di negara –negara Timur Tengah seperti Iran, Sudan, dalam keadaan tertekan justru Islam politik dapat dipakai sebagai instrumen perjuangan umat Islam.

Namun walaupun demikian, pilihan sebahagian komunitas Islam untuk memakai Islam politik, dapat dibaca sebagai sebuah langkah yang mungkin untuk dikerjakan, dalam rangka memperjuangkan aspirasi umat Islam, dalam sebuah negara kebangsaan (*nation state*) yang telah memiliki konsensus bahwa agar kekuatan infrastruktur politik untuk dapat mempengaruhi (*supra struktur politik*) perubahan policy negara, disalurkan melalui partai politik. Tentu dengan sebuah kesadaran bahwa model Islam politik, tidaklah mungkin dapat menjadi solusi yang memutuskan untuk mengkover seluruh problema umat Islam, bahkan mungkin dapat menimbulkan problema seperti konflik antar umat Islam yang berbeda partai politiknya, serta masih tetap perlu dipertanyakan apakah merupakan sebuah model yang diderifat dari prinsip-prinsip Islam ataukah hanya pilihan yang sifatnya duniawi yang diserahkan pada tingkat peradaban manusia.

Nampaknya prospek kehidupan politik di Indonesia, khususnya tentang pasang surut Islam politik, tetap dalam kadar yang signifikan akan dipengaruhi oleh dinamika sifat hubungan antara Islam dan negara, yang sampai awal abad ke-21, belum menemukan formatnya yang final, disamping juga dipengaruhi oleh perkembangan persepsi pemikiran umat Islam Indonesia pada sebuah institusi yang bernama negara. Sebagaimana juga dalam kasus yang hampir sama juga dijumpai di negara lain, seperti Pakistan, Turki, Sudan, Al Jazair, ternyata untuk menemukan format hubungan antara Islam dan negara adalah merupakan persoalan yang

kompleks, yang tidak mudah untuk dicari formulasinya. Kesulitan tersebut terjadi antara lain antara Islam dan negara, (negara kebangsaan) adalah dua hal dari sisi sejarah kelahirannya serta secara substansial memiliki potensi untuk terjadinya konflik. Potensi konflik itu terjadi dikarenakan dari awalnya negara kebangsaan itu berdiri dalam sejarahnya dari negara Eropa, ada semacam misi untuk mengurangi atau bahkan menafikan peran agama dalam kehidupan politik kenegaraan. Hal itu tercermin dari sebuah ungkapan "*serahkan negara pada raja dan gereja pada pendeta*".

Dengan kondisi seperti itu, maka pilihan komunitas Islam untuk memilih model perjuangannya melalui jalur Islam politik yang direpresentasikan melalui partai politik Islam, selalu terbuka kemungkinan untuk saling melakukan penetrasi ideologi. Saling penetrasi ini terjadi karena antara Islam politik dan negara kebangsaan dalam dirinya memiliki berbagai perbedaan, baik misi, maupun tujuan. Diantara perbedaan yang paling mendasar adalah dalam pandangan negara kebangsaan yang paling penting adalah kepentingan bangsa, semua elemen bangsa berbakti untuk kejayaan bangsa (*nilai patriotisme*) sementara itu Islam politik memandang bahwa negara, kekuasaan politik hanya alat untuk mencapai tujuan, yakni demi tegaknya hukum Allah (*syari'at Allah*). Dalam konteks permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, nampaknya kebutuhan untuk mencari titik temu antara Islam politik dengan negara, adalah merupakan hal yang sangat mendasar untuk dapat terwujudnya suatu kehidupan politik di Indonesia yang berperadaban.

Kehadiran partai-partai politik Islam dilihat dari kepentingan intern umat Islam disamping memberikan harapan untuk dapat dipakai sebagai instrumen bagi upaya perbaikan kondisi umat, namun juga dapat menimbulkan dinamika internal. Dinamika internal bahkan konflik bisa muncul dikarenakan tidak semua elemen umat Islam -

karena perbedaan latar belakang pendidikan, orientasi keislaman, sosialisasi dan interaksinya dengan Islam – setuju dan memilih Islam politik sebagai model perjuangan Islam. Dalam kenyataannya banyak anggota dari komunitas Islam yang tidak setuju bahkan berseberangan dengan model perjuangan Islam politik.

Diantara kemungkinan-kemungkinan konsekuensi yang timbul di masa depan, apakah model perjuangan melalui Islam, akan tetap dipertahankan atau diganti dengan model perjuangan lain, menurut hemat kami akan sangat ditentukan oleh dialektika hubungan antara Islam dan negara. Dari sisi Islam kemampuan daya penetrasinya sangat dipengaruhi oleh infrastruktur politik dan intelektual yang dimiliki oleh umat Islam. Sedangkan dari sisi negara akan sangat ditentukan oleh aktor-aktor mana yang akan mendominasi posisi-posisi penting dalam jabatan publik di Indonesia. Dalam pandangan penulis konsensus yang realitis, dalam menemukan format hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, adalah tidak memaksakan diri untuk meniru perspektif yang dipakai di negara-negara barat yang sekuler demikian juga tidak bisa memaksakan untuk menggunakan model Islam secara seratus persen yang ditawarkan oleh Islam politik, karena disadari Islam politik, sebagai sebuah hasil ijtihad politik, tidaklah berarti Islam itu sendiri, selalu ada gap antara Islam dengan partai politik Islam (Islam politik).

Namun perlu dicatat bahwa realitas kehidupan politik tidaklah seindah dalam *text books*, dalam realitasnya acap kali menggunakan politik massa dan kekerasan untuk menekan pihak lain dalam memperjuangkan kepentingannya. Dan sering kali kepentingan yang bersifat ideologis (Nasionalisme, Islam) diperjuangkan dengan politik kekerasan, sehingga sering kali hal-hal yang ideologis itu tercemari oleh politik kekerasan. Kondisi seperti inilah

yang membuka peluang untuk lahirnya stigma bahwa partai politik baik yang nasionalis maupun yang Islam, hanya menjadikan nilai-nilai nasionalisme dan Islam, sebagai jubah perlindungan untuk menyembunyikan kepentingan. Karena nilai-nilai nasionalisme dan Islam lebih diposisikan sebagai jubah (kedok) untuk menyembunyikan kepentingan kekuasaan, acap kali para aktor politik dalam mencapai tujuan mengabaikan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama, sehingga munculah ungkapan “tujuan menghalalkan cara” ironisnya politik kotor, saling membunuh, saling memfitnah juga terjadi diantara para pendukung partai (kelompok) yang membawa panji-panji agama.

G. MUSLIM NEGARAWAN: LENTERA KECIL MENUJU POLITIK PROFETIK

Penulis memiliki hipotesis bahwa *spirit* dari diskursus tentang “Muslim Negarawan”, adalah untuk *counter hegemoni*, dari diskursus ‘muslim bukan partisipan dari negara’, dan sebaliknya orang Islam (komunitas Islam) memiliki hak yang sama dengan elemen bangsa lainya untuk memakai predikat negarawan, yang disebut sebagai ‘muslim itu negarawan’. *spirit* tersebut dapat dibaca sebagai *standing position* untuk melakukan ikhtiar dekonstruksi terhadap diskursus yang selama ini sudah mapan. Diskursus yang diproduksi oleh negara dan para aktor negara yang selama beberapa periode berkemampuan mengelola negara Indonesia.

Dari sisi positif *standing position* ini juga dapat dibaca bahwa seorang muslim yang hidup di Indonesia memiliki niatan yang positif untuk memberikan kontribusi demi kebaikan, kemajuan dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Memberikan kontribusi ‘amal sholeh’ bagi bangsa Indonesia adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari beramal sholeh bagi umat manusia, beramal sholeh bagi kemaslahatan

bangsa Indonesia juga dalam kerangka kemaslahatan umat sebagaimana dianjurkan dan kompatibel dengan misi kenabian yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ikhtiar dan kerja-kerja intelektual untuk melakukan pembongkaran terhadap diskursus yang sudah mapan, sangat penting untuk memberikan payung intelektual bagi membuka keterlibatan Muslim dalam menggunakan dan mengelola negara yang bernama Indonesia. Basis argumentasi yang mapan bagi keterlibatan dan hak moral orang Islam dalam menggunakan negara atau bekerja dalam rangka negara sangat penting dan strategis. Hal tersebut antara lain dikarenakan selama Indonesia berdiri ada semacam diskursus yang tidak *balance*, tentang penggunaan kata negarawan, seolah-olah bukan untuk para aktivis Islam, mengapa?.

Dalam kontestasi antar ideologi yang hidup di suatu bangsa, khususnya untuk konteks Indonesia dalam waktu yang panjang demikian jika Islam diposisikan sebagai ideologi, sementara itu juga ada ideologi lain seperti nasionalisme, sosialisme, maka kemusliman-keislaman seseorang sering kali menjadi *barrier* untuk tampil dalam politik Indonesia.

Ideologi Islam yang biasanya dipadankan dengan perjuangan menegakkan syariah Islam (Piagam Jakarta), yang diangkat oleh para aktivis Islam khususnya partai-partai Islam, seolah-olah menjadi langkah untuk membentuk citra tidak berhak atau setidaknya dipertanyakan jika para aktivisnya memakai sebutan negarawan. Pendek kata, pintu syariah versus non syariah dalam wacana hampir selalu dimenangkan oleh kelompok non syariah. Para aktivis yang mengusung non syariah seolah lebih berhak menjadi negarawan.

Problematika negara Islam? berkaitan dengan isu

syariah Islam, hal ini ada kaitannya dengan problematika Negara Islam. Yakni dengan label negara Islam tidak serta merta ajaran Islam dan umat Islam menjadi semakin berkualitas, jika Islam itu hanya dijadikan sebagai komoditas saja. Maksudnya Islam hanya dijadikan sebagai mobilisasi loyalitas umat dalam momen-momen politik.

Masuk pada pertanyaan mendasar yang menjadi tema sentral diskusi menurut penulis perlu dipertanyakan, Muslim negarawan mungkinkah? Jawabannya adalah Mengapa tidak? Persoalannya pada sisi empiris politik di Indonesia, oleh berbagai kekuatan politik yang ada, dijumpai suatu realitas politik yang menyatakan kurang lebih bahwa Politik Islam selalu dipersepsi sebagai partisan, faksional.

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan wacana peminggiran politik Islam mengapa wacana-pengetahuan kolektif-masyarakat Indonesia berpandangan bahwa Islam itu partisan kelompok tertentu bukan aktor yang pantas mewakili negara. Sekiranya ada aktor dari kalangan Islam yang mewakili negara atau masuk bekerja dalam ranah negara tetap saja ada semacam gugatan atas kenegarawannya. tetap ada tanda tanya?

Mengapa wacana itu melekat? Hal tersebut antara lain dapat dijelaskan melalui struktur pemaknaan politik Islam yang diposisikan hanya sebagai sub dari politik negara, gambaran tersebut antara lain terlukiskan dalam buku klasik karya Lance Castle dan Herbet Fieth, "Pemikiran Politik Indonesia", dan karya-karya para sarjana lain yang datang sesudahnya, berbeda dengan pandangan komunitas Muslim dalam banyak pengajian yang berkeyakinan 'Islam kaaffah' fakta empirisnya belum sejalan dengan keyakinan umat Islam.

Padahal sebagaimana diketahui Wacana itu merupakan software untuk menggiring perilaku konkrit. Hal tersebut

didukung oleh adanya kenyataan banyak orang merasa tidak bersalah memiliki pandangan atau setuju dengan pandangan bahwa politik Islam adalah sub dari institusi lain, itu bukti bahwa wacana mengendalikan perilaku.

Warisan sekularisme hadir di Indonesia dan mengkerangkai cara berfikir kita tentang negara. Bukti adanya kekuatan sekularisme dapat dilacak pada adanya kenyataan terjadinya ketegangan Islam dan nasionalis pada tahun 1950-an yang efeknya masih terasa sampai hari-hari ini. Dalam kontestasi ini ternyata umat Islam tidak bisa mengendalikan *frame* yang digunakan untuk mengarahkan masyarakat Indonesia, khususnya para elitnya.

Dengan demikian tidak salah kiranya jika dinyatakan bahwa Muslim negarawan itu merupakan perjuangan pada arus lembut (*software*) untuk perjuangan diaras lain, seperti ekonomi, politik, kebudayaan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Jika umat Islam tidak berhasil membongkar hegemoni pemikiran-diskursus-yang selama ini bercokol dalam benak pemikiran masyarakat Indonesia maka keberhasilan perjuangan pada aspek lainnya menjadi sempit peluang keberhasilannya. Dalam jangka panjang ketika secara akumulatif diskursus politik kenegaraan tertutup bagi peran-peran aktivis Muslim, maka tinggal soal waktu peran-peran secara real dalam politik kenegaraan akan tertutup.

Bagaimana cara membongkarnya? Pembongkarannya dapat dirunut dengan membaca ulang secara kritis bahwa kehadiran negara kebangsaan '*nation state*' yang pada saat nanti menjadi pijakan-lapangan bermain (kompetisi) antara berbagai aktor yang menisbahkan dirinya dengan negara, dalam kehidupan politik modern dikerangkai dengan tatanan sosial yang disebut demokrasi. Dengan kata lain pintu masuk untuk bisa menggunakan instrumen negara secara sah adalah hanya melalui tatanan demokrasi (*the only*

one game in town).

Dalam *frame nation state* yang dirangkai dengan tatanan demokratis, peluang pintu masuk untuk menggunakan instrumen negara bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat Islam adalah melalui partai politik. Tidak banyak tersedia pilihan lain kecuali lewat partai politik. Disinilah titik persoalan dan delimma mulai ditemukan. Mengapa? yakni karena muslim harus lewat pintu partai, dalam memasuki ranah negara, oleh karenanya menjadi berpeluang dan diberi cap partisan. Tidak merupakan wakil seluruh warga bangsa dan karena hal tersebut menjadi banyak kendala untuk lahir menjadi Muslim Negarawan dari kalangan aktivis Partai Islam di Indonesia.

Menghadapi kondisi yang kompleks ini, kita perlu bertanya masih adakah secercah harapan untuk memulai langkah-langkah dekonstruksi? Dalam pandangan penulis sebenarnya dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia cukup tersedia eksperimen yang bisa menjadi inspirasi untuk melakukan dekonstruksi hegemoni yang meminggirkan Islam. Eksperimen yang dimaksud adalah adanya strategi gerakan dakwah politik kultural yang lebih populer dengan istilah kembali ke khittah NU 26. Dalam konteks pembahasan ini gerakan kembali ke khittah 26 dapat dibaca sebagai benih-benih pemikiran agar keislaman seseorang tidak menjadi *barrier* untuk menjadi negarawan di Indonesia (Islam substantial). Demikian juga angkah yang sama dilakukan oleh Muhammadiyah dengan kembali ke khittah 1971, serta gerak Dewan Dakwah Indonesia pada era pemerintahan Orba dalam batas tertentu dapat dibaca sebagai untuk melakukan dekonstruksi hegemoni yang memonopoli pengelolaan negara untuk kelompok tertentu.

Mempertimbangkan dilema dan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh umat Islam mungkin bermanfaat untuk dipertimbangkan suatu pandangan bahwa Keislaman itu

tidak harus dimulai dari syariah, tetapi keislaman itu dapat dimulai dari sisi akhlak, yang kemudian menjadi kenyataan sosiologis, menjadi perilaku masyarakat yang kemudian pada tahapannya menjadi norma, lembaga, dan struktur sosial, ekonomi dan harus diakomodasi dalam berbagai kebijakan negara.

Partai-partai Islam seperti halnya PKS, PPP dll, berada dalam posisi unik karena pada satu sisi masuk wilayah partai siap untuk dicap sektarian tetapi inline untuk menjadi negarawan, dengan demikian tingkat kesulitan yang dihadapinya menjadi lebih rumit. Pintu masuk ke wilayah negara bisa melalui organisasional (semisal partai, ormas) dengan demikian kehadirannya dalam ranah negara bukan hanya kebetulan tetapi didisain, dengan segala perlengkapan intelektual yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini maka kaderisasi pemimpin perlu dilakukan dengan dua wajah, yakni melalui partai, agar tahu mendan politik (keakuan) sebagai kelompok umat, tetapi juga pada saat lain menduduki jabatan simbolik sebagai representasi negara, supaya muncul 'kekamian' keIndonesiaan? Apakah partai partai Islam (PKS, PPP, PBB, PAN, PKB) dan lainnya sudah melakukan pengkaderan model itu.

Perlu disadari bahwa negara yang demokratis tidak akan terwujud jika setiap faksi berhenti dan selesai pada berfikir model faksi "keakuan" saja, melupakan berfikir kekamian. Memperkuat pernyataan diatas dapat disemak bahwa agenda reformasi yang telah dikumandangkan menjadi berceceran karena hampir setiap orang berfikir keakuan saja (banyak orang membuat partai hanya dalam kerangka keakuannya kelompoknya saja) dan ini cermin miskinnya negarawanan di Indonesia. Kecenderungan praktek politik sekarang lebih banyak memperagakan pintu politik yang faksionalis

Bagaimana dengan aktor politik yang disebut "Tentara",

tentara dilihat dari historisnya itu berasal dari gerakan rakyat. Oleh karenanya TNI *legitimate* berpolitik atas nama negara, tetapi ketika berpolitik berubah menjadi faksi yang menyusup melalui DPR pada jaman Orde Baru. Dan baru pada era reformasi sampai sekarang kembali ke barak. Di era pasca reformasi kalau kembali berpolitik tentara berpolitik dengan politik "negara". Patut dicermati pula bahwa ada sinyalemen bahwa tentara seolah-olah membagi peran yakni pensiunan masuk politik sebagai katup pengaman, jika terjadi perkembangan yang tidak dikehendaki tentara sudah ada yang berada dalam wilayah politik. Terkait dengan peran sentral tentara perlu dicermati ulang bahwa tawaran format menjadi negarawan ala orde baru, yang berlangsung sekitar 30 tahun adalah bukan melalui partai. Bahkan dengan cara melumpuhkan partai. Seakan memperagakan bahwa keutuhan Indonesia dikelola oleh tentara melalui lembaga yang zatnya partai tetapi namanya bukan partai. karena tatanan seperti itu tidak diterima secara luas maka tentara diminta kembali ke barak, tentara profesional tapi juga menghadapi masalah baru tidak punya anggaran.

Bagaimana negarawan secara real ada dalam politik indonesia? Kiranya dapat dinyatakan bahwa negarawan tidak bisa lepas dari politik. Siapapun yang akan menjadi negarawan harus mampu mengarungi medan politik. Sampai sejauh ini Muslim belum bisa menjadi icon negarawan, karena terjebak politik identitas, politik muslim, dipertontonkan lebih untuk menggalang mobilitas loyalitas secara periodik untuk kursi, politik muslim terseret loyalitas kelompok, tidak menggarap nilai substansi Islam, termasuk politik identitas negara Islam.

Muslim negarawan adalah mengelola negara dengan akhlak Islam. Dalam konteks berfikir negara maka mensubsidi orang miskin melalui birokrasi, melalui data based yang jelas, melalui anggaran, yang kemudian hadir dalam kebijakan, serta standar operasional. Orang bisa

menjadi Indonesia (nasionalis, negarawan) dan menjadi muslim yang baik. Kecuali ada eksepsi dalam hal akidah.

Birokrasi selama ini belum bekerja untuk menjadi instrumen negara menjadi orang Islam menjadi negarawan, kalau ada instrumen negara untuk menjalankan membela orang miskin dan sejenisnya maka berimpit dengan nilai-nilai Islam. Kemudian berujung pada kebijakan publik, tidak disadari oleh partai, seharusnya materi pengkaderan partai menuju agar birokrasi menjadi instrumen bagi pembela orang miskin. Negara bisa menjadi instrumen. Bisa di nilai dengan nilai-nilai apapun. Hal tersebut menjadi mungkin jika aktivis partai juga menjadi *social movement* dan motor *social movement* bisa dari kalangan partai, betapa indahnya negeri ini kalau menjadi penggerak memproduksi nilai.

Ada kerangka *political advantage* dan penguatan negara. Dengan merujuk pada perspektif diatas kiranya perlu disadari bahwa Negara Islam bisa terjatuh pada perilaku membajak negara untuk kepentingan Islam, tetapi kalau akhlak Islam ada lebih dahulu sebagai referensi sosiologis baru dibuat pasalnya, selama ini sering kali diberi nama dulu sementara itu secara sosiologis belum ada.

Disatu sisi ada nilai nilai konsep yang abstrak disisi yang lain ada kenyataan bahwa kepemimpinan yang diterima adalah kepemimpinan intelektual, karena itu perlu ada prosedur yang dibakukan, dioperasionalkan. Islam menjadi manifest sebagaimana negara, tetapi tidak harus diberi label Islam. Contoh tentang *budgeting* sebagai khalifah para aktivis Islam maka membuat anggaran negara yang memihak kaum *dhu'afa*, menjaga lingkungan, yang perlu dijabarkan dalam operasionalisasi di birokrasi. Untuk keperluan itu maka analisis dampak lingkungan perlu dipertimbangkan menjadi materi pengkaderan.

Pada akhir tulisan ini kiranya perlu ditegaskan

pernyataan bahwa Teknologi Islam menjadi referensi dan negara menjadi instrumen untuk mewujudkan, negara bukan untuk sekedar diduduki. Agenda tersebut walaupun tidak langsung dilakukan oleh partai, tetapi bisa menjadi supporting agenda setting. Siapa aktornya? apakah dosen, politisi, pengusaha, kaum profesional, ataukah majelis syuro, terbuka banyak pilihan.

Simpulan mewujudkan Muslim Negarawan merupakan agenda yang perlu dikawal kedepan. Cara mengawal dengan mempraktekkan hal-hal yang bisa diwujudkan, mengaktualkan ajaran Islam secara kontekstual. Supaya kenegarawan Muslim terus bisa dipertahankan maka yang dilakukan bukan hanya mendudukan tokoh Islam tetapi reproduksi wacana Islam yang operasional, semua itu bisa terwujud jika menyepakati *framework* intelektual *leadership*, bukan merujuk pada orang tetapi dipimpin oleh ide intelektualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruqi. 1995. *Islamisasi Pengetahuan*. Bandung; Pustaka.
- Alatas, Syed Farid. 2010. *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia*. Jakarta: Mizan Publika
- Alatas, Syed Farid. 2012, *Orientalisme Dalam Pengkajian Sejarah Alam Melayu*, Makalah Seminar Nasional, 30 April, FIS UNY.
- Ali Kettani. 1984. "Science and technology in islam: the underlying value system", dalam *Touch of midas: science value and environment in islam and the West* (Ziauddin Sardar, Ed). Manchester University Press.
- Am Saefuddin. 1993. *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan
- AM Saefuddin. 2010. *Islamisasi Sains dan Kampus*. Jakarta: PA Consultants
- Armahedi Mahzar. 2004. *Revolusi integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islam*. Mizan Pustaka: Bandung.
- Apter David, 1997, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES
- Azyumardi Azra. 1999. "Islam Politik dan Islam Kultural: Islam Masa Pasca Soekarto", dalam *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: LSAF.
- Basrowi. 2003. *Perlawanan Masyarakat terhadap Kekuasaan Kepala Desa Dalam Era Transisi: Studi Perlawanan dari Perspektif Fenomenologi*, Surabaya.
- Bassan Tibi. 2000. *The Challenge of Fundamentalisme : Political Islam and the New World Disorder (terjh) Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Basn Tibi. 2000. *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change (terjh) Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana

- Berger, Peter L, 1994, *Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial*, Penerjemah Hartono, Jakarta, LP3ES
- Berger, Peter L, dan Thomas Luckman, 1990, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terjemahan A. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES
- Bogdan dan Taylor, 1994, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York: John Wiley
- Bakker, A. 1992. *Ontologi: Metafisika Umum*. Kanisius: Yogyakarta.
- Brouwer 1982. *Latar Belakang Pemikiran Barat*. Alumni: Bandung.
- Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Chairil Anwar. 2004. *Islamisasi Ilmu, al-Qur'an dan Sain: dalam Tarbiyah Journal Al-Manar Edisi I*.
- Dawam Rahardjo. 1999. *Indonesia Dalam Era Transisi Menuju Demokrasi Sebuah Pengantar*, dalam *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: LSAF
- Dimiyati, Moch, 2000, *Penelitian Kualitatif: Paradigma Epistemologi, Pendekatan, Metode dan Terapan*, Malang: PPS Universitas Negeri Malang.
- Gulalp, Halil, "Political Islam in Turkey :The Rise and Fall of The Refah Partay", *The Muslim World*, Hartford:*Hartford Seminary*, Vol. 89, No. 1.
- Harun Hadiwijoyo. 1989. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Cetakan kelima. Kanisius: Yogyakarta.
- Heri Santoso, Listiyono Santoso. 2003. *Filsafat Ilmu Sosial: Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gama Media
- Hoover, Kenneth R. 1990. *Unsur-Ilmu-Unsur Pemikiran Ilmiah dalam ilmu Sosial*. Tiara Wacana: Yogyakarta.

- Ibnu Kaldun. 1986. *Kitaab al-'Ibar, wa Diiwaan-al-Mubtada' wal Khabar, Fii ayyaa-mil 'Arab wal 'Ajam wal Barbar, wa man 'Aaa-sharahum min Dzawis-Sulthaan al-Akbar*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Jakson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia
- Jujun S. Suriasumantri. 2009. *Ilmu Dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*. Cetakan ketujuhbelas. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Masykuri Abdillah. 1999. *Islam Politik dan Islam Struktural*. Kompas
- Kuntowijoyo. 1986. *Konvergensi Sosial dan Alternatif Gerakan Kultural, Pesantren*, No. 3
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006:87
- Lexy J Moeleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Bandung
- Masykuri Abdillah. 1999. *Islam Politik dan Islam Struktural*. Kompas, 2 Juli 1999 h. 4.
- Mulyadhi Kertanegara. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Mizan Pustaka:Bandung
- Nasiwan. 2005. *Pola Perubahan Hubungan antara Islam dan Negara: Suatu Studi tentang Islam Politik di Indonesia (1990-1999)*. Yogyakarta: UNY
- Noeng Muhadjir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pen. Rake Sarasin, Yogyakarta
- Noeng Muhadjir, 2007, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pen. Rake Sarasin, Yogyakarta
- Popper, Karl R. 2008. *Logika Penemuan Ilmiah (Terj): Saut Pasaribu dan Aji Sastrowardoyo*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Purwo Santoso, 2012, *Pembudayaan Analisis Kontekstual di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional, 30 April 2012, Yogyakarta, FIS UNY.
- Ravertz, Jerome R. 2009. *Filsafat Ilmu: Sejarah dan ruang Lingkup Bahasan(Terj: Saut Pasaribu)*. Cetakan keempat. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rohadi Awaludin. 2004. *Konsep Islamisasi Iptek: Tarbiyah digital jurnal al-Manar Edisi I*.
- Saefuddin. 1993. *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan
- Slamet Iman Santoso. 1977. *Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan*. Sastra Hudaya: Jakarta.
- Sontag, F. 1970. *Problem of Metaphysics*. Chandler Publishing Company: Pennsylvania.
- Sudarminta. 2002. *Epistemologi dasar; Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius
- Supardi. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Ombak
- Verhak, Haryono Imam. 1989. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Gramedia: Jakarta
- Yaser Arafat. 2012. *Rekonstruksi ilmu Sosial Asia*. Kompas

Endnote

¹ Dr. Nurcholis Madjid, Menjelang Pemilu 2004 pernah mencoba untuk mengikuti Konvensi Nasional Partai Golkar, untuk maju melalui Partai Golkar menjadi calon presiden. Fakta ini dapat dibaca pula bahwa penggagas utama tokoh perjuangan Islam kultural dengan kredonya “Islam Yes, Partai Islam No”, dipenghujung perjalanan hidupnya juga tertarik untuk bereksperimen menggunakan instrumen partai politik untuk bersaing meraih posisi jabatan presiden. Tentu posisi tersebut dalam rangka mencapai visi yang telah dirumuskan oleh Nurcholis Madjid, yang dirumuskan sebelum deklarasinya maju dalam Konvensi Nasional Partai Golkar.

² Ibnu Kaldun, pada buku dengan judul, **Kitaab al-‘Ibar, wa Diiwaan-al-Mubtada’ wal Khabar, Fii ayyaa-mil “Arab wal ‘Ajam wal Barbar, wa man ‘Aaa-sharahum min Dzawis-Sulthaan al- Akbar**, menyebutkan sedikitnya ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para ilmuwan, antara lain ialah sikap tasyayu (tidak menjaga jarak) menjadi pengikut mahzhab pemikiran tertentu sehingga sulit untuk bersikap kritis dalam analisisnya, yang kedua ialah tiadanya sikap tarjih (selektif) dalam menerima informasi, ketiga menerima asumsi yang tidak beralasan,

³ Tokoh ini antara lain mempelopori proyek Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

⁴ Kuntowijoyo, antara lain menawarkan “Ilmu Sosial Profetik” yang disatu sisi bersumber dari Islam akan tetapi memiliki pijakan dalam tradisi ilmu sosial barat.



NASIWAN, lahir di Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 17 April 1965. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SPG di Banyumas. Melanjutkan S1 di IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang UNY), Pasca Sarjana di S2 Ilmu Politik UGM, Sekolah Pasca Sarjana S3 Ilmu Politik UGM. Menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial UNY sejak tahun 1995.

Mengampu mata kuliah pengantar Ilmu Politik, Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Teori Teori Politik, Politik Lokal, Filsafat Ilmu Sosial. Disamping sebagai dosen yang bersangkutan juga aktif dalam FISTRANS INSTITUTE, ketika mahasiswa pernah tercatat sebagai salah satu pendiri LPM Ekspresi UNY, Sekjen Senat Mahasiswa.

Buku yang sudah ditulis antara lain: *Diskursus Islam dan Negara Suatu Studi tentang Islam Politik 1990-1999*, Penerbit Insan Cendekia tahun 2003, *Route Gerilya Intelektual Kuntowijoyo*, penerbit LPM Ekspresi Yogyakarta tahun 2003, *Fenomena Partai Keadilan Sejahtera Sebuah Eksperimen*, penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, tahun 2006, *Satu Abad Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial*, Penerbit Kompas, tahun 2010 (sebagai kontributor), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, penerbit Ombak, Yogyakarta tahun 2012, *Menuju Indegenousasi Ilmu Sosial Indonesia: Suatu Gugatan atas Penjajahan Akademik*, Penerbit Fistrans, tahun 2012, *Membongkar Hegemoni Negara Kapitalis atas Negara Berkembang*, *Mozaik Pemikiran Ilmu Sosial Profetik*, Penerbit Primaprint, tahun 2013, *Teori-Teori Politik*, Penerbit Ombak Yogyakarta, tahun 2013, *Filsafat Ilmu Sosial*, penerbit Fistrans Institute Yogyakarta, tahun 2014

Filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan lain, ia mempelajari dan menyelidiki seluruh alam seisinya. Selain itu, seseorang akan dapat berfikir kritis menanggapi gejala ataupun fenomena permasalahan serta dapat menemukan kebijakan yang ada. Dengan begitu, seorang intelektual akan menggunakan akalinya untuk berfikir secara rasional dan sistematis tertuju pada sistem tertentu yang disepakati oleh komunitas ilmiah dengan terarah.

Dalam konteks ilmu sosial, persoalan serius yang dihadapi oleh ilmuwan sosial di Indonesia adalah bagaimana menghadirkan ilmu sosial yang mampu melakukan transformasi? Mengapa perlu menfokuskan pada pertanyaan ini. Hal ini dikarenakan ilmu sosial pada dekade ini masih mengalami kemandekan. Ilmu sosial yang dibutuhkan adalah bukan hanya mampu menjelaskan fenomena sosial, namun juga mentransformasikan fenomena sosial tersebut, kearah mana transformasi dilakukan, untuk apa dan oleh siapa? Menurut refleksi Kuntowijoyo dalam menghadapi persoalan ini ilmu sosial akademis dan ilmu sosial kritis, belum bisa memberikan jawaban yang jelas.

Jalan keluar yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo adalah dengan membangun ilmu sosial profetik, yaitu suatu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Oleh karena itu ilmu sosial profetik, tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan *cita-cita etik* dan *profetik* tertentu. Dalam pengertian ini maka ilmu sosial profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakatnya. Menurut Kuntowijoyo arah perubahan yang diidamkan adalah didasarkan pada cita-cita humanisasi/emansipasi, liberasi dan transendensi, suatu cita-cita profetik yang diderivasikan dari misi historis Islam